



**PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER BRASIL PASCA PENETAPAN
KEBIJAKAN PERTAHANAN (*NATIONAL DEFENSE STRATEGY/NDS*)
TAHUN 2008**

***THE INCREASING OF BRAZIL'S MILITARY CAPABILITIES POST THE
NATIONAL DEFENSE STRATEGY (NDS) 2008***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Irfantoni Listiyawan
NIM 100910101028

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Didik Riyanto dan Ibu Lilis Setyowati;
2. Adikku Dwiki Setyo Novian Syah ;
3. Guru-guru dan pengajar sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Seorangpun tak dapat membebaskan dirinya dari masa lampau, pengalaman-pengalaman memberi warna pada pandangan dan hidup seseorang untuk seterusnya”

(Soe Hok Gie)¹

“Tempat yang tidak ada kegelapan ialah masa depan yang ada dalam angan-angan, yang tidak akan pernah dilihat siapapun, tetapi berkat firasat orang dapat jadi bagiannya secara mistis”

(George Orwell)²

¹ Soe Hok Gie. 2005. *Zaman Peralihan*. Jakarta: Gagas Media. Hal.116

² George Orwell. 2014. *1984*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. Hal.127

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfantoni Listiyawan

NIM : 100910101028

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil Pasca Penetapan Kebijakan Pertahanan (*National Defense Strategy/NDS*) Tahun 2008” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan yang telah disebutkan sumbernya. Karya ilmiah ini juga belum pernah diajukan pada instansi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Maret 2015

Yang menyatakan

Irfantoni Listiyawan

NIM. 100910101028

SKRIPSI

**PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER BRASIL PASCA PENETAPAN
KEBIJAKAN PERTAHANAN (*NATIONAL DEFENSE STRATEGY/NDS*)
TAHUN 2008**

Oleh

Irfantoni Listiyawan

NIM 100910101039

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma, MA., Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil Pasca Penetapan Kebijakan Pertahanan (*National Defense Strategy/NDS*) Tahun 2008**” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 7 April 2015
waktu : 09.00 WIB
tempat : Ruang LKPK FISIP-UNEJ

Tim Penguji:
Ketua

Drs. Himawan Bayu Patriadi. MA. Ph.D
NIP. 196108281992011001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Sugiyanto Eddie K. MA, Ph.D
NIP. 195004281979031001

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
NIP. 196802291998031001

Anggota I

Anggota II

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP. 195908311989021001

Adhiningasih Prabhawati. S.Sos, M.Si
NIP. 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil Pasca Penetapan Kebijakan Pertahanan (*National Defense Strategy/NDS*) Tahun 2008; Irfantoni Listiyawan 100910101028; 2014: - 122 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada 18 Desember 2008 pemerintah Brasil yang saat itu dipimpin oleh rezim pemerintahan Luiz Inacio Lula da Silva menetapkan kebijakan pertahanan yang tertuang dalam *National Defense Strategy*. Penetapan kebijakan pertahanan tahun 2008 berdampak pada peningkatan kapabilitas militer Brasil baik di sektor pertahanan darat, laut dan udara. Pada sektor pertahanan darat, peningkatan kapabilitas militer dilakukan dengan akuisisi dan modernisasi armada tempur tank, yakni dengan akuisisi 220 unit tank tempur utama *Leopard IA5*. Selain itu Angkatan Darat Brasil juga mengakuisisi kendaraan tempur pengangkut personil *Guarani* sejumlah 2.044 unit dengan target selama duapuluh tahun serta memodernisasi teknologi misil *Astros 2020*. Pada sektor pertahanan laut terdapat proyek ambisius yaitu pembangunan kapal selam nuklir dalam program *ProSub* dan modernisasi armada kapal tempur, salah satunya kapal induk kelas ringan Sao Paulo dalam program *ProSuper*. Sementara di sektor pertahanan udara adapun proyek peningkatan kapabilitas militer ialah dengan mengakuisisi armada pesawat tempur baru dalam proyek FX-2 dan modernisasi pesawat angkut militer serta helikopter tempur. Tercatat pada tahun 2008, Pemerintah Brasil meningkatkan anggaran pertahanan dan belanja militer sebesar 53 persen. Anggaran tersebut merupakan yang terbesar selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Pemerintah Brasil memutuskan untuk meningkatkan kapabilitas militernya pasca penetapan kebijakan pertahanan tahun 2008.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti tujuan peningkatan kapabilitas militer Brasil. Metode tersebut menuntut penulis untuk dapat menganalisis data dengan sifat deduktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data-data yang ada di dapat dari data sekunder. Landasan Konseptual yang digunakan ialah

dengan menggunakan teori hubungan internasional neorealis untuk menganalisis tujuan peningkatan kapabilitas militer Brasil. Selain itu, penulis menggunakan konsep pengambilan keputusan model birokratik (*bureaucratic model*) Graham T.Allison. Konsep tersebut penulis gunakan dalam menganalisis pengambilan keputusan terkait pemilihan mitra kerja dalam proyek akuisisi pesawat tempur baru pada program FX-2.

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas militer Brasil terbagi dalam empat tujuan. Pertama adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan nasional Brasil dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Kedua, untuk membangkitkan kembali industri pertahanan nasional Brasil dan untuk menjadi salah satu aktor utama dalam industri pertahanan dunia terutama pesawat tempur. Ketiga, sebagai respon terhadap kehadiran militer Amerika Serikat dikawasan Amerika Selatan. Kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan ditunjukkan dengan adanya pembangunan pangkalan militer di Kolombia dan pengaktifan kembali armada keempat (*fourth fleet*) Angkatan Laut Amerika Serikat. Keempat adalah sebagai upaya Brasil untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK-PBB).

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil Pasca Penetapan Kebijakan Pertahanan (*National Defense Strategy/NDS*) Tahun 2008”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma, MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Bagus Sigit Sunarko M.Si Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Adhiningasih Prabhawati, S. Sos, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak dan Ibu dosen dan staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
4. Ayahanda Didik Riyanto dan Ibunda Lilis Setyowati;
5. Sahabat dan kawan-kawan Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember Angkatan 2010 yang telah berbagi dan menorehkan mimpi, cinta, serta harapan selama penulis menempuh pendidikan;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Maret 2015
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.2.1 Batasan Materi.....	8
1.2.2 Batasan Waktu.....	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kerangka Dasar Pemikiran	10
1.5.1 Teori Hubungan Internasional <i>Neo-Realisme</i>	10
1.5.2 Decision Making Process : <i>Bureauctic Model</i>	17
1.6 Argumen Utama	21
1.7 Metode Penelitian	21
1.7.1 Teknik Pengumpulan data.....	21
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	22
1.8 Sistematika Penulisan	23

BAB II. MILITER BRASIL DAN ISU KEAMANAN KAWASAN	
AMERIKA SELATAN	25
2.1 Gambaran Umum Brasil	25
2.2 Ancaman bagi Brasil dan Kawasan Amerika Selatan	26
2.2.1 Terorisme	27
2.2.2 Kejahatan Transnasional.....	27
2.3 Militer Brasil	29
2.3.1 Angkatan Darat Brasil.....	32
2.3.2 Angkatan Laut Brasil.....	34
2.3.3 Angkatan Udara Brasil.....	37
2.4 Perbandingan Kapabilitas Militer Brasil dengan	
Negara-negara Kawasan Amerika Selatan	40
2.4.1 Perbandingan Kapabilitas Militer Brasil dengan	
Negara Kawasan Amerika Selatan di Matra	
Pertahanan Darat.....	40
2.4.2 Perbandingan Kapabilitas Militer Brasil dengan	
Negara Kawasan Amerika Selatan di Matra	
Pertahanan Laut.....	42
2.4.3 Perbandingan Kapabilitas Militer Brasil dengan	
Negara Kawasan Amerika Selatan di Matra	
Pertahanan Udara.....	44
2.4.4 Perbandingan Kapabilitas Militer Brasil dengan	
Negara Kawasan Amerika Selatan dari Segi	
Kekuatan Personil.....	46
BAB III. LANDASAN STRATEGIS PENINGKATAN	
KAPABILITAS MILITER BRASIL	49
3.1 Pedoman Kebijakan Pertahanan dan Keamanan	
Brasil	49
3.1.1 Dokumen <i>National Strategy of Defense:</i>	
<i>Peace and Security for Brazil 2008</i>	49
3.1.2 Buku Putih Pertahanan Brasil 2012.....	52

3.2 Program Peningkatan Kapabilitas Angkatan Darat.....	55
3.2.1 Modernisasi dan Akuisisi Tank Tempur Utama (MBT) LEOPARD.....	55
3.2.2 Modernisasi dan Akuisisi Kendaraan Angkut Militer (APC) GUARANI.....	59
3.2.3 Pengembangan Teknologi Sistem Persenjataan Misil ASTROS 2020.....	61
3.3 Program Peningkatan Kapabilitas Angkatan Laut.....	63
3.3.1 Proyek <i>ProSuper</i>	64
3.3.2 Proyek <i>ProSub</i> : Proyek Pembangunan Kapal Selam Nuklir.....	66
3.4 Program Peningkatan Kapabilitas Angkatan Udara.....	69
3.4.1 Proyek FX-2: Akuisisi dan Modernisasi Pesawat Tempur.....	69
3.4.2 Proyek HX-BR, H-60 dan AH-X: Akuisisi dan Modernisasi Helikopter Angkatan Udara.....	72
3.4.3 Proyek KC-X2: Akuisisi dan Modernisasi Pesawat Angkut Militer.....	74
BAB IV. KEBIJAKAN PENINGKATAN	
KAPABILITAS MILITER BRASIL.....	76
4.1 Menjaga Kedaulatan Nasional Brasil.....	76
4.1.1 Hakikat Kedaulatan Nasional.....	76
4.1.2 Ancaman Kedaulatan Nasional bagi Brasil.....	77
4.1.3 Respon Brasil terhadap Ancaman Kedaulatan Negara.....	80
4.2 Membangun Kembali Industri Pertahanan Brasil.....	83
4.2.1 Hakikat Industri Pertahanan Nasional.....	83
4.2.2 Industri Pertahanan Brasil.....	85
4.3 Sebagai Respon Terhadap Kehadiran Militer Amerika Serikat di Kawasan Amerika Selatan.....	87
4.3.1 Pembangunan Pangkalan Militer Amerika Serikat	

di Kolombia.....	89
4.3.2 Pengaktifan Kembali Armada Keempat (<i>Fourth Fleet</i>) Angkatan Laut Amerika Serikat.....	81
4.3.3 Respon Brasil Terhadap Kehadiran Militer Amerika Serikat di Kawasan Amerika Selatan.....	93
4.4 Sebagai Promosi Militer Brasil di Kawasan Amerika Selatan dan Dunia Internasional.....	95
4.4.1 Brasil dan Dewan Keamanan PBB.....	96
4.4.2 Upaya Brasil untuk menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.....	97
4.5 Analisa Teoritis Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil.....	99
4.5.1 Pendekatan Menggunakan Teori Neorealis.....	99
4.5.2 Pendekatan Menggunakan <i>Bureaucratic Model</i> ...	104
BAB V. KESIMPULAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR TABEL

1.1 Perbedaan Defensif dengan Ofensif dalam Neorealisme.....	13
2.1 Anggaran Pertahanan Brasil.....	31
2.2 Daftar Wilayah Komando Militer Angkatan Darat Brasil.....	33
2.3 Daftar Wilayah Komando Militer Angkatan Laut Brasil.....	36
2.4 Daftar Wilayah Komando Regional Militer Angkatan Udara Brasil.....	39
2.5 Kapabilitas Militer Komparatif Matra Pertahanan Darat Negara-negara Amerika Selatan tahun 2013.....	41
2.6 Kapabilitas Militer Komparatif Matra Pertahanan Laut Negara-negara Amerika Selatan tahun 2013.....	43
2.7 Kapabilitas Militer Komparatif Matra Pertahanan Udara Negara-negara Amerika Selatan tahun 2013.....	45
2.8 Kapabilitas Militer Komparatif dari Segi Personil Negara Kawasan Amerika Selatan tahun 2012.....	47
3.1 Varian MBT Leopard 1.....	58
3.2 Spesifikasi Kapal Selam <i>Scorpene</i>	68
4.1 Wilayah Operasi Agatha.....	82
4.2 Jumlah Personil dan Peralatan Tempur Operasi Agatha.....	82
4.3 Perbandingan Kompetitor dalam Proyek FX-2.....	106
4.4 Pandangan Pihak Eksekutif Brasil terhadap Kompetitor Proyek FX-2.....	108

DAFTAR GAMBAR

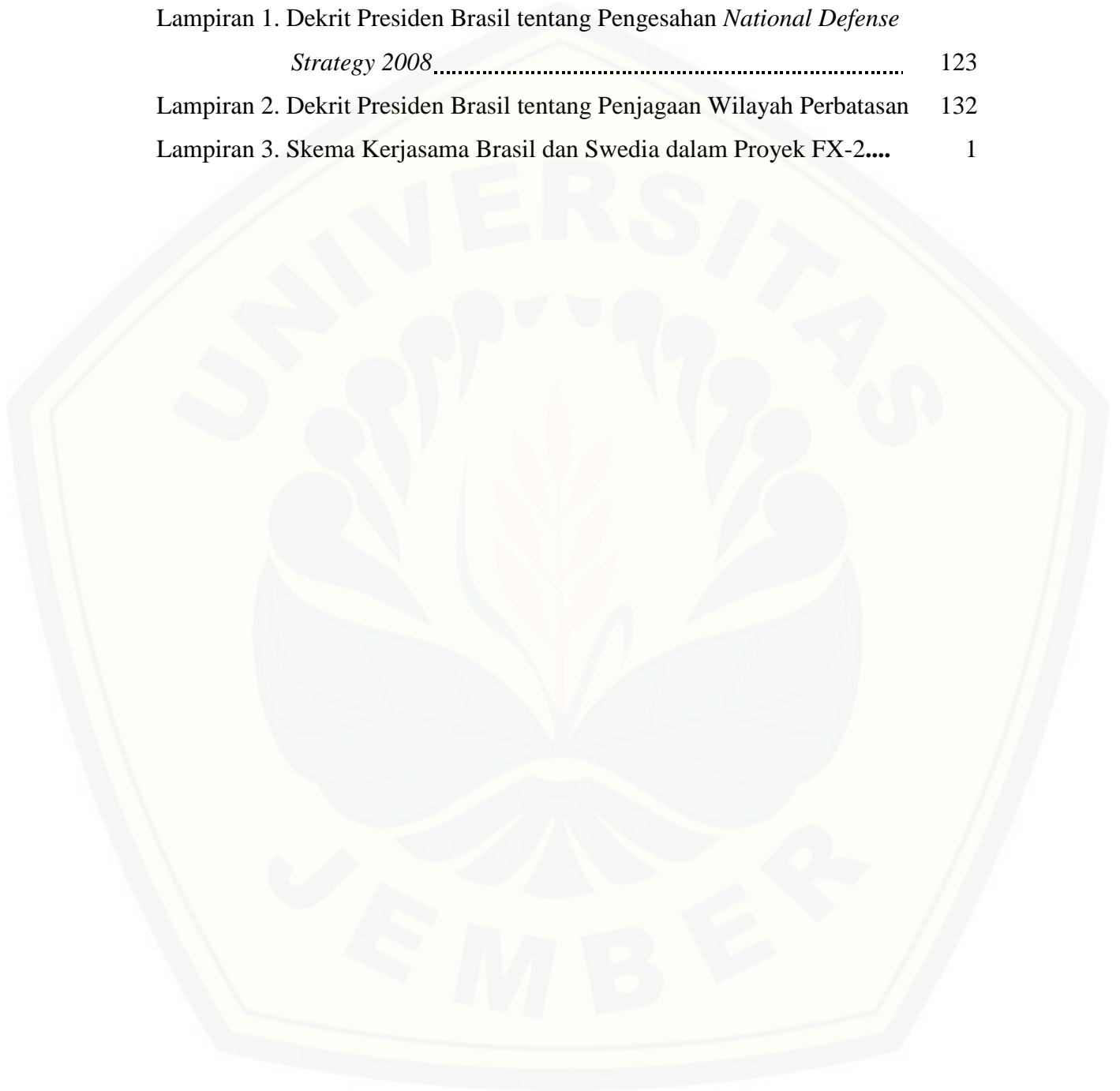
1.1 Pola interaksi Antar Negara dalam Sistem Multipolar.....	12
1.2 Proses Perumusan Mengenai Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil di Kawasan Amerika Selatan.....	20
2.1 Garis Komando Militer Brasil.....	29
2.2 Pembagian Wilayah Komando Angkatan Darat Brasil.....	33
2.3 Pembagian Wilayah Komando Distrik Angkatan Laut Brasil.....	35
2.4 Pembagian Wilayah Komando Regional Angkatan Udara Brasil.....	38
3.1 Area Persebaran Pengembangan Nuklir Brasil.....	51
4.1 Wilayah Operasi FARC di Kolombia.....	78
4.2 Persebaran Militer Brasil dalam Program <i>Calha Notre</i>	80
4.3 Pangkalan Militer Amerika Serikat di Kolombia.....	90
4.4 Wilayah Operasi <i>Fourth Fleet</i> dan Komando USSOUTHCOM.....	92

DAFTAR SINGKATAN

APC	= <i>Armour Personel Carrier</i>
BRIC	= <i>Brasil, Rusia, India, China</i>
DK-PBB	= <i>Dewan Keamanan - PBB</i>
EB	= <i>Exercito Brasileiro</i>
FAB	= <i>Forca Aerea Brasileira</i>
FARC	= <i>Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia</i>
MB	= <i>Marinha do Brasil</i>
MBT	= <i>Main Battle Tank</i>
MINUSTAH	= <i>Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti</i>
MLRS	= <i>Multiple Launch Rocket Sistem</i>
NSA	= <i>National Security Agency</i>
<i>ProSub</i>	= <i>Programa de desenvolvimento de Submarinos</i>
<i>ProSuper</i>	= <i>Programa de Obtenção de Meios de Superfície</i>
SAAB	= <i>Svenska Aeroplan Aktiebolaget</i>
SOUTHCOM	= <i>United States Southern Command</i>
UNIFIL	= <i>United Nations Interim Force In Lebanon</i>
UNFICYP	= <i>United Nations Peacekeeping Force in Cyprus</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dekrit Presiden Brasil tentang Pengesahan <i>National Defense Strategy 2008</i>	123
Lampiran 2. Dekrit Presiden Brasil tentang Penjagaan Wilayah Perbatasan	132
Lampiran 3. Skema Kerjasama Brasil dan Swedia dalam Proyek FX-2....	1



BAB I

PENDAHULUAN

*" A war can perhaps be won singlehandedly.
But peace, lasting peace cannot be secured without the support of all..."*

(Luiz Inacio Lula da Silva)³

1.1 Latar Belakang

Pertahanan nasional merupakan suatu hal yang diperlukan bagi sebuah negara untuk menjaga kedaulatan dan wilayahnya. Pertahanan nasional bertujuan untuk mewujudkan situasi dan kondisi bangsa dalam melindungi semua sistem kehidupan nasionalnya terhadap setiap ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.⁴ Pada kajian tentang pertahanan nasional terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kekuatan pertahanan suatu negara dipengaruhi oleh persepsi ancaman negara itu. Semakin tinggi tingkat ancaman yang dirasakan baik dari segi politik maupun kedaulatan nasional, maka semakin tinggi pula kecenderungan negara itu untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya, dan begitu pula sebaliknya.⁵ Bentuk dari pertahanan nasional diantaranya pertahanan darat, pertahanan laut dan pertahanan udara. Pertahanan tersebut menitikberatkan pada bagaimana sebuah negara melindungi serta menjaga wilayah darat, laut dan udaranya terhadap ancaman dari negara lain.

Brasil merupakan salah satu negara yang cukup besar dari segi geografis di wilayah Amerika Selatan dari segi wilayah perairan dan udara. Melihat kondisi Brasil yang sangat strategis di bidang sumber daya alam dan ekonomi, maka sangat penting bagi pemerintah Brasil memperhatikan aspek strategi dan pertahanan. Pada 18 Desember 2008, Luiz Inacio Lula da Silva yang menjabat

³ Pernyataan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dalam *"The General Debate of the 58th Session of the General Assembly of the United Nations"* New York, 23 September 2003. Dikutip dari <http://www.un.org/webcast/ga/58/statements/braeng030923.htm> (Diakses pada 13 Maret 2015)

⁴Sayidiman Suryohadiprojo. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.04

⁵Yusron Ihz Mahendra. 2009. *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional*. Edisi kedua. Bandung: Mizan Media Utama. Hal.183

sebagai Presiden Brasil saat itu, menandatangani draf rancangan strategi pertahanan nasional yang tertuang dalam *Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil*.⁶ Rancangan strategi tersebut merupakan sebuah pedoman dan gambaran umum tentang kebijakan pertahanan dan keamanan, serta tujuan nasional yang akan dijalankan oleh Pemerintah Brasil ke depannya. Dengan dikeluarkannya rancangan strategi tersebut, berimplikasi terhadap penguatan pertahanan, terutama sektor pertahanan laut dan pertahanan udara. Hal ini terlihat pada poin pertama dan ketiga pada bagian *National Strategy of Defense's Guidelines* yang menyebutkan bahwa :

1. *To dissuade the concentration of hostile force in the terrestrial borders, in the limits of the Brazilian jurisdictional waters, and prevent them from using the national air space.*
3. *To develop the ability to monitor and control the Brazilian air space, the territory and the jurisdictional waters.*⁷

Berdasarkan poin diatas, Pemerintah Brasil lebih memfokuskan pengamanan di wilayah perairan dan wilayah udara selain wilayah darat. Selain itu, Pemerintah Brasil akan mengembangkan kemampuan untuk melakukan pengawasan wilayah yurisdiksi perairan dan udara.

Alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kendaraan tempur yang memadai diperlukan untuk menjaga wilayah yang luas khususnya perairan dan udara di Brasil. Pemerintah Brasil dan militer sebagai penjaga kedaulatan negara menyadari pentingnya sarana tersebut untuk menjalankan fungsi pertahanannya. Namun, keberadaan sarana mobilitas militer baik sektor laut dan udara Brasil dinilai masih kurang memadai dalam menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan

⁶Naskah draf strategi tersebut terbit dalam dua bahasa, yakni bahasa Portugis sebagai bahasa resmi Brasil dengan judul *Estrategia Defesa Nacional* dan bahasa Inggris dengan judul *Strategy of Defense : Peace and Security for Brazil*. Pada karya ilmiah ini penulis menggunakan naskah dalam bahasa Inggris. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami arti dan isi draf strategi tersebut.

⁷Ministry of Defense 2008. *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil*. Brazilia: Ministry of Defense of Brazil. Hal.11

negara. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan sarana mobilitas pertahanan laut hingga tahun 2010. Sebanyak 318 unit militer *Marinha do Brasil* atau Angkatan Laut Brasil hanya 132 unit yang berada dalam kondisi siap tempur. Pesawat pengangkut Angkatan Udara terdapat 23 unit pesawat dalam kondisi siap tempur. Sebanyak 98 kapal tempur Angkatan Laut yang ada, terdapat 48 buah kapal tidak dapat berfungsi dengan baik. Sarana pendukung Angkatan Laut Brasil lainnya adalah helikopter, dari 67 helikopter tempur hanya 22 buah yang dinyatakan dalam kondisi siap tempur.⁸

Sementara itu, di sektor pertahanan udara, Angkatan Udara Brasil juga mengalami kondisi tidak jauh berbeda dengan sektor pertahanan laut. Sebanyak 789 unit pertahanan udara, hanya 357 unit yang masih lengkap dan dalam kondisi siap tempur (termasuk 48 diantaranya peluncur misil). Pesawat tempur yang ada berjumlah 208 buah, namun hanya 85 buah yang berada dalam kondisi siap tempur. Pesawat pengangkut termasuk helikopter berjumlah 298 buah, yang berada dalam kondisi siap hanya berjumlah 100 buah pesawat (73 helikopter dan 27 pesawat angkut). Kenyataan serupa juga pada matra Angkatan Darat Brasil, dari 1.953 unit kendaraan tempur termasuk tank hanya 1.079 yang masih layak untuk dioperasikan.⁹

Sebagai negara terbesar dan terluas di kawasan Amerika Selatan, Brasil tidak ingin menjadi negara yang lemah dari segi pertahanan. Pendapat demikian diungkapkan oleh Presiden Dilma Rousseff yang saat ini memerintah Brasil dalam pertemuan dengan pejabat negara Brasil pada hari Rabu 18 Desember 2013 di Brasilia, dengan menyatakan :

*"We are a peacefull country, but we won't be defenseless. A country the size of Brazil must always be ready to protect its citizens, patrimony and sovereignty "*¹⁰

⁸ Survincity. 2010. "Brazilian Armed Forces Need Urgent Modernization", <http://survincity.com/2010/01/brazilian-armed-forces-need-urgent-modernization/> (Diakses pada 09 Mei 2014)

⁹ *ibid.*

¹⁰ Brian Winter and Alonso Soto. 2013. "Saab wins Brazil jet deal after NSA spying sours Boeing bid", <http://www.reuters.com/article/2013/12/18/brazil-jets-idUSL2N0JX17W20131218> (Diakses pada : 18 Februari 2014)

Pernyataan Dilma Rousseff tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Brasil harus selalu siap melindungi wilayah, rakyat dan kedaulatan Brasil. Pernyataan Dilma Rousseff diatas juga memperkuat pernyataan presiden sebelumnya yaitu Lula da Silva di tahun 2007 pada saat mencanangkan program FX-2, yang menyatakan bahwa :

"In peace times to keep watch over Brazilian territory, fluvial and land borders, and sovereignty of the Amazon, and in conflict, quick display of human and physical resources to impede any threat to Brazilian territory".¹¹

Pernyataan Lula da Silva juga menegaskan bahwa Brasil merupakan negara yang cinta damai. Pada saat damai, Brasil berusaha melindungi kedaulatan wilayahnya termasuk wilayah Amazon. Namun, disaat konflik Brasil harus siap menghadapi setiap ancaman yang datang.

Hal tersebut cukup beralasan apabila kita melihat kondisi sarana pertahanan militer Brasil seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah Brasil mencanangkan beberapa megaproyek modernisasi di ketiga matra dengan anggaran yang cukup besar. Seperti contoh di matra udara, salah satu proyek ambisius yang dicanangkan ialah Proyek FX-2. Proyek ini pertama kali dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Luis Inacio da Silva di tahun 2007. Tujuan dari proyek ini ialah untuk modernisasi pesawat tempur yang dimiliki Angkatan Udara Brasil atau *Forca Aerea Brasileira* (FAB) selama kurun waktu 2015-2025. Selama ini Brasil menggunakan pesawat tempur *Mirage* produksi Perancis sejak tahun 1972.¹² Selain pesawat tempur *Mirage*, Angkatan Udara Brasil juga memiliki armada pesawat tempur F-5 yang berjumlah 57 unit untuk memperkuat Angkatan Udaranya.¹³ Pesawat tempur *Mirage* tersebut digantikan oleh 36 pesawat tempur baru pada akhir tahun 2013 dalam proyek FX-2.

¹¹ Mercopress. 2007. "Brazil to boost defense industry and acquire 36 fighter jets", <http://en.mercopress.com/2007/11/06/brazil-to-boost-defense-industry-and-acquire-36-fighter-jets> (Diakses pada : 23 Maret 2014)

¹² Inigo Guevara. "Analysis : Brazil's Fighter Choice Will Not be an Easy One". *JDW's*. 31 Maret 2010. Hal.23

¹³ Kenneth Maxwell. 2014. "After the Brazilian Fighter Deal: An Update on the Evolution of Brazilian Aviation", <http://www.sldinfo.com/after-the-brazilian-fighter-deal-an-update-on-the-evolution-of-brazilian-aviation>. (Diakses pada : 23 September 2014)

Pada sektor pertahanan darat, Angkatan Darat Brasil juga memodernisasi armada tank tempurnya dengan membeli tank tempur utama atau *Main Battle Tank* (MBT) *Leopard 1A5* untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan darat dan memperkuat armada tempur sebelumnya. Pembelian tersebut dilaksanakan pada tahun 2009 hingga tahun 2012 melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Brasil dengan Pemerintah Jerman melalui perusahaan kontraktor asal Jerman *Krauss-Maffei Wegmann* (KMW).¹⁴ Sebelumnya Angkatan Darat Brasil menggunakan armada tank tempur ringan (*Lights Tank*) M41 sejumlah 287 buah. Pada tahun 1997, dibawah pemerintahan Presiden Cardoso Angkatan Darat Brasil membeli tank tempur utama atau *Main Battle Tank* (MBT) *Leopard 1A1* sejumlah 128 buah bekas Angkatan Darat Belgia hingga tahun 1999 disamping MBT M-60 A3 produksi Amerika Serikat.¹⁵

Pada sektor laut proyek modernisasi yang dilakukan juga tergolong besar. Salah satu megaprojek Angkatan Laut Brasil atau *Marinha do Brasil* saat ini ialah pembangunan armada kapal selam baru. Dalam program tersebut Pemerintah Brasil bekerjasama dengan Perancis yang kemudian dikenal sebutan *Brazilian Navy's Submarine Development Programme (ProSub)*. Proyek tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerjasama antara Perancis yang diwakili oleh Presiden Nicolas Sarkozy dengan Presiden Brasil Lula da Silva pada Desember 2008 dan ditandatangani pada tahun 2009.¹⁶ Presiden Lula da Silva berencana membangun lima armada kapal selam tempur kelas *Scorpene (Scorpene Class)*, empat buah kapal selam konvensional bertenaga diesel dan satu diantaranya kapal selam

¹⁴ ASD News. 2009. "KMW Hands Over 1st LEOPARD 1A5 to Brazilian Army", http://www.asdnews.com/news24182/KMW_Hands_Over_1st_LEOPARD_1A5_to_Brazilian_Army.htm (Diakses pada : 16 September 2014)

¹⁵ Global Security. 2013. "Exercito Brasileiro-Brazilian Army Modernization", <http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/army-mods.htm> (Diakses pada 16 September 2014)

¹⁶ Fabiana Frayssinet. 2011. "Brazil's New Nuclear Subs to Defend Oil Well", <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/07/201172213173679528.html>. (Diakses pada 15 Mei 2014)

berteknologi nuklir¹⁷. Saat ini Brasil memiliki lima buah armada kapal selam tempur konvensional kelas *Tupi* (*Tupi Class*) sejak tahun 1987.¹⁸

Sebagai sebuah negara Brasil juga memiliki ancaman. Ancaman bagi Brasil adalah kejahatan transnasional, seperti perdagangan obat-obatan terlarang. Hingga saat ini, Brasil termasuk ke dalam negara dengan konsumsi kokain dan obat-obatan terlarang terbesar di dunia.¹⁹ Inilah yang membuat militer Amerika Serikat dengan dalih *War on Drugs* mulai memasuki kawasan Amerika Selatan. Kehadiran militer Amerika Serikat di Amerika Selatan membuat resah negara-negara besar kawasan seperti Argentina, Chile, Bolivia dan juga Brasil. Menteri luar negeri Brasil, Celso Amorim, menilai bahwa jumlah pasukan Amerika Serikat yang diterjunkan ke wilayah Amerika Selatan sejak tahun 2008 terlihat terlalu besar untuk sebuah operasi terhadap obat-obatan terlarang di Amerika Selatan.²⁰

Beroperasinya kembali armada keempat Angkatan Laut Amerika Serikat (*U.S Fourth Fleet*) memicu negara-negara Amerika Selatan meningkatkan pertahanannya, termasuk Brasil. Tindakan tersebut dapat mengarah pada dilema keamanan atau *security dilemma* di tingkat regional Amerika Latin. Pengoperasian kembali mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2008, dan merupakan pengoperasian dengan misi baru setelah penarikan armada tersebut pasca Perang Dunia II tepatnya tahun 1950. Misi baru tersebut seperti yang dikemukakan oleh pihak Pentagon diantaranya misi kontingensi, perang terhadap terorisme dan narkoba, serta kegiatan kerjasama pertahanan.²¹ Namun, Pemerintah Brasil memiliki pandangan lain tentang keberadaan armada keempat angkatan laut

¹⁷ Michael Moran. 2011. "Analysis: Brazil Goes Nuclear"
<http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/brazil/110714/brazil-nuclear-submarine-falkland-islands-brazil-argentina-oil> (Diakses pada 15 Mei 2014)

¹⁸ Submarine on Stamps.2013. "Marinha do Brasil Submarine",
<http://www.submarinesonstamps.co.il/History.aspx?h=230> (Diakses pada : 16 sept 2014)

¹⁹ "Does Brazil Need to Increase Defense Spending ?" dalam harian *Inter-America Dialogue's : Latin America Advisor* (Thursday, June 21, 2012) pp : 02-04 diakses dari
<http://www.thedialogue.org> pada 24 Maret 2014

²⁰ Suara Media. 2009. "Lindungi Devisa Negara, Brasil Kembangkan Kapal Selam Nuklir",
<http://www.suaramedia.com/amerika/2009/08/24/lindungi-devisa-megara-brazil-kembangkan-kapal-selam-nuklir> (Diakses pada 27 Juni 2014)

²¹ Humberto Santana,. 2008." US Navy resurrects Fourth Fleet to police Latin America",
<http://www.wsws.org/en/articles/2008/05/navy-m07.html> (Diakses pada : 08 Agustus 2014)

Amerika Serikat tersebut di kawasan perairan Amerika Selatan. Presiden Brasil, Luis Inacio Lula da Silva menilai bahwa keberadaan armada angkatan laut Amerika Serikat di kawasan Selatan sebagai sebuah sinyal bahwa pihak Amerika Serikat mengincar sumber cadangan minyak baru yang terbesar di lepas pantai Brasil dan memperluas pengaruhnya di kawasan Amerika Selatan.²² Pada tahun 2006 perusahaan minyak negara Brasil, Petrobras dengan beberapa perusahaan mitra menemukan cadangan sumber minyak dan gas baru. Area sumber minyak bawah laut tersebut terletak di Santos Basin yang termasuk dalam wilayah Laut Atlantik Selatan, sekitar 250 kilometer (155 mil) selatan Rio de Janeiro.²³

Setahun kemudian, pada November 2007 Petrobras kembali menemukan sumber minyak dasar laut kembali dengan kandungan sebesar lima hingga delapan milyar barel. Dengan ditemukannya sumber minyak dasar laut tersebut diprediksi akan mampu menjadikan Brasil sebagai negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia dengan estimasi kandungan minyak sebesar 33 milyar barel.²⁴ Hal ini yang membuat Pemerintah Brasil merasa resah akan keberadaan Armada Keempat Amerika Serikat (*U.S Fourth Fleet*) di perairan Amerika Selatan. Mengingat Amerika Serikat tengah mencari kawasan sumber minyak baru setelah kawasan Timur Tengah yang menjadi pemasok utama kebutuhan minyak di negara tersebut.

Peningkatan kapabilitas militer Brasil menjadi menarik untuk diamati, karena Brasil memiliki prinsip sebagai negara pasifis (cinta damai). Namun, dengan ditandatanganinya *Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil* tahun 2008, mengindikasikan bahwa Brasil memiliki tujuan nasional yang lebih luas di kawasan Amerika Selatan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kebijakan pertahanan dan keamanan

²² Eric Walsh. 2008. "New fleet may mean U.S. covets Brazil's oil: Lula", <http://www.reuters.com/article/2008/09/18/us-brazil-oil-usa-idUSN1827567620080918> (Diakses pada : 08 Agustus 2014)

²³ Geof Hiscock. 2012. *Earth Wars : The Battle of Global Resources*. Singapore: John Wiley & Sons Pte. Ltd. Hal. 208

²⁴ Sarah Diehl. 2009. "Brazil's New National Defense Strategy Calls for Strategic Nuclear Developments", <http://www.nti.org/analysis/articles/brazils-new-defense-strategy/> (Diakses pada : 29 Juni 2014)

nasional Brasil seperti yang tertuang dalam *Strategy of Defense: Peace and Security for* dan *Livro Branco da Defesa Nacional* tahun 2012²⁵ kedalam sebuah karya ilmiah. Adapun judul dalam karya ilmiah ini adalah :

**“Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil Pasca Penetapan Kebijakan
Pertahanan (*National Defense Strategy /NDS*) Tahun 2008”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, ruang lingkup pembahasan memiliki kedudukan yang penting. Hal tersebut karena agar karya tulis ilmiah tersebut fokus terhadap kajian yang akan diteliti atau dianalisis. Oleh karena itu, pembahasan rumusan masalah bisa berjalan ke arah sasaran yang telah ditentukan dan tidak melebar serta keluar dari kerangka penelitian. Ruang lingkup pembahasan sendiri terbagi atas dua batasan yakni batasan waktu dan bahasan materi.

1.2.1 Batasan Materi

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis memfokuskan pembahasan pada alasan mengapa Brasil meningkatkan kapabilitas militernya di kawasan Amerika Selatan. Konstelasi kawasan serta isu pertahanan dan keamanan di kawasan Amerika Selatan. Selain itu, penulis juga akan mengulas perbandingan kapabilitas militer Brasil dengan negara-negara besar di kawasan Amerika Selatan. Pada bagian selanjutnya diuraikan bagaimana upaya Brasil untuk meningkatkan kapabilitas militernya di Amerika Selatan.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam karya tulis ilmiah ini ialah pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Karena pada tahun 2008 Pemerintah Brasil masih berada dibawah pemerintahan presiden Lula da Silva mengeluarkan rancangan strategi *Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil*. Sementara batasan akhir karya ilmiah

²⁵*Livro Branco da Defesa Nacional* adalah Buku Putih Pertahanan Brasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, berisi tentang strategi pertahanan yang akan diterapkan oleh Brasil dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan.

yaitu pada Desember tahun 2013 ketika Brazil mengumumkan pemenang tender proyek FX-2 dibawah pemerintahan Presiden Dilma Rousseff. Pengumuman mengenai pemenang tender dalam proyek FX-2 menjadi penentu bagi kelanjutan kebijakan strategi Brasil kedepannya. Namun, penulis juga mencantumkan fakta lain diluar tahun tersebut guna memperkuat data yang ada.

1.3 Rumusan Masalah

Apabila melihat kondisi Amerika Selatan pada umumnya dan Brasil khususnya tidak ada gejolak ataupun konflik berskala besar saat ini. Permasalahan yang muncul antara lain masalah keamanan di sekitar wilayah perbatasan seperti penyelundupan, imigran gelap dan gerilya dari kelompok-kelompok separatis. Namun menarik ketika melihat negara-negara besar di Amerika Selatan meningkatkan anggaran pertahanannya termasuk Brasil yang meningkatkan anggaran pertahanan dan militer sebesar 53 persen di tahun 2008.²⁶ Peningkatan anggaran tersebut merupakan yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan fakta tersebut kemudian penulis tertarik untuk menganalisa mengenai rumusan masalah yang ada pada karya ilmiah ini yaitu :

“ Mengapa Pemerintah Brasil Memutuskan untuk Meningkatkan Kapabilitas Militernya ? “

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, tujuan utama dari penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui alasan Pemerintah Brasil meningkatkan kapabilitas pertahanannya selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013 di kawasan Amerika Selatan. Titik awal batasan waktu penulis ialah pada saat Pemerintah Brasil di masa kepemimpinan Presiden Lula da Silva, mengeluarkan dokumen *Strategy of*

²⁶Andrew Downie. 2007. “A South American Arms Race?”

<http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1697776,00.html> (Diakses pada 24 Mei 2014)

Defense: Peace and Security for Brazil. Namun sebelum sampai pada tujuan utama penelitian ini, penulis mencoba menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Brasil dalam upayanya untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan darat, laut dan udara melalui proyek yang telah dicanangkan Pemerintah Brasil.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisa suatu masalah dibutuhkan beberapa teori serta konseptual yang mendukung pembahasan kasus yang diangkat dalam suatu karya ilmiah. Kerangka pemikiran secara umum dapat diartikan sebagai awal pemikiran dasar yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Kerangka pemikiran yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah teori hubungan internasional *Neo-Realisme* dan *Decision Making Process : Bureaucratic Model*.

1.5.1 Teori Hubungan Internasional Neo-Realisme

Dasar normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara, ini merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis, terutama realisme klasik.²⁷ Realisme kembali muncul di era 1980 dengan sebutan neo-realisme. Neo-realisme mengalami kemajuan dan perkembangan didalam kajian ilmu hubungan internasional pasca Perang Dingin. Perbedaan antara realis klasik dengan neo-realis sebagaimana dikemukakan Kenneth Waltz diantaranya terkait fokus pada struktur sebagai konsep, pergeseran pemahaman tentang kausalitas, interpretasi yang berbeda terhadap kekuatan serta level yang berbeda tentang unit analisis.²⁸

Penjelasan dari perbedaan tersebut *pertama*, neorealis berpendapat bahwa struktur internasional didefinisikan oleh prinsip penataan dan oleh distribusi kekuatan. Sistem internasional adalah anarki yang didefinisikan dengan tidak adanya otoritas lebih tinggi dari negara. *Kedua*, terkait kausalitas realis klasik

²⁷ Robert Jackson & Georg Sorensen.2009.*Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.89

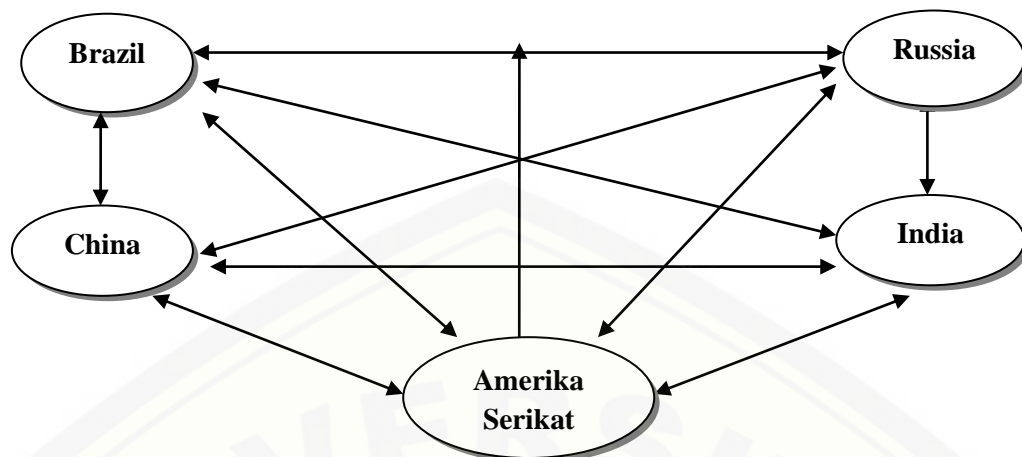
²⁸ Svetla Ben-Itzhak. 2013. *Realisme dan Neorealisme*. dalam John T. Ishiyama and Marijke Breuning. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Keduapuluh Satu: Sebuah Referensi Panduan Tematis*. (terj. A.Fedyani Syaifudin). Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup. Hal.516

berpendangan bahwa dunia internasional adalah tempat negara berinteraksi dan sebab-sebab bergerak ke satu arah, jadi analisis hanya berfokus pada negara. Sementara neorealis berpendapat bahwa politik internasional dapat dipahami hanya jika efek struktur internasional ditambahkan dalam analisis level. *Ketiga*, terkait interpretasi berbeda tentang kekuatan realis klasik memandang keinginan negara tentang kekuatan pada dasarnya berakar dalam sifat manusia. Neorealis berpendangan bahwa kekuatan sebagai alat yang bisa dipakai negara yang mungkin memiliki kekuatan kecil atau kekuatan besar. Artinya, kekuatan dapat dijadikan sebagai karakteristik sentral sebagai kombinasi kapabilitas negara. *Keempat*, terkait pembahasan pada level unit analisis, realis klasik berpendangan sistem internasional adalah anarki secara kondisi umum (bukan struktur tersendiri). Realis klasik memandang unit-unit yang berinteraksi sebagai respon terhadap lingkungan yang anarkis, hasil yang berbeda diatribusikan ke perbedaan dalam unit-unit seperti pemerintahan, ideologi, penguasa dan ideologi negara. Disisi lain, neorealis mengatakan bahwa strukturnyalah yang memediasi hasil yang dilakukan negara, bukan karena faktor internal negara tersebut.²⁹

Dengan demikian terjadi pula perubahan struktur dunia internasional dari yang semula bipolar menjadi multipolar. Tidak seperti bipolar yang hanya ada dua pihak yang saling berhadapan, persaingan dalam sistem multipolar lebih kompleks dan setiap negara saling berinteraksi. Hal tersebut dikarenakan adanya banyak pihak dan kemungkinan munculnya polar-polar baru yang juga sangat besar. Seiring berkembangnya multipolar, para pengamat memprediksi bahwa kebangkitan China, India, Rusia dan Brasil merupakan sesuatu yang realistis sebagai kekuatan baru di dunia internasional.³⁰ Pola tatanan dunia internasional dan interaksi antar negara dalam sistem multipolar dapat kita contohkan seperti gambar Bagan 1.1 berikut :

²⁹ *Ibid.*, Hal.517-518

³⁰ Victoria Jepson. 2012. "Identify the Major Differences between Classical Realism and Neo-realism", <http://www.e-ir.info/2012/01/24/the-differences-between-classical-realism-and-neo-realism/> (Diakses pada 15 Mei 2014)



Gambar 1.1 Pola interaksi Antar Negara dalam Sistem Multipolar
(Sumber: P.Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.158)

Apabila melihat kawasan Amerika Selatan saat ini, Brasil berpotensi untuk menjadi salah satu kekuatan baru di tingkat regional bahkan global dalam bidang militer. Hal tersebut dapat kita lihat dengan masuknya Brasil dalam urutan kesepuluh dari 15 negara dengan anggaran militer terbesar di dunia tahun 2012 berdasarkan data *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*.³¹ Pada sistem multipolar negara berusaha untuk meningkatkan keamanan nasionalnya dengan menggunakan kapabilitas domestik seperti kekuatan militer suatu negara atau melalui aliansi dengan negara lain. Namun, menurut Kenneth Waltz pembentukan aliansi adalah sulit tercapai, karena negara yang tergabung dalam aliansi akan memperhitungkan untung-rugi.³² Keuntungan dari adanya aliansi adalah negara dengan kapabilitas keamanan yang kecil akan merasa terlindungi oleh negara dengan kapabilitas yang lebih besar. Tetapi disisi lain, suatu negara juga akan merasa dirugikan karena kedaulatan negara sebagian akan diserahkan kepada aliansi. Oleh karena itu, terkadang sebuah negara melakukan

³¹Sam Perlo-Freeman, Elisabeth Sköns, Carina Solmirano and Helén Wilandh. "Trends in World Military Expenditure". *SIPRI Fact Sheet*, April 2012. Hal. 2-8

³²Kenneth N. Waltz. "Structural Realism After the Cold War". *International Security*, Vol. 25, No.1 (Summer 2000), pp. 6-41. Massachusetts: The President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology.

struggle for power dengan usahanya sendiri (*self-help*) untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Kekuatan baru yang muncul seperti gambaran diatas dapat digolongkan berdasarkan strategi dan tujuannya. Pengertian strategi disini adalah ilmu tentang penggunaan kekuatan politik, ekonomi, psikologi dan militer satu bangsa yang memungkinkan dukungan maksimal kepada kebijakan yang telah ditetapkan, baik pada masa damai maupun masa perang.³³ Berdasarkan sifatnya, strategi dapat dibedakan menjadi strategi defensif dan strategi ofensif. Perbedaan strategi dalam neorealisme antara ofensif dan defensif dapat dilihat dalam jurnal yang berjudul *Security Seeking under Anarchy* seperti yang dipaparkan oleh Jeffrey W. Taliaferro pada Tabel 1.1 berikut³⁴ :

Tabel 1.1 Perbedaan Defensif dengan Ofensif dalam Neorealisme

Strategi Teori	Fokus Utama dan Asumsi Tentang Anarki	Ruang Lingkup Teori	Tokoh Teoritis
Defensif	Sistem internasional memberikan insentif atau kesempatan untuk melakukan ekspansi, tetapi hanya pada saat kondisi tertentu	Menyerang atau bertahan bisa dibedakan. Teknologi dan faktor geografi dimanfaatkan untuk bertahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kenneth Waltz • Dale Copeland • Robert Jervis • Charles Glaser • Benjamin Miller

³³ Disadur dari *Webster's Third New International Dictionary* dalam, Sayidiman Suryohadiprojo *Op.Cit* . Hal.16

³⁴ Jeffrey W. Taliaferro. "Security Seeking under Anarchy". *International Security*, Vol. 25, No.3 (Winter 2000/01), pp. 128–161. Massachusetts: The President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology

Strategi Teori	Fokus Utama dan Asumsi Tentang Anarki	Ruang Lingkup Teori	Tokoh Teoritisi
Ofensif	Sistem Internasional selalu memberi insentif atau kesempatan untuk melakukan ekspansi.	Menyerang atau bertahan tidak dapat dibedakan. Teknologi dan faktor geografi mendukung untuk menyerang	<ul style="list-style-type: none"> • Robert Gilpin • Jacek Kugler • John Mearsheimer • Randall Schweller

(Sumber: Jeffrey W. Taliaferro. Jeffrey W. Taliaferro. "Security Seeking under Anarchy". *International Security*, Vol. 25, No.3 (Winter 2000/01), pp. 128–161 dan Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa. Hal.53 data diolah)

Berdasarkan pemaparan pada Tabel 1.1 diatas, para teoritisi kemudian mencoba mengemukakan pendapat mereka mengenai realisme defensif. Kenneth Waltz berpendapat bahwa peningkatan kapabilitas militer suatu negara selain dipengaruhi oleh faktor geografis juga dipengaruhi oleh tingkat populasi, kemampuan ekonomi, stabilitas politik, kekuatan militer dan daya dukung sumber daya.³⁵ Robert Jervis berpendapat bahwa dalam dunia yang anarki, suatu negara merasa cemas akan keberadaan negara lain. Kecemasan dipicu adanya distribusi kapabilitas yang bersifat relatif, dengan kata lain negara memiliki kemampuan yang berbeda dalam menjaga keamanannya. Apabila salah satu negara meningkatkan keamanannya, maka dengan sendirinya hal tersebut akan memicu negara lain untuk melakukan langkah-langkah yang sama.³⁶

³⁵Kenneth N. Waltz. "The Emerging Structure of International Politics". *International Security*, Vol.18, No.2 (Autumn, 1993), pp. 44-79. Massachusetts: The President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology

³⁶Robert Jervis. Cooperation under the Security Dilemma. *World Politics*, Vol. 30, No. 2 (January 1978), pp. 167–214 dalam Jeffrey W. Taliaferro. *Op.Cit* Hal.138

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Charles Glaser, menurutnya suatu negara yang meningkatkan kapabilitas keamanannya bertujuan untuk *survival* dan mencegah setiap ancaman dalam sistem internasional yang anarki. Glaser berpendapat ancaman yang paling utama ialah ancaman yang datang dari negara lain.³⁷ Selanjutnya, Dale Copeland didalam bukunya yang berjudul *The Origins of Major War* mengemukakan bahwa kekhawatiran akan kondisi keamanan membuat negara berusaha mencegah terjadinya perang.³⁸ Benjamin Miller mengemukakan bahwa keamanan dapat tercipta dengan adanya kerjasama dengan negara lain.³⁹

Lebih jauh lagi, Stephen Walt berpendapat bahwa untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar dapat dilakukan dengan *balancing* yakni dengan melawan sumber ancaman atau dengan *bandwagoning* (melakukan politik pengalihan kekuatan dengan beraliansi sumber bahaya).⁴⁰ *Bandwagoning* dilakukan oleh negara yang lemah terhadap negara yang kuat dengan harapan dapat memperoleh keuntungan terutama dari segi keamanan negara.⁴¹ Penulis mencontohkan kasus ini pada Jepang yang melakukan *bandwagoning* dengan Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Jepang yang saat itu dijatuhi sanksi untuk mengurangi jumlah militernya secara besar-besaran dan hal ini berdampak pada kondisi pertahanan Jepang. Untuk mengatasi masalah pertahanan Jepang sangat bergantung dari jaminan militer Amerika Serikat. Selain itu tujuan *bandwagoning* menurut Walt dilakukan negara untuk bersama-sama dalam mencapai sebuah tujuan (*to share spoils of victory*). Randall Schweller mencontohkan

³⁷ Charles Glaser. 2003. *The Necessary and Natural Evolution* dalam Griffiths, Martin (eds). 2007. *International Relation Theory for the Twenty-First Century*. New York: Routledge. Hal.17

³⁸ Terkait pendapat tersebut, Copeland mengemukakan bahwa superioritas militer dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti yang ia paparkan pada bagian teori *Dynamics Differential* dalam Dale Copeland. 2000. *The Origins of Major War*. New York: Cornell University Press. Hal.15

³⁹ Pendapat Miller tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah *Great power cooperation theories* seperti dikutip dalam Jeffrey W. Taliaferro. *Op. Cit* Hal.135

⁴⁰ Stephan Walt. 1987. *The Origins of Alliances*. Itacha: Cornell University Press. Hal.5 dalam Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa. Hal.44

⁴¹ Randall L. Schweller. "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In". *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer, 1994), pp. 72-107. Massachusetts: The President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology. Hal.74

bandwagoning antara Jerman dengan Italia pada Perang Dunia II dalam mendapatkan tanah jajahan.⁴²

Sementara itu, beberapa teoretisi lain mengemukakan pendapatnya mengenai realisme ofensif. Robert Gilpin berpendapat bahwa sistem hegemonik dengan satu aktor negara yang kuat akan menciptakan sebuah kestabilan dalam tatanan politik dan militer. Artinya, ada satu kekuatan besar yang dominan dalam suatu kawasan. Ketika terdapat kekuatan suatu negara setara dengan negara hegemon, maka negara tersebut diasumsikan akan memiliki kecenderungan untuk memulai perang.⁴³ Jacek Kugler menilai bahwa kunci untuk memenangkan peperangan yang bersifat ofensif terletak pada kekuatan militer. Kugler mencontohkannya pada kekuatan Jerman selama Perang Dunia, faktor yang menyebabkan Jerman hampir meraih kemenangan adalah dari segi superioritas kekuatan militernya.⁴⁴ John Mearsheimer berpendapat bahwa negara menghadapi lingkungan internasional yang tidak pasti, dimana memungkinkan bagi setiap negara menggunakan kekuatannya untuk menyerang negara lain. Negara dengan kekuatan besar cenderung memiliki kemampuan militer yang bersifat ofensif.⁴⁵

Menurut Dunne dan Schmidt, perbedaan mengenai tujuan yang bersifat defensif atau ofensif juga dapat dilihat dengan berdasarkan prinsip *security maximize* atau *power maximize*.⁴⁶ Bila suatu negara hanya memaksimalkan keamanannya (*security*) maka negara tersebut termasuk dalam defensif. Namun sebaliknya, jika sebuah negara memaksimalkan *power* seperti apa yang dikemukakan oleh Mearsheimer diatas tujuannya ialah untuk mencapai hegemoni dalam sistem internasional walaupun ada pihak yang menghalanginya.⁴⁷ Suatu negara memilih strategi defensif karena beberapa hal, diantaranya adanya

⁴² *Ibid.*

⁴³ Robert Gilpin. 1981. *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. dalam *ibid.* Hal.13

⁴⁴ Organski, and Kugler. 1980. *The War Ledger*. Chicago: University of Chicago Press. Hal.27-28 dalam *ibid.* Hal.14

⁴⁵ Mearsheimer, J. 2001 *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: WW. Norton dalam Griffiths, Martin (eds). *Op.Cit.* Hal.18

⁴⁶ Dunne, T. and Schmidt, B. 2001. *Realism* dalam Abubakar Eby Hara. *Op.Cit.*, Hal.49

⁴⁷ Liu Feng and Zhang Ruizhuang. "The Typologies of Realism". *Chinese Journal of International Politics*, Vol. 1, 2006, pp.109–134. Beijing: The Institute of International Studies, Tsinghua University Hal.127

anggapan bahwa kekuatan musuh lebih besar. Selain faktor kekuatan musuh, negara memilih strategi defensif karena hendak memanfaatkan kondisi geografisnya.⁴⁸

Dari pemaparan halaman sebelumnya penulis mendapatkan kesimpulan, jika dikaitkan dengan pendapat Charles Glaser pada paragraf diatas mengenai ancaman negara lain terhadap suatu negara dalam karya ilmiah ini, ancaman yang datang dari negara lain yang dihadapi Brasil adalah keberadaan militer Amerika Serikat dengan armada keempatnya (*US Fourth Fleet*) di Amerika Selatan. Apabila dilihat dari segi geografis, dengan luas area 8.511.965 kilometer persegi (3.286.488 mil persegi) dan garis pantai sepanjang 7.491 kilometer (4.655 mil) serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil⁴⁹ Brasil memanfaatkan kondisi geografis tersebut kedalam strategi pertahanannya. Berdasarkan pemaparan halaman sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan kapabilitas militer Brasil berdasarkan *Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil* tahun 2008 lebih kearah strategi yang bersifat defensif dan memaksimalkan keamanannya berdasarkan prinsip *security maximize*.

1.5.2 Decision Making Process : *Bureaucratic Model*

Penerapan model *Decision Making Process* bermula ketika era Perang Dingin terutama dalam kasus krisis misil Kuba. Kasus krisis misil Kuba terjadi pada era Presiden John F. Kennedy, di bulan Oktober tahun 1961. Pada masa itu sedang terjadi situasi memanasnya hubungan antar Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam Perang Dingin dimana pesawat mata-mata Amerika Serikat, U-2 menemukan sebuah pencitraan jarak jauh. Militer Amerika Serikat mengetahui Uni Soviet tengah memasukkan rudal jarak menengah (*Medium Range Ballistic Missile*) ke Kuba. Dalam kasus Krisis Misil Kuba tersebut, seorang ilmuwan politik yang bernama Graham T. Allison, dalam bukunya yang berjudul *The Essence of Decision Making Process* menyebutkan, bahwa di dalam kasus krisis misil kuba tersebut, terdapat tiga bentuk model analisa dalam upaya pencapaian

⁴⁸ Sayidiman Suryohadiprojo. *Op.Cit.*, Hal.121

⁴⁹ Nations Encyclopedia. 2013. "Brazil",

<http://www.nationsencyclopedia.com/geography/Afghanistan-to-Comoros/Brazil.html> (Diakses pada : 21 Juni 2014)

keputusan.⁵⁰ Ketiga bentuk model tersebut adalah: *Rational Actor Model*, *Organizational Model*, serta *Bureaucratic Model*.

Pada model *Bureaucratic Model*, proses pembuatan keputusan atau kebijakan luar negeri merupakan sebuah proses politik yang diperoleh dari adanya suatu hirarki dalam pemerintahan.⁵¹ Model ketiga ini menggambarkan bagaimana masing-masing individu berusaha untuk bertindak rasional. Setiap pengambil kebijakan, apakah itu seorang presiden, perdana menteri (PM), para menteri, lembaga legislatif dan pihak terkait lainnya akan berusaha menetapkan pilihannya melalui proses intelektual.⁵² Selain itu, model ini dinilai cukup baik dalam menghasilkan solusi yang akan diambil oleh pemangku kebijakan. Graham T. Allison mengemukakan bahwa di dalam pembuatan keputusan yang bersifat *beureauctic model* terdapat beberapa hal yang dijadikan fokus utama ketika kebijakan itu dibuat diantaranya *players in position* dan *perception and issues*.⁵³

Players in Position menjelaskan mengenai bagaimana seorang aktor, baik individu maupun kelompok berperan dalam membuat suatu kebijakan. Gagasan yang muncul dari individu maupun kelompok tadi kemudian dimodifikasi dengan gagasan yang lain sehingga ide tersebut dapat dipertahankan.⁵⁴ Individu menjadi aktor dalam pembuatan kebijakan keamanan nasional dengan memanfaatkan posisi pentingnya di pemerintahan. Salah satu pihak yang berperan aktif ketika pembentukan kebijakan dibuat ialah Kementerian Pertahanan.

Sedangkan *Perception and Issues* terkait mengenai batasan-batasan apa saja yang akan dibahas pada saat pembuatan kebijakan keamanan negara. Batasan-batasan tersebut diantaranya ialah menyangkut masalah isu aktual apa yang akan dibahas dan apa yang seharusnya dilakukan. Isu yang muncul di Brasil ialah mengenai masalah kedaulatan negara, terutama tentang bagaimana peran

⁵⁰ Abubakar Eby Hara. *Op.Cit.* Hal. 93-94

⁵¹ Jonathan Bendor and Thomas H. Hammond. "Rethinking Allison's Models". *The American Political Science Review*, Vol. 86, No. 2 (June 1992). pp. 301-322. Washington DC: American Political Science Association.

⁵² P.Anthonius Sitepu. *Op Cit.* Hal 97

⁵³ Graham T Allison. 1968. *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis : Rational Policy, Organizational Process, and Bureaucratic Politics*. California: The Rand Corporation . Hal.38

⁵⁴ Maurijke Breuning. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave Macmillan. Hal.90

negara melindungi kedaulatannya. Hal ini cukup beralasan, karena sebagai negara luas dari segi geografis Brasil seringkali menghadapi masalah yang menyangkut tentang kedaulatan. Isu keamanan tersebut kemudian menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda draf strategi pertahanan *Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil* tahun 2008.

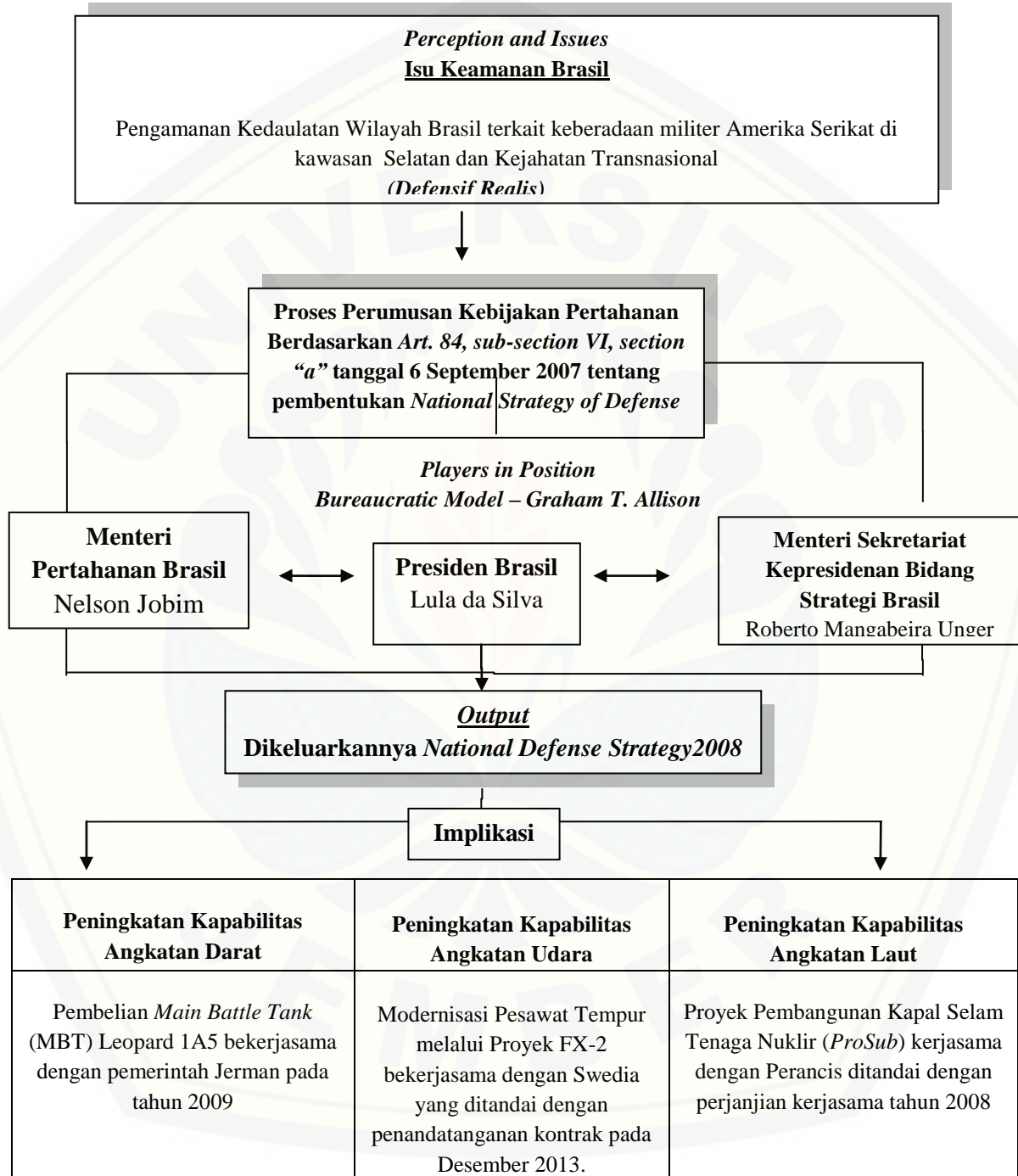
Dari pemaparan tersebut pada intinya model birokratik yang dikemukakan oleh Graham T. Allison melibatkan koalisi atau perpaduan antar aktor birokratik yang berbeda dalam situasi yang kompetitif.⁵⁵ Model birokratik juga menjelaskan tentang bagaimana peranan seorang individu pada posisi teratas dalam pemerintahan. Menurut Allison sebagaimana dikutip oleh Abubakar Eby Hara, model birokratik merupakan model yang paling baik. Tindakan suatu negara paling baik dipahami sebagai akibat dari adanya proses *politicking* dan negosiasi dari para pemimpin atas suatu negara. Dalam kasus ini berbagai aktor yang mewakili berbagai kepentingan terlibat dalam proses untuk mencapai keputusan yang sedang diperdebatkan menjadi kebijakan negara.⁵⁶ Dalam kasus Brasil tarik menarik kepentingan sangat terlihat dalam proses pembuatan kebijakan pertahanan negara, terlebih karena kebijakan pertahanan dan keamanan negara juga memiliki dampak yang lain seperti penjualan senjata, transfer teknologi, dan akuisisi. Hal tersebut dapat kita lihat terutama pada proyek FX-2, mengenai akuisisi pesawat tempur baru dan negara mitra dalam modernisasi Angkatan Udara Brasil (FAB). Pergulatan kepentingan tersebut melibatkan para birokrat, baik pada lembaga eksekutif (dalam hal ini presiden beserta kementerian terkait) dan pihak militer yang selanjutnya disebut dengan *players in position*. Sementara *perception and issues* adalah mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

Sebagai panduan kerangka analisis dalam karya tulis ini, penulis mencoba menggambarkan proses perumusan kebijakan *National Defense Strategy* 2008 oleh pemerintah Brasil dengan menggunakan pendekatan model birokratik sebagaimana dikemukakan Graham T. Allison seperti pada bagan 1.2 dihalaman

⁵⁵ Mark V. Kaupp & Paul R. Viotti. 1987. *International Relation Theory : Realism, Pluralism, Globalism*. New York: MacMillan Publishing Company. Hal. 203

⁵⁶ Abubakar Eby Hara. *Op. Cit.* Hal.97

selanjutnya. Selain itu, penulis menggunakan kerangka analisis model birokratis dalam pengambilan keputusan mengenai mitra dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan Brasil seperti proyek *ProSub* dan FX-2.



Gambar 1.2 : Proses Perumusan Mengenai Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil di Kawasan Amerika Selatan

(Sumber: Dari berbagai sumber data diolah)

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan permasalahan yang penulis ajukan dalam karya ilmiah ini, maka penulis berpendapat bahwa ada beberapa alasan yang mendasari Pemerintah Brasil melakukan peningkatan kapabilitas militernya. Peningkatan kapabilitas militer tersebut bertujuan untuk **menjaga kedaulatan negara Brasil, menghidupkan kembali industri pertahanan Brasil, sebagai respon terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan, dan sebagai sarana promosi militer Brasil di kawasan Amerika Selatan pada khususnya dan dunia internasional pada umumnya.**

1.7 Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian didalam karya ilmiah ini terbagi dua bagian, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisis data. Pada tahap pengumpulan data, merupakan teknik untuk mencari dan mengumpulkan data terkait permasalahan yang akan diteliti. Pencarian informasi dan data dilakukan dengan membaca sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan tema dan rumusan masalah yang diapaprkkan. Data dapat bersifat primer maupun sekunder, data primer adalah data yang diperoleh pada saat peneliti terjun langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder ialah informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber lain secara tidak langsung. Adapun teknik penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini sebagai berikut :

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik penelitian studi literature, penulis tidak terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek kajian. Pengumpulan data yang digunakan lebih difokuskan pada informasi yang berasal dari buku, dokumen, jurnal dan surat kabar. Selain itu, sebagai data pendukung penulis juga menggunakan data hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar, akademisi yang berhubungan dengan pembahasan karya ilmiah ini. Oleh karena itu tempat untuk mendapatkan data penelitian yang relevan, penulis dapat dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember

Sedangkan studi literatur, penulis dapat dari:

1. Media Internet
2. Jurnal
3. Surat Kabar

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam upaya menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Data kualitatif bersifat menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan suatu fenomena secara *riil* dan apa adanya.⁵⁷ Pada karya ilmiah ini data sekunder yang digunakan berasal dari ulasan berita media massa, pendapat dan penelitian para pengamat, ahli, akademisi, serta pejabat negara yang terkait di Brasil. Selain itu, penulis menggunakan data yang diperoleh dari publikasi jurnal dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Berdasarkan data-data tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang mengapa pemerintah Brasil meningkatkan kapabilitas militernya di kawasan Amerika Selatan selama kurun waktu tahun 2008 pada era Pemerintahan Presiden Lula da Silva hingga tahun 2013 saat Brasil dibawah kepemimpinan Presiden Dilma Rouseff.

⁵⁷ Kartono Kartini. 1990. *Metodologi Riset*. Bandung: CV.Mandar Maju. Hal.63

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab I membahas mengenai garis besar penelitian karya ilmiah. Garis besar penelitian tersebut ialah latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Militer Brasil dan Isu Keamanan di Kawasan Amerika Selatan

Bab II membahas mengenai gambaran umum Brasil dari segi geografis geografis, pemerintahan dan segi perekonomian serta menjelaskan tentang isu kawasan di Amerika Selatan. Selain itu, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai militer Brasil dan perbandingan kekuatan serta kapabilitas militer Brasil dengan negara-negara besar di kawasan Amerika Selatan.

BAB III : Landasan Strategis Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil

Bab III membahas tentang gambaran faktual Brasil dalam meningkatkan kapabilitas militernya pada matra darat, laut, dan udara. Selain itu, diulas mengenai pedoman kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Brasil yang tertuang dalam *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil 2008* dan Buku Putih Pertahanan Brasil tahun 2012.

BAB IV : Kebijakan Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil

Bab IV merupakan jawaban atas rumusan masalah pada karya ilmiah ini. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang alasan yang melatarbelakangi pemerintah Brasil meningkatkan kapabilitas militernya pasca penetapan kebijakan keamanan *National Defense Strategy* tahun 2008.

BAB V : Kesimpulan

Bab V merupakan bagian akhir dari karya ilmiah, pada bab ini disajikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan adanya bab kelima pembaca diharapkan akan memahami dengan jelas hasil analisis yang dituangkan karya ilmiah yang disusun oleh penulis.



BAB II

MILITER BRASIL DAN ISU KEAMANAN KAWASAN AMERIKA SELATAN

2.1 Gambaran Umum Brasil

Brasil merupakan salah satu negara besar dari segi geografis di kawasan Amerika Selatan dengan 26 negara bagian. Wilayah geografis Brasil terdiri atas lautan dan wilayah daratan yang mayoritas terdiri dari hutan tropis dan sungai besar. Luas area Brasil 8.511.965 kilometer persegi (3.286.488 mil persegi) dan garis pantai sepanjang 7.491 kilometer (4.655 mil) serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil.⁵⁸ Batas wilayah negara Brasil meliputi seluruh negara Amerika Selatan kecuali Chile dan Ekuador. Sebagian penduduk Brasil terdiri dari berbagai macam ras dan etnis. Berdasarkan data sensus tahun 2001 menunjukkan 54 % warga Brasil adalah Kulit Putih, etnis Mulato 39,9%, Kulit Hitam 5,4 %, Oriental (keturunan Asia) 0,5 % dan Masyarakat Asli atau *Indigenous People* (sebagian besar tinggal di pedalaman hutan Amazon) sebesar 0,2 %⁵⁹.

Dari segi pemerintahan, Brasil menganut sistem federal yang terdiri dari tiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai lembaga eksekutif dipilih secara langsung untuk masa jabatan empat tahun. Sedangkan kekuasaan legislatif terdiri dari dua cabang atau bikameral yakni Senat Federal (Majelis Tinggi) yang anggotanya berjumlah 81 orang dan dipilih dengan sistem proporsional untuk masa jabatan empat tahun. Selain Senat Federal, juga terdapat Kamar Deputi (*Chamber of Deputies*) atau Majelis Rendah berjumlah 513 orang yang dipilih secara langsung untuk masa jabatan delapan tahun. Untuk lembaga yudikatif terdiri atas Lembaga Pengadilan Tinggi Negara.⁶⁰

⁵⁸Nations Encyclopedia. 2013. "Brazil". *Loc. Cit*

⁵⁹ Celina Souza. 2005. *Federal Republic of Brazil*. dalam John Kincaid and G. Alan Tarr. 2005. *Constitutional Origins, Structure, and Change in Federal Countries*. Ontario: McGill-Queen's Press. Hal. 77

⁶⁰ Maya Samantha, et.al. 2014. "Brazilian Politics, Government, and Taxation". <http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Americas/Brazil-POLITICS-GOVERNMENT-AND-TAXATION.html> (Diakses pada : 30 September 2014)

Brasil juga termasuk salah satu negara yang maju dalam bidang perekonomian. Berdasarkan data dari Bank Dunia (*World Bank*) tahun 2012, Brasil menduduki posisi ketujuh negara penghasil ekonomi terbesar dunia dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) yakni sebesar 2.253 Triliun US\$⁶¹. Sementara, pendapatan per-kapita penduduk Brasil selama tahun 2012 tersebut mencapai angka sebesar sebesar 11.320 US\$⁶². Dalam dunia internasional khususnya segi ekonomi, Brasil tergabung dalam kumpulan negara ekonomi berkembang BRIC yang terdiri dari Brasil, Rusia, India dan Cina. Selain itu Brasil juga tergabung dalam G-20, *International Monetary Fund* (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Pendapatan utama ekonomi Brasil berasal dari hasil pertambangan, agrikultur, manufaktur, dan bidang teknologi.

2.2 Ancaman bagi Brasil dan Kawasan Amerika Selatan

Pasca era Perang Dingin ancaman terhadap negara tidak hanya yang bersifat konvensional, artinya negara saling berhadapan satu sama lain. Ancaman dapat bersifat non-konvensional yang hanya melibatkan individu-individu dan kelompok tertentu seperti terorisme, kejahatan transnasional perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia. Brasil dan negara kawasan Amerika Selatan lainnya yang memiliki wilayah geografis yang luas dan sumber daya yang melimpah juga memiliki ancaman bagi keamanan negara. Ancaman tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan kedaulatan nasional sehingga membuat pemerintah suatu negara meningkatkan kemannya. Ancaman bagi Brasil dan negara kawasan Amerika Selatan diantaranya:

⁶¹ S. Tamer Cavusgil and ilke Kardes, "Brazil: rapid Development, internationalization, and Middle Class Formation," *Revista Eletrônica de Negócios Internacionais* 8, no. 1 (2013): 1–16. dalam Harold Trikunus. 2014. *Brazil Rise: Seeking Influences on Global Governance*. Washington DC: The Brookings Institution. Hal. 12

⁶²World Bank . 2014. "GDP Per-Capita (Current US\$)".

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD> (Diakses pada: 27 Oktober 2014)

2.2.1 Terorisme

Secara singkat, terorisme dapat diartikan sebagai ancaman dengan menggunakan kekerasan dan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat untuk memperoleh perhatian publik. Sebagaimana dikemukakan Bruce Hoffman, tindakan teroris biasanya dirancang untuk mengemukakan sebuah pesan tertentu kepada masyarakat luas⁶³. Pasca peristiwa 11 September 2001 atau dikenal dengan peristiwa 9/11, terorisme menjadi isu yang mengemuka di berbagai kawasan. Terorisme dilakukan oleh kelompok bersenjata dan kelompok-kelompok kriminal lainnya di kawasan Amerika Selatan. Kelompok-kelompok tersebut beroperasi di sekitar wilayah perbatasan antara Brasil, Paraguay, dan Argentina atau yang dikenal dengan istilah *Tri Border Area* (TBA). Pemerintah Brasil mengakui pasca peristiwa 9/11 terdapat beberapa kelompok Islam yang berafiliasi dengan teroris di sekitar wilayah TBA⁶⁴. Selain kelompok tersebut terdapat pula gerilyawan Kolombia atau yang dikenal dengan Tentara Revolusioner Kolombia atau *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC). Gerilyawan Kolombia yang tergabung dalam FARC memasuki wilayah Brasil melalui pedalaman Amazon⁶⁵.

2.2.2 Kejahatan Transnasional

Tindak kejahatan yang berskala transnasional berbentuk *organized crime*, atau lebih dikenal dengan kejahatan yang terorganisir. Pelaku dari kejahatan tersebut juga dapat digolongkan kedalam kelompok transnasional yang terorganisir (*transnational organized groups*), organisasi transnasional (*transnational organizations*), dan jaringan internasional (*transnational networks*). Pada intinya kejahatan transnasional tidaklah melibatkan hanya satu aktor saja, melainkan banyak aktor dalam lingkup internasional antar negara. Kejahatan transnasional dipengaruhi juga oleh bagaimana organisasi atau pelaku

⁶³ Bruce Hoffman. 1998. *Inside Terrorism*. <http://www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html>. (Diakses pada : 07 Oktober 2014)

⁶⁴ Fujikawa. 2008. *Terrorism in Brazil*. <http://thebrazilbusiness.com/article/terrorism-in-brazil>. (Diakses pada : 07 Oktober 2014)

⁶⁵ Adriaan Alsema. 2010. *FARC Has Permanent Bases in Brazil*. <http://colombiareports.co/farc-has-permanent-bases-in-brazil/>. (Diakses pada : 07 Oktober 2014)

kejahatan mengembangkan jaringannya di negara lain (*foreign criminal networks*).⁶⁶ Maraknya aksi kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para kartel di Bolivia, Ekuador dan Meksiko membawa pengaruh buruk bagi Brasil dan kawasan Amerika Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya konsumsi kokain di Brasil, Brasil menempati urutan kedua konsumsi kokain tertinggi di dunia setelah Meksiko saat ini.⁶⁷ Selain mengedarkan obat-obatan terlarang di Brasil, para kartel juga melakukan tindak kejahatan transnasional lain seperti perdagangan manusia (*human trafficking*) dan perdagangan senjata api ilegal melalui jalur perbatasan negara. Peredaran senjata api ilegal di Brasil mencapai jumlah 4.400.000 dan menjadi masalah keamanan bagi pihak kepolisian dan militer Brasil⁶⁸.

Sementara dari segi kejahatan transnasional perdagangan manusia (*human trafficking*), Brasil merupakan negara yang dijadikan tujuan perdagangan tersebut. Tujuan perdagangan manusia di Brasil terdapat di wilayah Goias, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro dan Sao Paulo⁶⁹. Para pelaku perdagangan manusia selain kartel adalah kelompok teroris yang beroperasi di wilayah Brasil dan mereka membentuk jaringan internasional. Dengan semakin maraknya kelompok teroris dan aksi kejahatan transnasional di wilayah Brasil membuat Pemerintah Brasil berusaha mencegah terorisme dan kejahatan transnasional melalui berbagai macam cara, termasuk salah satunya dengan operasi militer di wilayah perbatasan. Pemerintah Brasil menilai hal tersebut sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan negara.

⁶⁶ Mohammad Irvan Olii. Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang *Transnational Crime*. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. I September 2005. pp : 14-27. Depok: Departemen Kriminologi – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia

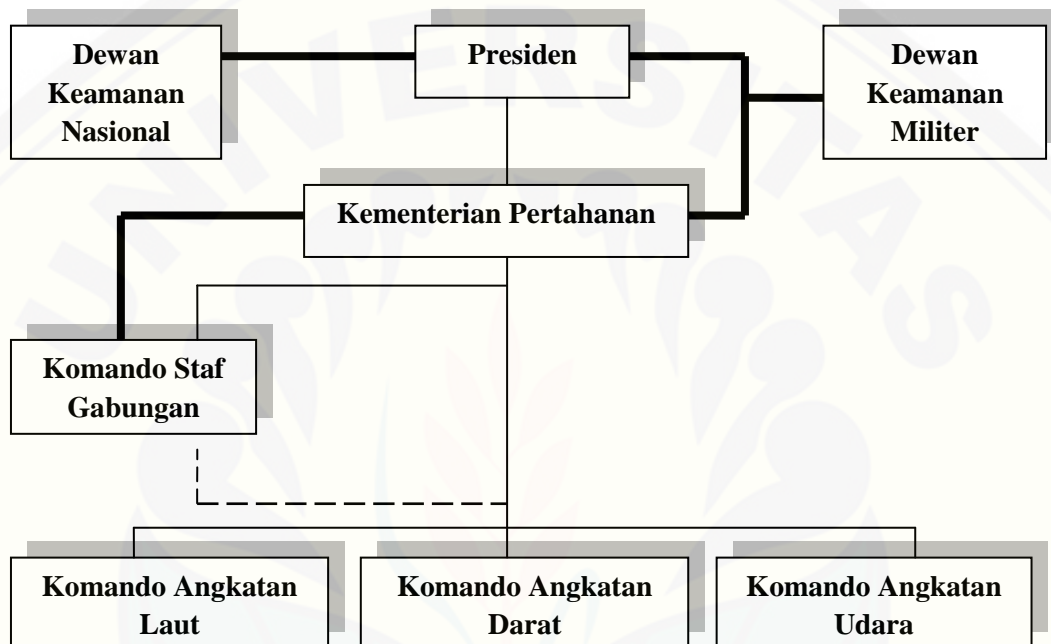
⁶⁷ Azzii. 2010. “Brasil o Segundo Maior Mercado Consumidor de Cocaine diz Unifes” <http://oglobo.globo.com/pais/brasil-o-segundo-maior-mercado-consumidor-de-cocaina-diz-unifesp-6004119> dalam Robert Diniz and Roberto Muggah. 2013. *Securing the Border: brazil's "South America First" Approach to Transnational Organized Crime (Strategic Paper 5 |October 2013)*. Rio de Janeiro: Igarape Institute. Hal.5

⁶⁸ Aaron Karp. 2009. *Surplus Arms in South America: A Survey*. Geneva: Graduate Institute of International and Development Studies. Hal.33

⁶⁹ UNODC. 2012. “Brazil to Document Cases of Humantrafficking in Public Global Database”. <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2012/brazil-to-document-cases-of-human-trafficking-in-public-global-database.html> (Diakses pada : 08 Oktober 2014)

2.3 Militer Brasil

Militer berfungsi sebagai garda terdepan pelaksana pertahanan negara apabila negara dalam keadaan perang. Pada saat damai, peran militer adalah sebagai penjaga kedaulatan dan kepentingan negara. Hal tersebut tercantum dalam Konstitusi Brasil 1988 Pasal 142.⁷⁰ Secara organisasional, sistem pertahanan dan militer Brasil dapat kita lihat pada Bagian 2.1 berikut:⁷¹



Gambar 2.1 Garis Komando Militer Brasil

Sumber: Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL.

Keterangan Garis	
—	: Garis Komando
- - -	: Penasehat dan bantuan hubungan fungsional
---	: Perencana bersama dan hubungan manajemen organisasi

⁷⁰Will Reichert. 2002. "Brazilian Constitution".

<http://web.mit.edu/12.000/www/m2006/teams/willr3/const.htm>. (Diakses pada : 09 Oktober 2014)

⁷¹ Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL). Hal.148

Berdasarkan pada Bagan 2.1, dalam melaksanakan tugas negara mengenai masalah pertahanan, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional yang terdiri dari Wakil Presiden, Ketua DPR dan Senat serta kementerian terkait. Kementerian tersebut diantaranya Kementerian Kehakiman, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ekonomi. Mengenai penggunaan sumber daya militer Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dewan Pertahanan Militer yang terdiri dari Komando Angkatan Bersenjata dan Ketua Kepala Staf Gabungan. Menteri Pertahanan memegang komando tertinggi Angkatan Bersenjata. Menteri menerima masukan dari Kepala Staf Gabungan yang bertanggung jawab atas perencanaan pelaksanaan tugas bersama Angkatan Bersenjata. Sementara Kongres memiliki kekuasaan berdasarkan Konstitusi dan secara permanen mengawasi isu-isu pertahanan dan keamanan.⁷²

Segi kuantitas dan kualitas adalah salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan pertahanan negara. Aspek pertahanan tersebut diantaranya adalah adanya anggaran pertahanan yang memadai. Anggaran pertahanan merupakan suatu proyeksi bagi sebuah negara untuk menentukan pembiayaan tahunan terhadap pertahanan negara. Data yang dirilis oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) menyebutkan anggaran militer Brasil dari tahun 2008 hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut:⁷³

⁷² Paz Tibbileti and Marcela Donadio. *Op Cit.* Hal.148

⁷³ SIPRI. 2014. "SIPRI Military Expenditures Database".

<http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/country-search>. (Diakses pada 09 Oktober 2014)

Tabel 2.1 Anggaran Pertahanan Brasil

Tahun	Anggaran Pertahanan (dalam satuan juta US\$)	Prosentase dari GDP
2008	24.453	1.5
2009	25.654	1.6
2010	34.007	1.6
2011	36.932	1.5
2012	33.988	1.5
2013	31.456	1.4

Sumber : SIPRI. 2014. "SIPRI Military Expenditures Database".
<http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/country-search>

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 diatas, anggaran pertahanan Brasil berada pada kisaran 1,5 persen atau kurang dari dua persen dari *Gross Domestic Product* (GDP). Angka tersebut masih relatif rendah dari segi kekuatan minimal yang dimiliki sebuah negara yakni sebesar dua persen dari GDP. Saat ini Brasil berada pada peringkat 68 dunia dalam hal presentase anggaran militer berdasarkan GDP. Militer Brasil juga masuk dalam jajaran 15 besar negara dengan anggaran militer terbesar di dunia tahun 2012.⁷⁴ Secara umum, militer Brasil terbagi dalam tiga matra yaitu matra Angkatan Darat, matra Angkatan Laut dan matra Angkatan Udara.

⁷⁴ Harold Trikunus. *Op Cit.* Hal.13

2.3.1 Angkatan Darat Brasil

Angkatan Darat Brasil atau *Exercito Brasileiro* (EB) salah satu komponen utama pertahanan Brasil. Motto dari Angkatan Darat Brasil adalah “*Braço Forte, Mão Amiga*” atau Lengan yang Kuat, Tangan yang Ramah.⁷⁵ Angkatan Darat Brasil (EB) memiliki tugas pokok untuk mengamankan kedaulatan Brasil terutama wilayah darat dan garis pantai sesuai dengan amanat Konstitusi 1988 pasal 142. Penjabaran dari tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut⁷⁶ :

- Berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan pertahanan sipil, sesuai dengan hukum yang berlaku (diperkuat dengan Undang-undang No.69, 23 Juli 1991)
- Berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dan menerapkan kebijakan nasional dalam bidang militer
- Bekerjasama dengan lembaga pemerintahan pusat dan daerah kecuali dengan perusahaan swasta dalam pelaksanaan suatu kegiatan
- Bekerja sama dengan organisasi-organisasi pemerintah federal bila diperlukan untuk menekan tindak kejahatan, menyediakan dukungan logistik, melaksanakan fungsi intelejen serta menjalankan komunikasi dan pelatihan
- Bertindak preventif maupun represif dalam menanggulangi kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan, baik secara individu (badan militer) maupun melalui kordinasi dengan cabang eksekutif lain.

Kekuatan personil (*man power*) Angkatan Darat Brasil saat ini (EB) saat ini berjumlah 204.744 personil. Sementara itu persebaran kekuatan militer khususnya Angkatan Darat Brasil (EB) terbagi dalam beberapa wilayah komando seperti yang terdapat pada Gambar 2.1 berikut⁷⁷:

⁷⁵ Fujikawa. 2008. “Brazilian Armed Forces”. <http://thebrazilbusiness.com/article/brazilian-armed-forces> (Diakses pada : 09 Oktober 2014)

⁷⁶ Paz Tibbileti and Marcela Donadio. *Op Cit.* Hal.152

⁷⁷ *Ibid.* Hal.153



Gambar 2.2 Pembagian Wilayah Komando Angkatan Darat Brasil

Sumber: Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL. Hal 153

Merujuk pada Gambar 2.1 tersebut mengenai pembagian wilayah komando Angkatan Darat Brasil (EB) dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Daftar Wilayah Komando Militer Angkatan Darat Brasil

No	Komando Militer	Wilayah	Persentase Kekuatan Darat Nasional
1	<i>Commando Militar do Leste</i>	Rio de Janeiro	23.34 %
2	<i>Commando Militar do Sul</i>	Porto Alegre	25.39 %
3	<i>Commando Militar da Amazônia</i>	Manaus	12.04 %
4	<i>Commando Militar do Nordeste</i>	Recife	11.81 %
5	<i>Commando Militar da Planalto</i>	Brasilia	11.01 %
6	<i>Commando Militar do Sudeste</i>	Sao Paulo	9.05 %
7	<i>Commando Militar do Oeste</i>	Campo Grande	6.07 %
Total Kekuatan Darat Nasional Brasil			100.00 %

Sumber: Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL. Hal 153

Berdasarkan Tabel 2.2 pada halaman sebelumnya, wilayah komando militer Brasil membawahi 12 komando regional yang mana setiap komando militer bertanggung jawab terhadap satu atau lebih regional militernya. *Commando Militar do Leste* membawahi komando regional pertama dan keempat yang meliputi wilayah Rio de Janeiro dan Minas Gerais. *Commando Militar do Sul* membawahi komando regional ketiga dan komando regional kelima yang meliputi Rio Grande do Sul, Parana dan Santa Catarina. *Commando Militar da Amazônia* membawahi komando regional keduabelas yang meliputi wilayah Amazonas, Acre, Roraima dan Rondonia. *Commando Militar do Nordeste* membawahi komando regional keenam, ketujuh dan kesepuluh meliputi wilayah Salvador, Recife dan Fortaleza. *Commando Militar da Planalto* membawahi komando regional kesebelas meliputi wilayah Goiás dan Tocantins. *Commando Militar do Sudeste* membawahi komando regional kedua meliputi wilayah Sao Paulo. Sementara *Commando Militar do Oeste* membawahi komando regional kesembilan meliputi wilayah Mato Grosso dan Mato Grosso do Sul.

2.3.2 Angkatan Laut Brasil

Komponen selanjutnya dari pertahanan Brasil adalah Angkatan Laut Brasil atau *Marinha do Brasil* (MB). Angkatan Laut Brasil (MB) terbentuk pada era kemerdekaan di bawah pemerintahan Raja Dom Pedro I tahun 1822. Kiprah Angkatan Laut Brasil (MB) terus meningkat terutama di era Perang Dunia. Pada tahun 1917 Brasil menyatakan perang dengan Jerman bersama tujuh negara Amerika Selatan lainnya⁷⁸. Motto Angkatan Laut Brasil adalah “*Protegero Nossas Riquezas, Cuidando da Nossa Gente*” atau Melindungi Kekayaan Kami dan Memelihara Rakyat Kami. Tugas pokok dari Angkatan Laut Brasil (MB) adalah seperti yang tercantum dalam Konstitusi Brasil tahun 1988 pasal 142. Penjabaran tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁸ Walton L. Robinson. 2014. “The Brazilian Navy in The World War”. <http://www.usni.org/magazines/proceedings/1936-12/brazilian-navy-world-war> (Diakses pada: 11 Oktober 2014)

⁷⁹ Tibbileti, Paz and Marcela Donadio. *Op Cit.* Hal. 153

- Melaksanakan kegiatan kelautan, dalam kaitannya dengan pertahanan nasional
- Menjaga keamanan dan melindungi wilayah perairan Brasil
- Berkontribusi dalam pembuatan kebijakan serta melaksanakan kebijakan nasional mengenai kawasan perairan
- Melaksanakan dan mengawasi hukum perairan nasional Brasil berkoordinasi dengan lembaga eksekutif pusat dan negara bagian apabila diperlukan
- Bekerjasama dengan lembaga negara lain dalam menekan tindakan kejahatan yang berdampak terhadap keamanan nasional dan internasional di wilayah perairan
- Melaksanakan fungsi komunikasi dan intelijen

Kekuatan personil (*man power*) Angkatan Laut Brasil (MB) saat ini berjumlah 65.528 personil. Sementara itu, persebaran kekuatan Angkatan Laut Brasil (MB) terbagi dalam beberapa wilayah komando distrik seperti yang terdapat pada Gambar 2.2 berikut:⁸⁰



Gambar 2.3 Pembagian Wilayah Komando Distrik Angkatan Laut Brasil
Sumber: Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL. Hal 153

⁸⁰ *Ibid.*

Merujuk pada Gambar 2.2 tersebut mengenai pembagian wilayah komando Angkatan Laut Brasil (MB) dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Daftar Wilayah Komando Militer Angkatan Laut Brasil

No	Komando Militer	Wilayah	Persentase Kekuatan Laut Nasional
1	<i>1st Naval District</i>	Rio de Janeiro	73.97 %
2	<i>2nd Naval District</i>	Salvador	3.33 %
3	<i>3rd Naval District</i>	Natal	3.47 %
4	<i>4th Naval District</i>	Belem	4.05 %
5	<i>5th Naval District</i>	Rio Grande	3.23 %
6	<i>6th Naval District</i>	Ladario	2.66 %
7	<i>7th Naval District</i>	Brasilia	4.37 %
8	<i>8th Naval District</i>	Sao Paulo	1.05 %
9	<i>9th Naval District</i>	Manaus	3.76 %
Total Kekuatan Laut Nasional Brasil			100.00 %

Sumber: Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL. Hal 153

Selain komando distrik pada Tabel 2.3 diatas, pangkalan Angkatan Laut Brasil tersebar di berbagai wilayah di Brasil seperti Rio de Janeiro yang merupakan pangkalan satuan marinir dan Markas Besar Angkatan Laut Brasil. Mato Graso do Sul merupakan pangkalan Angkatan Laut yang dilengkapi dengan satuan aviasi atau penerbangan AngkatanLaut. Sementara di wilayah Bahia, Rio Grande de Norte, Para, Amazonas,dan Rio Grande do Sul merupakan wilayah pangkalan Angkatan Laut reguler.

2.3.3 Angkatan Udara Brasil

Matra ketiga dari Angkatan Bersenjata Brasil adalah Angkatan Udara Brasil atau *Forca Aerea Brasileira* (FAB). Angkatan Udara Brasil (FAB) didirikan pada tahun 1941 dan merupakan Angkatan Udara terbesar di Amerika Selatan.⁸¹ Angkatan Udara Brasil (FAB) memiliki motto *Asas Que Protegem O Pais* yang berarti Sayap yang Melindungi Negara. Selama era Perang Dunia II, Angkatan Udara Brasil (FAB) bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat dalam peperangan di Eropa pada tahun 1944 di Italia hingga Jerman menyerah di tahun 1945⁸². Seperti halnya Angkatan Bersenjata Brasil, tugas pokok dari Angkatan Udara Brasil (FAB) adalah menjaga kedaulatan wilayah Brasil sesuai dengan amanat Konstitusi 1988. Penjabaran dari tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut⁸³:

- Sebagai pemandu dalam mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan penerbangan Sipil
- Melaksanakan dan menjamin kewanamanan navigasi udara
- Berkontribusi dalam membuat kebijakan nasional mengenai navigasi udara serta melaksanakan kebijakan tersebut
- Membantu dalam pengoperasian, penetapan wilayah penerbangan dan infrastruktur bandara baik secara langsung maupun melalui operator bandara
- Bekerjasama dengan lembaga federal lain dalam menanggulangi kejahatan yang berdampak nasional dan internasional di wilayah udara dan wilayah bandara.
- Memberikan informasi intelijen dan melaksanakan pelatihan terkait pertahanan udara
- Mengoperasikan surat udara nasional (*air mail*)

⁸¹ Global Security. 2013. "Brazilian Air Force".

<http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/airforce.htm> (Diakses pada: 13 Oktober 2014)

⁸²Rudnei Diaz da Cunha. 2014. "The FAB and the Second World War".

<http://www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/en/> (Diakses pada: 13 Oktober 2014)

⁸³ Tibbileti, Paz and Marcela Donadio. *Op Cit.* Hal. 153

- Mengawasi wilayah udara Brasil dan menanggulangi segala bentuk lalu lintas udara ilegal terutama mengenai penyelundupan obat-obatan terlarang, senjata api dan amunisi. Serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menurunkan secara paksa pesawat yang terlibat dalam lalu lintas udara ilegal

Kekuatan personil (*man power*) Angkatan Udara Brasil (FAB) saat ini berjumlah 69.093 personil. Sementara itu persebaran kekuatan Angkatan Udara Brasil (FAB) terbagi dalam beberapa wilayah komando udara regional seperti yang terdapat pada Gambar 2.3 berikut:⁸⁴



Gambar 2.4 Pembagian Wilayah Komando Regional Angkatan Udara Brasil

Sumber: Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL.

Hal 153

Merujuk pada Gambar 2.3 tersebut mengenai pembagian wilayah komando regional Angkatan Udara Brasil (FAB) dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

⁸⁴ *Ibid.*

Tabel 2.4 Daftar Wilayah Komando Regional Militer Angkatan Udara Brasil

No	Komando Regional	Wilayah	Persentase Kekuatan Udara Nasional
1	<i>I Regional Air Command</i>	Manaus	5.88 %
2	<i>II Regional Air Command</i>	Natal	13.16 %
3	<i>III Regional Air Command</i>	Rio de Janeiro	32.27 %
4	<i>IV Regional Air Command</i>	Sao Paulo	17.47 %
5	<i>V Regional Air Command</i>	Santa Catarina	10.02 %
6	<i>VI Regional Air Command</i>	Campo Grande	12.29 %
7	<i>VII Regional Air Command</i>	Amazonas	8.28 %
Total Kekuatan Udara Nasional Brasil			100.00 %

Sumber: Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL.

Hal 153

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, empat komando regional memiliki tugas dan fungsi sebagai komando operasional Angkatan Udara Brasil (FAB). Keempat komando udara regional tersebut adalah *I Regional Air Command*, *II Regional Air Command*, *III Regional Air Command* dan *V Regional Air Command*. *I Regional Air Command* memiliki tugas dan fungsi sebagai memberikan instruksi dan melakukan pengawasan terhadap pesawat Angkatan Udara. *II Regional Air Command* memiliki tugas dan fungsi sebagai komando patroli kelautan, fungsi SAR, transportasi helikopter dan sebagai satuan pendukung serta bantuan bagi Angkatan Laut. *III Regional Air Command* memiliki tugas dan fungsi sebagai komando satuan tempur, melakukan misi pengintaian dan serangan terhadap

pesawat musuh. *V Regional Air Command* memiliki tanggung jawab sebagai satuan komando yang menjalankan fungsi penyedia transportasi militer.⁸⁵

2.4 Perbandingan Kapabilitas Militer Brasil dengan Negara-negara Kawasan Amerika Selatan

Perkembangan yang terjadi di Kawasan Amerika Selatan dalam konteks pembangunan kapabilitas militer cenderung mengindikasikan bahwa kawasan Amerika Selatan bukan pengecualian dari karakteristik dari sistem internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh pemikiran realis, sistem internasional adalah sebuah anarki. Kecenderungan modernisasi dan pembangunan kapabilitas militer negara-negara Amerika Selatan menunjukkan bahwa perasaan tidak aman masih menjadi persepsi sebagian besar negara kawasan. Pada sub-bab ini, penulis menguraikan perbandingan kapabilitas militer negara-negara kawasan Amerika Selatan dari segi matra darat, matra laut dan matra udara.

2.4.1 Perbandingan Kapabilitas Militer Brasil dengan Negara Kawasan Amerika Selatan di Matra Pertahanan Darat

Pada segi perbandingan kapabilitas militer Brasil di matra darat dengan negara kawasan Amerika Selatan, penulis memfokuskan objek perbandingan dari segi peralatan tempur terutama kendaraan tempur yang dimiliki angkatan bersenjata. Kendaraan tempur tersebut diantaranya adalah tank, baik tank tempur utama atau *Main Battle Tank* (MBT) dan tank tempur ringan atau *Lights Tank*. Aspek perbandingan pertahanan darat selanjutnya adalah kendaraan tempur yang dilengkapi sistem persenjataan ringan atau *Armored Fighting Vehicle*. Selain kendaraan tempur, aspek yang diperlukan dalam pertahanan darat adalah peluncur roket dengan sistem terpadu yang dikenal dengan *Multi Launch Rocket System* (MLRS). MLRS mampu meluncurkan rudal atau roket lebih dari satu dengan waktu kurang dari satu menit dengan jarak jangkauan 15 hingga 45 kilometer⁸⁶.

⁸⁵ Leonardo Maldonado. 2013. "Brazilian Air Force".

<http://www.milavia.net/airforces/brazil/fab.htm> (Diakses pada: 22 Oktober 2014)

⁸⁶ Army Technology. 2014. "Multi Launch Rocket System (MLRS), United States of America".

<http://www.army-technology.com/projects/mlrs/> (Diakses pada: 16 Oktober 2014)

Penggunaan meriam tempur mulai dikembangkan sejak perang Napoleon di Eropa dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan di era Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Tabel 2.5 berikut menunjukkan perbandingan kapabilitas militer Brasil di segi matra darat dengan negara kawasan Amerika Selatan lainnya selama tahun 2013.

Tabel 2.5 Kapabilitas Militer Komparatif Matra Pertahanan Darat Negara-negara Amerika Selatan tahun 2013

Negara	Tank	MLRS	AFV	Towed Artillery	Total Persenjataan Darat
Argentina	239	35	1.008	289	1.571
Bolivia	54	-	211	86	351
Brasil	489	210	1.332	539	2.570
Chile	305	16	-	-	321
Ekuador	202	18	262	102	584
Kolombia	-	-	1.186	-	1.186
Paraguay	15	-	63	50	128
Peru	85	70	890	243	1.288
Uruguay	79	-	474	64	617
Venezuela	390	89	706	104	1.289

Sumber : Global Fire Power. 2013. "Land System".

<http://www.globalfirepower.com>

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa, dari segi matra pertahanan darat Angkatan Darat Brasil (EB) memiliki kapabilitas khususnya *tank* yang lebih besar bila dibandingkan dengan negara kawasan lainnya. Kemudian disusul dengan Venezuela, Chile, Ekuador, Argentina dan Peru. Sementara dari segi MLRS,

Brasil mendominasi dari segi kapabilitas disusul dengan Argentina. Salah satu hal yang menarik disini adalah, walaupun Kolombia tidak memiliki kekuatan utama seperti tank, MLRS, AFV, dan *Towed Artillery* tetapi disisi lain, Kolombia lebih unggul dari jumlah *Armored Fighting Vehicle* (AFV) setelah Brasil. Kapabilitas *Towed artillery* yang dimiliki Angkatan Darat Brasil (EB) menunjukkan bahwa militer Brasil lebih unggul dalam pertahanan darat. Jika diakumulasikan dari kekuatan darat keseluruhan, militer Brasil adalah yang lebih unggul di kawasan Amerika Selatan dengan total persenjataan berjumlah 2.570, disusul Argentina kemudian Venezuela, Peru, dan Kolombia.

2.4.2 Perbandingan Kapabilitas Militer Brasil dengan Negara Kawasan Amerika Selatan di Matra Pertahanan Laut

Pada perbandingan kapabilitas militer antara Brasil dengan negara kawasan Amerika Selatan, khususnya matra laut penulis memfokuskan pada kekuatan yang dimiliki sebuah negara dari segi kapal tempur. Kapal tempur disini diantaranya adalah kapal selam (*submarine*), kapal tempur jenis frigat (*frigate*), kapal tempur jenis korvet (*corvette*) dan kapal tempur jenis *destroyer*. Pada era modern seperti saat ini, *frigate* digunakan untuk mengawal armada tempur seperti kapal induk. *Frigate* dilengkapi dengan sistem persenjataan yang memadai seperti rudal dan torpedo serta sistem sensor untuk mendeteksi ancaman, seperti ancaman dari armada kapal selam⁸⁷.

Sementara kapal tempur jenis *corvette*, memiliki fungsi hampir sama dengan *frigate* namun perbedaannya adalah *corvette* berukuran lebih kecil dan dilengkapi persenjataan ringan. Angkatan laut di berbagai negara biasanya menggunakan *corvette* sebagai kapal patroli disepanjang garis pantai.⁸⁸ Kapal tempur jenis *destroyer* memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan wilayah darat, laut dan udara sekaligus. Selain itu, kapal jenis ini memiliki

⁸⁷ Tyrone G Martin. 2014. "What Is a Frigate". <http://www.usconstitutionmuseum.org/constitution-resources/the-captain-speaks/what-is-a-frigate/> (Diakses pada: 18 Oktober 2014)

⁸⁸ Global Security. 2014. "Worldwide Frigates and Corvettes". <http://www.globalsecurity.org/military/world/frigates.htm> (Diakses pada: 18 Oktober 2014)

kemampuan untuk menangkal ancaman dari kapal selam. Destroyer dilengkapi dengan persenjataan berat, seperti rudal serta senjata berdiameter besar dan berdiameter kecil.⁸⁹ Tabel 2.6 berikut menunjukkan perbandingan kapabilitas militer Brasil di segi matra laut dengan negara kawasan Amerika Selatan lainnya selama tahun 2013.

Tabel 2.6 Kapabilitas Militer Komparatif Matra Pertahanan Laut Negara-negara Amerika Selatan tahun 2013

Negara	Kapal Selam	<i>Frigate</i>	<i>Corvette</i>	<i>Destroyer</i>	Total Persenjataan Laut
Argentina	3	-	9	4	16
Bolivia	-	-	-	-	-
Brasil	5	10	5	-	20
Chile	4	8	-	-	12
Ekuador	2	4	6	-	12
Kolombia	11	4	-	-	15
Paraguay	-	-	-	-	-
Peru	8	8	6	-	22
Uruguay	-	2	-	-	2
Venezuela	-	6	4	-	10

Sumber : Global Fire Power. 2013. "Naval Power".
<http://www.globalfirepower.com>

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa dari segi pertahanan matra laut khususnya kapal selam, Kolombia dan Peru adalah dua negara di kawasan Amerika Selatan yang memiliki kapabilitas kapal selam lebih unggul. Sedangkan

⁸⁹ Michael Bame. 2014. "Types of Navy Ships". <http://defense.about.com/od/weaponry/a/Types-Of-Navy-Ships.htm> (Diakses pada: 18 Oktober 2014)

dari kapabilitas kapal tempur *frigate*, Brasil memiliki kapabilitas lebih unggul dibanding negara kawasan lainnya. Pada segi kapabilitas angkatan laut, khususnya kapal tempur *corvette* Argentina memiliki kapabilitas yang lebih unggul disusul kemudian Ekuador dan Peru. Apabila diakumulasikan secara keseluruhan dari segi kapabilitas pertahanan matra laut, Peru merupakan negara di Amerika Selatan yang memiliki armada pertahanan laut yang cukup unggul dengan total persenjataan berjumlah 22 armada. Kemudian di urutan kedua adalah Brasil, sebanyak 20 buah dan ketiga adalah Argentina dengan 16 armada serta Kolombia di urutan keempat dengan 15 armada.

2.4.3 Perbandingan Kapabilitas Militer Brasil dengan Negara Kawasan Amerika Selatan di Matra Pertahanan Udara

Pada perbandingan kapabilitas militer antara Brasil dengan negara kawasan Amerika Selatan lainnya dari segi matra pertahanan udara, penulis memfokuskan pada pesawat tempur dan helikopter yang dimiliki oleh Angkatan Udara. Dari segi pesawat tempur antara lain jenis *fighters aircraft* dan jenis *attack fighters* serta pesawat angkut militer atau *transport aircraft*. Pada dasarnya *fighters aircraft* dan *attack aircraft* hampir memiliki kesamaan, keduanya merupakan kategori pesawat tempur. Namun disisi lain, kedua negara memiliki perbedaan, *fighters aircraft* dirancang untuk serangan dari udara ke udara (*air to air attack*) dan pertempuran udara sementara *attack aircraft* dirancang untuk melakukan serangan dari udara ke darat (*air to ground attack*)⁹⁰. Sementara dari segi helikopter, yang digunakan adalah jenis *attack helicopter* atau helikopter serbu. Helikopter serbu (*attack helicopter*) dilengkapi dengan senapan mesin, roket, dan misil untuk melakukan serangan di darat dari udara. Helikopter serbu (*attack helicopter*) memiliki dua peranan utama, *pertama* sebagai bantuan serangan udara bagi pasukan darat, *kedua* untuk menghancurkan konsentrasi

⁹⁰ Handi Fueller. 2014. "Overview: The Types of Aircraft", <http://fas.org/spp/aircraft/part02.htm> (Diakses pada: 19 Oktober 2104)

persenjataan darat musuh (*anti-tank role*)⁹¹. Tabel 2.7 menunjukkan perbandingan kapabilitas militer Brasil di segi matra pertahanan udara dengan negara kawasan Amerika Selatan lainnya selama tahun 2013.

Tabel 2.7 Kapabilitas Militer Komparatif Matra Pertahanan Udara Negara-negara Amerika Selatan tahun 2013

Negara	<i>Fighters Aircraft</i>	<i>Attack Aircraft</i>	<i>Attack Helicopters</i>	<i>Transport Aircraft</i>	Total Persenjataan Udara
Argentina	52	62	-	100	214
Bolivia	-	-	-	30	30
Brasil	54	80	9	292	435
Chile	43	62	-	105	210
Ekuador	20	20	-	59	99
Kolombia	19	155	-	307	481
Paraguay	-	-	-	19	19
Peru	43	85	16	79	223
Uruguay	-	10	-	22	32
Venezuela	42	39	10	101	192

Sumber : Global Fire Power. 2013. "Air Power".
<http://www.globalfirepower.com>

Tabel 2.7 diatas menunjukkan bahwa dari segi kapabilitas militer khususnya pertahanan matra udara, Brasil memiliki keunggulan dalam kapabilitas pesawat tempur jenis *Fighters Aircraft*. Kemudian disusul dengan Argentina,

⁹¹ Barnhardt Loop. 2014. "Military Helicopters Defined",
<http://www.usmilitaryhelicopters.org/military-helicopters-defined> (Diakses pada: 19 Oktober 2104)

Chile, Peru, dan Venezuela. Peru memiliki keunggulan kapabilitas pertahanan matra udara dari segi *Attack Helicopters*. Sementara dari segi *Attack Aircraft* dan *Transport Aircraft* serta jika diakumulasi kekuatan pertahanan matra udara secara keseluruhan, Kolombia lebih unggul dibandingkan dengan negara kawasan Amerika Selatan lainnya dengan jumlah persenjataan udara sebanyak 481. Urutan kedua adalah Brasil dengan total persenjataan sebanyak 435, kemudian Peru ditempat ketiga dengan total persenjataan sebanyak 223 dan Argentina di urutan keempat dengan jumlah total persenjataan udara 214. Tabel 2.7 juga menunjukkan bahwa keberadaan *Transport Aircraft* merupakan sarana yang penting bagi militer negara Amerika Selatan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa seluruh negara di kawasan Amerika Selatan memiliki pesawat militer jenis *Transport Aircraft*. Keberadaan pesawat tempur jenis *Transport Aircraft* menjadi penting karena selain untuk fungsi sebagai pengangkut peralatan militer dan personil, juga berfungsi sebagai sarana yang digunakan dalam tujuan non-perang seperti pengangkut logistik pada saat terjadi bencana alam dan sebagainya⁹².

2.4.4 Perbandingan Kapabilitas Militer Brasil dengan Negara

Kawasan Amerika Selatan dari Segi Kekuatan Personil

Selain dari segi persenjataan, salah satu unsur penting dalam perbandingan kapabilitas militer suatu negara adalah kekuatan personil (*man power*). Kekuatan personil adalah jumlah anggota militer aktif di suatu negara dari matra Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Betapapun pentingnya aspek material bagi kekuatan pertahanan, yang lebih menentukan bagi efektivitas pertahanan adalah aspek personil. Mengenai kekuatan personil, masing-masing negara memiliki asumsi yang berbeda. Ada yang mengasumsikan bahwa kekuatan personil yang besar tidak perlu ada setiap saat, melainkan hanya pada waktu negara memerlukan karena diserang oleh negara lain⁹³. Namun ada pula yang beranggapan bahwa kekuatan personil merupakan hal yang perlu disaat damai maupun saat perang. Tabel 2.8 berikut menunjukkan perbandingan kapabilitas

⁹² Pemimpin Redaksi. 2014. "Pesawat Angkut Militer Makin Diminati". *Angkasa*. Edisi Koleksi No.90. Hal.44

⁹³ Sayidiman Suryohadiprojo. *Op.Cit.* Hal.221

militer di negara kawasan Amerika Selatan dari segi jumlah kekuatan personil militer (*man power*).

Tabel 2.8 Kapabilitas Militer Komparatif dari Segi Personil Negara Kawasan Amerika Selatan tahun 2012

Negara	Angkatan Darat	Angkatan Laut	Angkatan Udara	Jumlah Total Kekuatan Personil
Argentina	42.803	19.064	12.757	74.624
Bolivia	28.870	5.578	5.972	40.330
Brasil	204.744	65.528	69.093	339.365
Chile	25.819	17.785	7.321	50.925
Ekuador	23.704	8.357	6.203	38.264
Kolombia	223.721	35.086	15.435	274.543
Paraguay	4.553	1.813	1.552	7.918
Peru	?	?	?	106.034
Uruguay	15.436	4.235	2.683	22.372
Venezuela	?	?	?	113.558

Sumber: Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL. Hal.152 data diolah

Berdasarkan Tabel 2.8 mayoritas negara-negara di kawasan Amerika Selatan menitikberatkan pada kekuatan pertahanan darat dari segi kekuatan personil. Dari segi kapabilitas kekuatan personil (*man power*), militer Brasil menempati urutan pertama dengan jumlah total personil militer aktif berjumlah 339.365 orang. Kolombia menempati urutan kedua dengan jumlah personil aktif berjumlah 274.543 orang. Pada urutan ketiga adalah Venezuela dengan jumlah personil aktif 113.558 orang. Peru menempati urutan keempat dengan jumlah personil aktif berjumlah 106.034. Venezuela dan Peru pada tahun 2012 seperti

yang ada pada Tabel 2.8 diatas tidak mempublikasikan jumlah personil militer aktif secara rinci. Kedua negara tersebut hanya mempublikasikan dari segi jumlah kekuatan personil secara keseluruhan. Mengenai publikasi jumlah personil militer aktif, setiap negara memiliki persepsi yang berbeda tergantung dari pemerintahan dan tingkat keterbukaan di negara tersebut. Rendahnya tingkat keterbukaan dan kebebasan pers di Venezuela menjadi salah satu faktor negara ini tidak dapat mempublikasikan rincian mengenai data-data negara yang bersifat vital, salah satunya adalah data militer.⁹⁴ Pada sisi lain, jumlah personil Paraguay pada Tabel 2.8 diatas menunjukkan angka yang relatif sedikit namun Paraguay memiliki personil militer cadangan dengan jumlah 2.263 personil.⁹⁵

Dengan membandingkan komparasi persenjataan militer kawasan Amerika Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara di kawasan Amerika Selatan memiliki keunggulan kapabilitas militer pada matra tertentu. Contoh dari tabel perbandingan kapabilitas militer pada halaman sebelumnya adalah Paraguay dan Bolivia, dari segi pertahanan matra laut Paraguay dan Kolombia kurang memiliki kapabilitas yang mumpuni. Tetapi disisi lain, Paraguay dan Bolivia lebih menitikberatkan pada kapabilitas pertahanan matra darat dan matra udara. Hal serupa juga terjadi pada Kolombia, dari segi pertahanan darat Kolombia terlihat kurang unggul dibanding negara kawasan Amerika Selatan lainnya. Tetapi dari segi kapabilitas pertahanan matra laut dan matra udara, Kolombia cukup unggul. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keunggulan kapabilitas militer negara-negara Amerika Selatan. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah dari segi geografis, tingkat ancaman, jumlah penduduk, hingga pada faktor besar *Gross National Product* (GNP) suatu negara. Semakin tinggi *Gross National Product* (GNP) suatu negara, semakin tinggi pula kemampuannya untuk menciptakan kekuatan militer terutama dalam jangka panjang.⁹⁶

⁹⁴ Hernan Alberro. 2008. *Press Freedom and Economic Development in Latin America 2008*. Montevideo: CADAL. Hal.05

⁹⁵ Paz Tibbileti and Marcela Donadio. *Op Cit*. Hal. 244

⁹⁶ William D. Coplin. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis: Edisi Kedua* (terj. Marsedes Marbun). Bandung: Sinar Baru Algesindo. Hal.126

BAB III

LANDASAN STRATEGIS PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER BRASIL

3.1 Pedoman Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Brasil

Pada era pasca Perang Dingin yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat disisi lain juga menyebabkan ancaman baru terhadap negara. Ancaman tersebut lebih kompleks apabila dibandingkan pada masa era Perang Dingin, yaitu selain meliputi ancaman militer dari segi dimensi militer juga meliputi dimensi non-militer seperti terorisme dan kejahatan transnasional. Baik ancaman yang berasal dari segi dimensi militer maupun dimensi non-militer akan berdampak pada stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu setiap negara perlu memiliki sebuah rumusan atau formulasi terkait kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.

Perumusan dari suatu sistem pertahanan dan keamanan menjadi penting dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan alam, rakyat, serta kedaulatan suatu negara. Kebijakan pertahanan dan keamanan negara pada umumnya tertuang dalam sebuah format yang disebut dengan Buku Putih atau *White Paper* serta format lain seperti Undang-undang. Pada konteks Brasil dalam karya ilmiah ini, terdapat dua format utama yang dijadikan pedoman pemerintah Brasil dalam membuat kebijakan pertahanan nasional yakni Buku Putih atau *White Paper* yang diterbitkan tahun 2012 serta dokumen strategi pertahanan nasional atau *National Defense Strategy* yang diterbitkan tahun 2008.

3.1.1 Dokumen *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil 2008*

Draft strategi kebijakan pertahanan dan keamanan Brasil diterbitkan pada 18 Desember 2008 dengan judul *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil*. Proses perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan dalam draft *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil* diawali dengan keputusan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva tanggal 6 September 2007 dengan

mengacu pada Konstitusi Brasil pasal 84. Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Menteri yang mengawasi jalannya perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan, sebagai ketua komite adalah Nelson Jobim yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan berkoordinasi dengan Menteri Urusan Strategi Roberto Mangaberia Unger. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Menteri berkoordinasi dengan pihak angkatan bersenjata Brasil (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) serta dengan kelompok sipil lainnya.⁹⁷

Dalam dokumen *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil*, terdapat tiga sektor utama agenda strategi pertahanan dan keamanan Brasil. Ketiga sektor tersebut meliputi bidang kedirgantaraan (*space*), *cybernetic*, dan program nuklir (*nuclear*). Mengenai sektor kedirgantaraan (*space*) fokus utama agenda meliputi produksi sarana peluncuran satelit untuk komunikasi baik sipil maupun militer. Selain itu, dibidang kedirgantaraan, juga terdapat agenda mengenai pertahanan udara diantaranya adalah mengoptimalkan peran Angkatan Udara dalam menjaga wilayah kedaulatan Brasil. Mengenai sektor *cybernetic*, fokus utama agenda adalah mengoptimalkan sarana komunikasi militer seperti penggunaan radar, perangkat lunak militer dan lain sebagainya. Mengenai sektor nuklir (*nuclear*), fokus utama meliputi beberapa agenda, diantaranya:⁹⁸

1. Pengembangan dan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir yang ditindaklanjuti dengan kerjasama pembangunan kapal selam nuklir dengan Perancis.
2. Nasionalisasi penuh sumber energi nuklir Brasil untuk keperluan dalam negeri Brasil, nasionalisasi tersebut dilakukan guna menjalankan amanat Konstitusi Brasil tahun 1988

⁹⁷ Sarah Diehl and Eduardo Fujii. 2008 "Brazil's Pursuit of a Nuclear Submarine Raises Proliferation Concerns." *WMD Insights*. dalam Diehl, Sarah. 2009. "Brazil's New National Defense Strategy Calls for Strategic Nuclear Developments". *Loc Cit*

⁹⁸ NSP Global. "Brazil Launches its National Defense Strategy". <http://npsglobal.org/eng/component/content/article/13-news/342-brazil-launches-its-national-defense-strategy.html> (Diakses pada: 05 November 2014)

3. Mempercepat pemetaan proyeksi uranium dan cadangan uranium Brasil, hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan sumber uranium seperti di wilayah Rio de Janeiro.
4. Pemberdayaan sumber energi nuklir untuk pembangkit listrik, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan sebuah terobosan baru dalam menanggulangi krisis energi yang selama ini Brasil mengandalkan energi fosil untuk sumber energi pembangkit listrik.

Kebijakan di sektor energi nuklir menjadi salah satu fokus utama agenda pemerintah Brasil di berbagai termasuk pertahanan dan keamanan, karena Brasil memiliki sumber energi cukup besar di Amerika Selatan. Gambar 3.1 dibawah ini merupakan area pengembangan nuklir di Brasil.



Gambar 3.1 Area Persebaran Pengembangan Nuklir Brasil

Sumber: Toghzan Kassenova. 2014. *Brazil's Nuclear Kaleidoscope: An Eenvolving Identity*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace. Hal.ix

Berdasarkan Gambar 3.1 diatas, terdapat delapan area persebaran pengembangan nuklir di Brasil. Kedelapan area tersebut adalah *Aramar Experimental Center (Centro Experimental Aramar)* yang terletak di wilayah Iparó, Pusat Teknologi Angkatan Laut (*Centro Tecnológico da Marinha*) dan Institut Penelitian Nuklir dan Energi (*Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares*) di wilayah Sao Paulo. Sementara di wilayah Resende terdapat Pusat Unit Uranium (*Unidade de Concentrado de Urânio*) dan Pabrik Bahan Bakar Nuklir (*Fábrica de Combustível Nuclear*). Di wilayah Rio de Janeiro terdapat tiga pembangkit tenaga nuklir yakni Angra I, Angra II, dan Angra III.

Selain agenda pada ketiga sektor yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, dokumen *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil* tahun 2008 juga berimplikasi terhadap penguatan Angkatan Bersenjata Brasil terutama kapabilitas militer. Dalam dokumen tersebut juga menekankan adanya keterhubungan antara strategi pertahanan nasional dengan pembangunan nasional⁹⁹. Keterhubungan strategi pertahanan dan pembangunan nasional tersebut diimplementasikan dengan pengembangan industri pertahanan dalam negeri dan penguasaan teknologi militer. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor teknologi militer seperti teknologi kedirgantaraan dan nuklir.¹⁰⁰ Dengan demikian antara kebijakan pertahanan dan pembangunan nasional dapat bersinergi, sehingga menciptakan stabilitas baik dari segi pertahanan dan keamanan, politik, dan ekonomi negara.

3.1.2 Buku Putih Pertahanan Brasil 2012

Pada 17 Juli 2012, Dilma Rousseff yang menjabat sebagai Presiden Brasil menyampaikan gagasan kepada Dewan Legislatif untuk menerbitkan Buku Putih Pertahanan. Buku Putih Pertahanan tersebut selanjutnya disebut dengan *Livro Branco de Defesa Nacional*. Gagasan Pemerintah Brasil menerbitkan Buku Putih Pertahanan dilakukan karena Dewan Legislatif dinilai kurang memperhatikan masalah keamanan dan pertahanan negara. Pemerintah Brasil dan Dewan

⁹⁹ Ministry of Defense. *Op.Cit.* Hal.08

¹⁰⁰ Ministry of Defense. *Op.Cit.* Hal.32-36

Legislatif diharapkan lebih memperhatikan masalah keamanan dan pertahanan dengan diterbitkannya Buku Putih tahun 2012.¹⁰¹ Buku Putih Pertahanan Brasil (*Livro Branco da Defesa Nacional*) terdiri dari enam bab dan beberapa lampiran. Dalam Buku Putih Pertahanan tersebut dipaparkan mengenai gambaran militer Brasil dari segi kapabilitas, anggaran dan jumlah personil. Hal tersebut merupakan salah satu wujud dari transparansi Pemerintah Brasil dibawah pemerintahan Dilma Rousseff dari segi pertahanan dan keamanan¹⁰². Dari enam bab yang terdapat pada Buku Putih Pertahanan Brasil 2012, terdapat beberapa bab yang menjadi bagian terpenting dalam kebijakan pertahanan nasional dan keamanan Brasil terutama bab pertama, bab ketiga, dan bab kelima. Bab pertama menjelaskan mengenai kondisi fisik dan geografis wilayah Brasil beserta kekayaan alam. Pada bab pertama juga dijelaskan mengenai program-program keamanan dan pertahanan seperti partisipasi Brasil dalam menjaga perdamaian, kerjasama bidang keamanan dan isu proliferasi nuklir disamping masalah keamanan lainnya.¹⁰³

Bab ketiga berisi 110 halaman dan merupakan bab paling penting dari segi pertahanan dan keamanan Brasil. Bab tersebut menjelaskan mengenai gambaran umum keadaan militer beserta program peningkatan kapabilitas militer Brasil secara terperinci pada matra angkatan darat, laut, dan udara. Pada matra Angkatan Darat (EB) adapun proyek peningkatan kapabilitas matra darat diantaranya modernisasi dan akuisisi tank Leopard 1A5 yang bekerjasama dengan pemerintah Jerman yang diwakili oleh perusahaan Jerman KMW. Penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan pada Desember 2008. Selain itu, dalam bab ketiga Buku Putih Pertahanan Brasil juga terdapat program modernisasi kendaraan angkut militer APC Guarani. Proyek tersebut dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pemerintah Italia melalui perusahaan Iveco pada tahun 2009. Pada bidang artileri,

¹⁰¹ Maria Celina D'Araujo. 2012. *Analysis: Defense White Paper*. dalam Tibbileti, Paz and Marcela Donadio. *Op Cit*. Hal.157

¹⁰² Defense Market Intelligence.2013. "Brazil: National Defense Strategy Confirmed". http://dmilt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7983:brazil-national-defense-strategy-confirmed-&catid=35:latin-america&Itemid=58 (Diakses pada: 06 November 2014)

¹⁰³ Maria Celina D'Araujo,. *Op Cit*. Hal.157

Angkatan Darat Brasil (EB) mengembangkan program misil ASTROS 2020 bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri Brasil AVIBRAS.

Pada matra pertahanan laut, Angkatan Laut Brasil (MB) memiliki beberapa langkah dalam meningkatkan kapabilitasnya. Langkah-langkah tersebut yaitu pembangunan armada kapal selam konvensional baru dan satu kapal selam nuklir dalam proyek *ProSub*. Pemerintah Brasil bekerjasama dengan Pemerintah Perancis dalam pembangunan kapal selam tersebut yang ditandai dengan penandatanganan kontrak pada tahun 2008. Selain itu, Pemerintah Brasil juga memodernisasi kapal patrol laut melalui kerjasama dengan Pemerintah Trinidad-Tobago melalui kontrak awala pada tahun 2007.

Sementara itu, pada matra pertahanan udara terdapat langkah-langkah dalam meningkatkan kapabilitas militer diantaranya dengan mengakusisi pesawat tempur, helikopter, dan pesawat angkut militer baru. Proyek akusisi pesawat tempur dimulai pada tahun 2007 namun mengalami penundaan hingga akhir 2013 pemerintah Brasil dibawah pemerintahan presiden Dilma Rousseff dengan kontrak kerjasama dengan Pemerintah Swedia melalui perusahaan SAAB. Selain itu Angkatan Udara Brasil (FAB) dan Pemerintah Brasil juga memodernisasi helikopter militer melalui kerjasama dengan Pemerintah Perancis, Rusia dan Amerika Serikat.

Selanjutnya pada bab kelima dijelaskan mengenai perubahan kebijakan pertahanan. Bab tersebut menjelaskan mengenai gambaran pengembangan industri pertahanan, program penelitian dan pengembangan teknologi militer serta menjadikan angkatan bersenjata Brasil sebagai mitra dalam instrumen pengembangan ekonomi negara.¹⁰⁴ Buku Putih Pertahanan Brasil tahun 2012 juga menekankan bahwa Brasil harus turut serta dan aktif dalam ranah politik internasional. Selain itu, dari pemaparan dokumen Buku Putih Pertahanan Brasil tahun 2012 menyebutkan jika Brasil memiliki kepentingan nasional yang lebih luas di ranah regional. Salah satu kepentingan nasional tersebut adalah, Brasil ingin menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Atlantik Selatan dan menjaga

¹⁰⁴ *ibid.*

kedaulatan negara terutama garis pantai yang terbentang dari Sao Roque (Timur Laut Brasil) hingga ke Selatan yang berbatasan langsung dengan Uruguay.¹⁰⁵

3.2 Program Peningkatan Kapabilitas Angkatan Darat

Dalam peningkatan kapabilitas pertahanan, terutama pada matra Angkatan Darat Brasil (EB) terdapat beberapa proyek modernisasi dan akuisisi. Proyek tersebut diantaranya modernisasi dan akuisisi tank tempur, kendaraan tempur, dan pengembangan sistem persenjataan misil jarak menengah. Berikut adalah proyek pemerintah dan Angkatan Darat Brasil (EB) dalam meningkatkan kapabilitas militer, terutama matra pertahanan darat seperti yang diuraikan dalam Buku Putih Pertahanan Brasil (*Livro Branco da Defesa Nacional*) tahun 2012.¹⁰⁶

3.2.1 Modernisasi dan Akuisisi Tank Tempur Utama (MBT) LEOPARD

Salah satu unsur utama dalam pertahanan darat adalah adanya alutsista tangguh yang dapat bergerak cepat pada saat pertempuran seperti tank tempur utama (*Main Battle Tank – MBT*). Ciri utama tank adalah memiliki pelindung yang terbuat dari lapisan baja yang berat, senjata yang digunakan adalah meriam berukuran besar, dan memiliki mobilitas yang tinggi untuk bergerak dengan segala medan. Penggunaan tank dalam pertempuran mulai sejak Perang Dunia I dan mengalami perkembangan sampai Perang Dunia II hingga Perang Dingin. Mengingat pentingnya peranan tank dalam pertempuran, membuat negara-negara berusaha untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan darat terutama dalam modernisasi tank tempur.

Modernisasi dan akuisisi tank tempur utama (MBT) oleh Angkatan Darat Brasil (EB) pertama kali dilakukan pada tahun 1997, yakni dengan mengganti tank ringan (*lights tank*) M-41 dengan tank tempur utama (MBT) M-60 A3 TTS dari Angkatan Darat Amerika Serikat dan Leopard 1A1 bekas dari Angkatan

¹⁰⁵ Steen Fryba Christensen. 2014. "Brazil's South Atlantic Strategy". Paper dipresentasikan dalam *ISA 2014 conference "Spaces and Places"* di Toronto, Kanada.

http://vbn.aau.dk/files/196425669/Brazil_s_South_Atlantic_Strategy_ISA_Toronto.docx (Diakses pada: 06 November 2014)

¹⁰⁶ Brazilian Government. 2012. *Livro Branco da Defesa Nacional*. Brazil: Brazilian Government. Hal.198-200

Darat Belgia. Pembelian MBT Leopard 1A1 dilakukan pada tahun 1997 dengan jumlah 128 unit dan pengiriman telah selesai hingga tahun 1999. Pada tahun 1997 Angkatan Darat Brasil memiliki total tank tempur ringan M-41 sejumlah 287 unit. Upaya mengganti tank ringan M-41 dengan MBT Leopard 1A1 dimulai sejak tahun 1980-an, namun karena terjadi krisis di sektor pertahanan Brasil mengakibatkan proyek tersebut terlaksana pada tahun 1997.¹⁰⁷

Pasca diterbitkannya dokumen *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil* tahun 2008, Angkatan Darat Brasil (EB) berusaha untuk memodernisasi dan mengakuisisi kembali tank tempur utama (MBT). Modernisasi dan akuisisi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Angkatan Darat Brasil (EB) dengan pembelian MBT Leopard 1A5 sejumlah 220 unit dari Jerman menggantikan MBT Leopard 1A1. Pembelian MBT tersebut dilakukan melalui perjanjian antara pemerintah Brasil dengan Pemerintah Jerman pada Desember 2008.¹⁰⁸ Tahun 2009 Pemerintah Jerman yang diwakili oleh perusahaan negara *Krauss-Maffei Wegmann* (KMW) menangani pembelian MBT Leopard 1A5 tersebut dengan pengiriman tank sejumlah tujuh gelombang (*batch*). Pengiriman tank gelombang keenam telah dikirim pada bulan November 2011 sejumlah 37 unit¹⁰⁹. Sementara pada kelima gelombang pertama sejumlah 163 unit MBT telah dikirim perusahaan KMW kepada Angkatan Darat Brasil.¹¹⁰ Pada tahun 2012 seluruh gelombang pengiriman MBT beserta sistem persenjataan Leopard 1A5 telah selesai dilaksanakan¹¹¹. Seluruh perakitan MBT beserta sistem persenjataan Leopard 1A5 akan dilakukan di Santa Maria, Brasil.¹¹²

¹⁰⁷ Global Security. 2013. "Exercito Brasileiro: Brazilian Army Modernization". <http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/army-mods.htm> (Diakses pada: 16 September 2014)

¹⁰⁸ ASD News. 2009. "KMW Hands Over 1st LEOPARD 1A5 to Brazilian Army". http://www.asdnews.com/news24182/KMW_Hands_Over_1st_LEOPARD_1A5_to_Brazilian_Army.htm (Diakses pada: 16 September 2014)

¹⁰⁹ Renato Whitaker. 2011. "AÇO - Chega o Sexto Lote de Leopard 1A5BR". <http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/3405/ACO---Chega-o-Sexto-Lote-de-Leopard-1A5BR> (Diakses pada: 08 November 2014)

¹¹⁰ *ibid.*

¹¹¹ ASD News. 2009. "KMW Hands Over 1st LEOPARD 1A5 to Brazilian Army". *Loc Cit*

¹¹² Deagel. 2011. *Brazilian Army Orders Logistics Support for its Leopard 1A5 Tanks*. http://www.deagel.com/news/Brazilian-Army-Orders-Logistics-Support-for-its-Leopard-1A5-Tanks_n000009499.aspx (Diakses pada: 08 November 2014)

Tank tempur utama (MBT) Leopard 1 sendiri mulai diproduksi di Jerman sejak tahun 1965. Tank tempur utama (MBT) biasanya dilengkapi dengan senjata dengan meriam kaliber besar (120-125mm) yang mampu menghasilkan kecepatan laras (*muzzle velocity*) tinggi untuk menghantarkan proyektil kinetik penembus lapis baja. Selain sebagai kendaraan tempur penerobos pertahanan musuh, MBT juga memiliki fungsi defensif yakni sebagai benteng penggerak untuk melindungi garis depan atau gerak mundur pasukan.¹¹³ Berikut adalah data mengenai MBT Leopard 1:¹¹⁴

- Tahun Produksi : 1965-1984
- Jumlah Produksi : 2.437 (untuk Jerman Barat pada saat itu)
- Perusahaan : Krauss-Maffei
- Awak Tank : 4 Personil
- Persenjataan : 1x105mm (4.13 inch) ; 2x7.62mm (1 unit koaksial dan 1 unit anti pesawat) ; 2x4 pelontar granat asap
- Berat : 89.041 Lbs
- Panjang : 23 meter (23'2") dan 31 meter (31'4") dengan persenjataan
- Lebar : 11 meter (11'2")
- Tinggi : 9 meter (9'1")
- Amunisi : Maximum 70mm
- Tipe Amunisi : 60x105mm ; 5.000x7,62mm
- Negara Operator : Australia, Brasil, Kanada, Chile, Yunani, Norwegia

Berdasarkan spesifikasi Tank Leopard 1 diatas, tank tempur utama (MBT) Leopard 1 merupakan salah satu MBT yang efektif dalam pertempuran darat. MBT tersebut dilengkapi dengan amunisi yang dapat diandalkan seperti amunisi

¹¹³ Yulian Ardiansyah. "Tank Medium: Benarkah lebih Cocok Dibanding MBT?". *Defender*. Edisi 56/2012. Hal.43-44

¹¹⁴ Spencer C. Tucker. 2004. *Tank: an Illustrated History of Their Impact*. California: ABC-CLIO Inc. Hal.331

berkaliber 105mm dan dua buah amunisi kaliber 7.62mm yang dapat menangkal serangan pesawat tempur. MBT ini juga dilengkapi dengan dua buah pelontar granat asap yang dapat membantu dalam pertempuran jarak dekat untuk mengaburkan pandangan musuh. Tank tempur utama (MBT) Leopard 1 memiliki beberapa varian (ragam) dan sempat mengalami beberapa kali pengembangan seperti yang terdapat pada Tabel 3.1 dibawah ini:¹¹⁵

Tabel 3.1 Varian MBT Leopard 1

No	Varian/Tipe	Keterangan
1	1A1	Tank yang mengalami pengembangan termasuk persenjataan meriam putar (<i>turret</i>)
2	1A2	Tank yang mengalami pengembangan meriam putar (<i>turret</i>), sistem penginderaan malam hari untuk para awak tank
3	1A3	Pemasangan sistem pemandu persenjataan meriam putar (<i>turret</i>) baru dan dilengkapi dengan sistem anti peluru pada MBT Leopard
4	1A4	Tank yang dilengkapi sistem pemandu persenjataan meriam putar (<i>turret</i>) yang terintegrasi dengan sistem kontrol senjata api
5	1A5	Tank yang dilengkapi dengan sistem persenjataan berbasis komputer (digital), sensor panas (<i>thermal</i>) serta perlengkapan sistem penginderaan malam hari

Sumber: Spencer C.Tucker. 2004. *Tank: an Illustrated History of Their Impact* California: ABC-CLIO. Hal.331

Apabila melihat pada Tabel 3.1 diatas, MBT Leopard 1 mengalami beberapa pengembangan. Pengembangan tersebut dimulai dari sistem persenjataan hingga penerapan teknologi baru belum pernah diterapkan sebelumnya. Perbedaan kemampuan MBT Leopard 1 dapat kita lihat pada varian

¹¹⁵ *ibid.*

1A1 dengan 1A5. Pada varian 1A1 sistem persenjataan masih belum secanggih dengan sistem yang ada pada varian 1A5. Selain memiliki sistem persenjataan yang berbasis komputer (digital), varian tersebut juga dilengkapi dengan sensor panas (*thermal*) dan dilengkapi sistem penginderaan malam yang canggih. Faktor inilah yang membuat Angkatan Darat Brasil (EB) memodernisasi armada tank tempur MBT Leopard 1A1 dengan varian 1A5.

3.2.2 Modernisasi dan Akuisisi Kendaraan Angkut Militer (APC)

GUARANI

Selain memodernisasi armada tank tempur untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan pada matra darat, Angkatan Darat Brasil (EB) juga melakukan modernisasi kendaraan angkut militer atau *Armour Personal Carrier* (APC) EE-11 Urutu dengan APC Guarani. Proyek modernisasi tersebut selanjutnya dikenal dengan proyek Urutu III, target dan tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah modernisasi akuisisi APC Guarani sejumlah 2.044 unit selama dua puluh tahun.¹¹⁶ Pada tahun 2007, Kementerian Pertahanan Brasil menandatangani kontrak awal kerjasama proyek Urutu III dengan perusahaan Italia, Iveco dan ditindaklanjuti pada tahun 2009.¹¹⁷

Modernisasi dan akuisisi Guarani terdiri dari beberapa gelombang pengiriman (*batch*). Gelombang (*batch*) pertama pengiriman APC Guarani dilaksanakan pada tahun 2012 hingga 2013 dengan jumlah APC 86 unit.¹¹⁸ Tahun 2013 hingga merupakan tahun perakitan secara penuh APC Guarani untuk gelombang pertama dan kedua yang dilaksanakan di Brasil. Pada tahun 2014, Angkatan Darat Brasil (EB) menerima 100 unit dari total 128 unit APC Guarani dari pihak Iveco Italia. APC Guarani akan dirakit dan diproduksi di wilayah Sete Lagoas dengan persentase 60 persen, sementara 40 persen akan dilakukan oleh

¹¹⁶ Paz Tibbileti and Marcela Donadio. *Op Cit.* Hal.155

¹¹⁷ Andrius Genys. 2014. "VBTP-MR". http://www.military-today.com/apc/vbtp_mr.htm (Diakses pada: 09 November 2014)

¹¹⁸ *Ibid.*

Iveco Italia.¹¹⁹ Kendaraan angkut personel militer (APC) Guarani akan mulai dioperasikan oleh Angkatan Darat Brasil (EB) pada tahun 2015.

Sebagai kendaraan pengangkut, fungsi *Armored Personnel Carrier* (APC) Guarani ialah untuk sarana transportasi pasukan dari markas menuju medan pertempuran. Kendaraan pengangkut personel militer (APC) dilengkapi dengan senapan mesin ringan atau sedang. Sementara lapis baja yang digunakan didesain untuk menahan proyektil kaliber sedang. Oleh karena itu, APC pada umumnya memiliki lapis baja yang paling tipis dibandingkan kendaraan militer lainnya, mengingat fungsinya bukan sebagai kendaraan tempur lapangan.¹²⁰ Berikut adalah data mengenai APC Guarani yang akan digunakan oleh Angkatan Darat Brasil (EB):

- Tahun Produksi : 2013
- Awak APC : 2 Orang
- Personil : 9 Orang
- Berat : 16.7 Ton
- Panjang : 7 Meter
- Lebar : 2.7 Meter
- Tinggi : 2.43 Meter
- Mesin : Iveco Cursor 9 Diesel
- Kekuatan Mesin : 38 Hp
- Kecepatan Maksimum : 100 Km/jam (Darat) dan 9 Km/jam (Amphibi)
- Jarak Tempuh : 600 Km
- Persenjataan : UT-30BR 30mm *Autocannon*, 7.62mm MG, 12.7mm HMG

Berdasarkan pada spesifikasi APC Guarani diatas, dapat dilihat bahwa APC Guarani memiliki beberapa spesifikasi yang dapat diandalkan dalam

¹¹⁹ Tamir Eshel. 2011. "IVECO Inaugurates New Production Plant in Brazil Supporting VBTP Program". http://defense-update.com/20110413_iveco-vbtp-production.html#.VF-I-VdHTMw (Diakses pada: 09 November 2014)

¹²⁰ Yulian. Ardiansyah. *Op.Cit.* Hal.40

transportasi personel dari markas menuju medan pertempuran. Dengan kekuatan mesin sebesar 38 tenaga kuda (*horsepower*) serta kecepatan yang mampu hingga diatas 100 Km/jam membuat APC Guarani mampu mengangkut personel dengan efektif. Selain itu, APC Guarani juga memiliki kemampuan untuk berjalan di medan yang berair (*amphibi*) dengan kecepatan 9 Km/jam. Pada segi persenjataan APC Guarani dilengkapi dengan senapan mesin berkaliber 7.62 mm untuk pertempuran jarak dekat maupun menengah dan amunisi 30 mm serta persenjataan anti-tank.

3.2.3 Pengembangan Teknologi Sistem Persenjataan Misil ASTROS 2020

Dari segi persenjataan teknologi artileri, militer Brasil memiliki proyek pengembangan sistem persenjataan roket multilaras atau *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) ASTROS 2020. ASTROS 2020 merupakan proyek modernisasi teknologi infanteri MLRS ASTROS II yang sebelumnya telah digunakan Angkatan Darat Brasil (EB). Proyek pengembangan ASTROS 2020 diumumkan pertama kali pada akhir Agustus 2011 oleh Kementerian Pertahanan Brasil dengan anggaran sebesar 685 juta US\$¹²¹. Pada tahun 2012, Angkatan Darat Brasil (EB) memesan tiga unit baterai ASTROS 2020 yang dilengkapi dengan rudal AV-TM 300 dimana proses pengirimannya akan dilakukan bertahap dalam beberapa gelombang (*batch*) hingga tahun 2015¹²². Salah satu kantor berita terbesar Amerika Selatan, *Mercopres* juga merilis bahwa Angkatan Darat Brasil (EB) juga mengakuisisi 18 unit kendaraan tempur peluncur roket, 18 unit kendaraan penyuplai misil, tiga unit pengendali persenjataan dan stasiun cuaca, serta tiga kendaraan tempur yang berfungsi sebagai pelindung. Selain itu, Angkatan Darat Brasil (EB) juga mengakuisisi tiga unit kendaraan lapis baja untuk setiap baterai

¹²¹ Defense Industry Daily. 2013. "ASTROS 2020: Brazil Moves to Revive Avibras". <http://www.defenseindustrydaily.com/astros-2020-brazil-moves-to-revive-avibras-07069/> (Diakses pada: 10 November 2014)

¹²² Pimpinan Redaksi. 2014. "Adu Garang MLRS". *Angkasa*. Edisi Koleksi No.90. Hal.39

tempur sebagai sarana komunikasi dan komando untuk proyek ASTROS 2020.¹²³ Tahun 2013 Angkatan Darat Brasil (EB), menerima lima kendaraan peluncur rudal dan sistem persenjataan rudal pada gelombang (*batch*) pertama.¹²⁴

Proyek akuisisi dan pengembangan sistem persenjataan baterai MLRS ASTROS 2020, rudal taktis AV-TM 300 dan rudal berpemandu AV-SS40G akan dilaksanakan oleh perusahaan Brasil AVIBRAS.¹²⁵ Rudal AV-TM 300 merupakan rudal jelajah dengan jarak jangkauan sejauh 300 kilometer. Rudal ini memiliki sistem pemandu yang dapat dikontrol kearah sasaran secara presisi dengan sistem digital. Dengan adanya ASTROS 2020 diharapkan dapat memberikan efek penangkal (*deterrence*) bagi Angkatan Darat Brasil (EB), khususnya pada matra pertahanan darat di wilayah perbatasan. ASTROS II/ASTROS 2020 akan dioperasikan oleh satuan Rudal Angkatan Darat Brasil (EB) di wilayah Formosa, negara bagian Goias sebanyak tiga unit baterai. Sebagai persenjataan artileri di medan pertempuran, satu unit baterai ASTROS II (selanjutnya mengalami pengembangan dalam program ASTROS 2020) terdiri dari 13 kendaraan yaitu enam peluncur ASTROS II yang mampu meluncurkan rudal dengan kaliber yang berbeda, enam truk penyuplai dan satu kendaraan khusus radar yang berfungsi sebagai sistem pengontrol. Berikut ini adalah data mengenai spesifikasi MLRS ASTROS II yang akan dimodernisasi menjadi ASTROS 2020:

- Tahun Produksi : 1983
- Awak : 3 Orang
- Berat : 10 Ton
- Panjang : 7 Meter
- Lebar : 2.9 Meter

¹²³ Mercopress. 2011. "Brazil releases funds to develop surface to surface missile system for the Army". <http://en.mercopress.com/2011/08/31/brazil-releases-funds-to-develop-surface-to-surface-missile-system-for-the-army> (Diakses pada: 10 November 2014)

¹²⁴ Victor Barreira. 2013. "ASTROS 2020 Enters Service With Brazilian Army". <http://www.janes.com/article/30869/astros-2020-enters-service-with-brazilian-army> (Diakses pada: 10 November 2014)

¹²⁵ *Ibid.*

- Tinggi : 2.6 Meter
- Kaliber : 127 mm
- Tabung Peluncur : 32 buah
- Berat Rudal : 68 Kg
- Jarak Tembak : 9-30 Km
- Mesin : Mercedes Benz OM422
- Kekuatan Mesin : 280 Hp
- Kecepatan Maksimum: 90 Km/jam
- Jarak Tempuh : 480 Km
- Negara Operator : Bahrain, Malaysia, Qatar dan Arab Saudi

Berdasarkan pada spesifikasi ASTROS 2020 diatas, dapat kita lihat bahwa MLRS ASTROS II memiliki beberapa spesifikasi yang dapat diandalkan dalam mendukung persenjataan pasukan artileri. MLRS ASTROS II pada awalnya dilengkapi dengan rudal jelajah jarak dekat yakni Sembilan hingga 30 kilometer. Namun, seiring perkembangan persenjataan pemerintah Brasil beserta Angkatan Darat Brasil (EB) mengembangkan rudal jelajah jarak menengah AV-TM 300 dengan jarak jangkauan sejauh 300 kilometer pada MLRS ASTROS II. Saat ini AVIBRAS telah memodernisasi MLRS ASTROS II generasi terbaru dalam proyek ASTROS 2020. AVIBRAS selaku perusahaan pertahanan Brasil telah mengekspor MLRS ASTROS II ke beberapa negara terutama benua Asia seperti yang tertera pada spesifikasi tersebut. Tahun 2000 Angkatan Darat Malaysia mengakuisisi 18 unit MLRS ASTROS II dengan roket berkaliber 300mm yang memiliki jarak jangkauan 80 kilometer.¹²⁶

3.3 Program Peningkatan Kapabilitas Angkatan Laut

Pada matra pertahanan laut, Angkatan Laut Brasil (MB) memiliki beberapa proyek modernisasi armada kapal tempur hingga proyek ambisius kapal selam nuklir. Dalam pelaksanaan proyek modernisasi angkatan laut tersebut, pemerintah Brasil bekerjasama dengan beberapa negara untuk mengembangkan

¹²⁶ Pimpinan Redaksi. "Adu Garang MLRS". *Op.Cit.* Hal.38

teknologi di bidang pertahanan laut. Proyek modernisasi Angkatan Laut Brasil (MB) merupakan implikasi dari kebijakan strategi di bidang pertahanan dan keamanan seperti yang tertuang dalam dokumen *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil* tahun 2008 dan diperkuat dengan adanya Buku Putih Pertahanan atau *Livro Branco da Defesa Nacional* tahun 2012. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Brasil beserta Angkatan Laut Brasil (MB) dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan laut.

3.3.1 Proyek *ProSuper*

ProSuper merupakan salah satu proyek modernisasi kapal tempur dan kapal patroli Angkatan Laut Brasil (MB). Modernisasi dilakukan dengan mengakuisisi lima unit kapal jenis tempur jenis frigat 6.000 ton, tiga unit kapal patroli serta satu unit kapal logistik pendukung. Pada tahun 2007, Pemerintah Brasil menandatangani perjanjian kontrak awal kerjasama pengadaan tiga unit kapal patroli laut dengan Pemerintah Trinidad Tobago.¹²⁷ Kontrak kerjasama kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2011 dengan pembelian kapal patroli laut senilai 218 juta US\$. Dalam kontrak tersebut, disepakati pula kerjasama pembuatan lima unit kapal patroli dengan panjang 90 meter dan berat 2.200 ton serta memiliki kecepatan 25 knot.

Tahun 2012 Angkatan Laut Brasil (MB) menerima dua unit kapal patroli dari perusahaan BAE System selaku kontraktor dalam proyek *ProSuper* dan pengiriman selesai dilaksanakan pada tahun 2013.¹²⁸ Saat ini Brasil menggunakan tiga unit kapal patroli laut atau *Offshore Patrol Vessel* (OPV) kelas Amazonas ketiganya adalah Amazonas (P120), Appa (P121) dan Arraguari (P122)¹²⁹. Berikut adalah spesifikasi mengenai kapal OPV tersebut:

¹²⁷ World Maritime News. 2012. "Brazilian Navy Buys Three Ocean Patrol Vessels". <http://worldmaritimeneeds.com/archives/43125/brazilian-navy-buys-three-ocean-patrol-vessels/> (Diakses pada: 11 November 2014)

¹²⁸ Douglas Fraser, 2012. "BAE Systems sells patrol vessels to Brazil". <http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-business-16383765> (Diakses pada: 11 November 2014)

¹²⁹ Victor Barreira. 2014. "Brazilian Navy to reveal indigenous OPV design at Euronaval 2014". <http://www.janes.com/article/43378/brazilian-navy-to-reveal-indigenous-opv-design-at-euronaval-2014> (Diakses pada: 11 November 2014)

- Tipe : Kapal Patroli Laut
- Berat : 2.200 Ton
- Panjang : 90 Meter
- *Beam* : 13.5 Meter
- *Draught* : 3.5 Meter
- Radar : Terma Scanter 4100 X-band

Berdasarkan spesifikasi diatas, kapal patroli (OPV) kelas Amazonas memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni dalam menjaga perairan Brasil, baik di wilayah laut maupun wilayah Amazon yang didominasi oleh sungai-sungai besar. Sebagai kapal patroli perairan, kapal OPV *Amazonas Class* dilengkapi sistem persenjataan otomatis DS30M yang mampu menembakkan peluru kaliber 30mm sebanyak 250 buah per menit dan dua buah senjata otomatis berkaliber 12.7 mm. Mesin dari kapal OPV *Amazonas Class* terdiri dari dua unit mesin diesel yang memiliki kekuatan 10.000 tenaga kuda. Sementara pada sistem radar, kapal ini dilengkapi *Terma Scanter 4100 X-band* yang mampu mendeteksi target di perairan maupun udara dengan pelacak otomatis.

Selain memodernisasi kapal patroli, Angkatan Laut Brasil (EB) juga memodernisasi armada kapal tempur jenis korvet (*corvette*) dan kapal pengangkut pesawat (*aircraft carrier*). Kapal jenis korvet yang dimodernisasi oleh Angkatan Laut Brasil (MB) adalah *Barroso* (V34) pada tahun 2008. Kapal korvet *Barroso* (V34) dilengkapi dengan persenjataan berat seperti misil *Exocet-MM40* berpemandu radar dan torpedo Mk-46. Misil *Exocet-MM40* memiliki jarak tembak ke sasaran hingga sejauh 70 kilometer, sementara torpedo Mk-46 dapat membidik sasaran bawah laut seperti kapal selam dengan kecepatan 75 km/jam. Selain itu kapal korvet *Barroso* (V34) juga dapat mengangkut satu unit helikopter sedang (medium) *Westland Super Lynx AH-11A*.¹³⁰ Pada kapal pengangkut pesawat (*aircraft carrier*), kapal yang mengalami modernisasi adalah Sao Paulo (A12). Modernisasi dimulai pada tahun 2005 hingga Juni 2009 dan resmi

¹³⁰ Naval Technology. 2014. "Inahuma Class Corvette, Brazil". <http://www.naval-technology.com/projects/inhauma-class/> (Diakses pada: 15 November 2014)

dioperasikan pada tahun 2010. Kapal Sao Paulo tersebut menggantikan kapal pengangkut pesawat (*aircraft carrier*) *Minas Gerais* sejak tahun 2001. Mengenai kategori dari kapal Sao Paulo (A12) merupakan kapal induk ringan yang sebelumnya digunakan Angkatan Laut Perancis dengan kapasitas dapat menangkut 39 pesawat ringan, 22 pesawat jet, dan 17 helikopter. Sejak dioperasikannya Sao Paulo (A12), menjadikan Angkatan Laut Brasil sebagai satu-satunya negara di Amerika Selatan yang memiliki kapal pengangkut pesawat (*aircraft carrier*) berkapasitas besar atau disebut juga kapal induk ringan.¹³¹

3.3.2 Proyek *ProSub*: Proyek Pembangunan Kapal Selam Nuklir

Rencana pembangunan kapal selam nuklir Brasil mulai muncul pada saat pemerintahan Presiden Itamar Franco (1992-1994) dan Henrique Cardoso (1994-2003) namun proyek tersebut tidak berjalan lancar. Pada awal masa pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva tahun 2000, proyek pembangunan kapal selam mulai dilanjutkan kembali dan menjadi salah satu program pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari proyek tersebut, tahun 2005 para insinyur dari Angkatan Laut Brasil (MB) dan perusahaan komponen alat berat untuk perlengkapan nuklir *Nuclebrás Equipamentos Pesados SA* (NUCLEP) membangun instalasi reaktor untuk *prototype* kapal selam nuklir.¹³² Tahun 2008 Pemerintah Brasil bekerjasama dengan pemerintah Perancis dalam proyek pembangunan kapal selam nuklir tersebut. Perjanjian dengan Pemerintah Perancis kemudian ditandatangani pada tahun 2009 yang diwakili oleh Presiden Lula da Silva dengan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy.¹³³

Berdasarkan perjanjian kerjasama tahun 2008, Pemerintah Brasil telah mengakuisisi empat armada kapal selam tempur kelas *Scorpene* (*Scorpene Class*) dan satu unit kapal selam nuklir.¹³⁴ Kapal selam kelas *Scorpene* dilengkapi

¹³¹ Taylor Marvin. 2013. "Why Does Brazil Operate an Aircraft Carrier". <http://smokeandstir.org/2013/12/29/why-does-brazil-operate-an-aircraft-carrier/> Diakses pada: 15 November)

¹³² Toghzan Kassenova. 2014. *Brazil's Nuclear Kaleidoscope: An Eenvolving Identity*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace. Hal.28

¹³³ Fabiana Frayssinet. 2011. "Brazil's New Nuclear Subs to Defend Oi". *Loc. Cit*

¹³⁴ Michael Moran. 2011. "Analysis: Brazil Goes Nuclear". *Loc. Cit*

dengan enam tabung torpedo 21 inci yang mampu digunakan untuk penembakan *salvo* (tembakkan ke udara). Persenjataan lain dari kapal selam kelas *Scorpene* adalah torpedo anti kapal selam dan torpedo anti kapal permukaan. Selain itu, kapal selam kelas *Scorpene* juga dapat mengangkut persenjataan pendukung, seperti 18 torpedo dan rudal serta 30 ranjau laut.¹³⁵ Sementara itu, dalam hal perakitan kapal selam, Pemerintah Brasil menunjuk anak perusahaan konstruksi angkatan laut Odebrecht, *Itaguaí Construções Navais* sebagai mitra kerjasama perusahaan konstruksi angkatan laut dari Perancis *Direction des Constructions Navales et Services* (DCNS) dalam pembangunan kapal selam nuklir.¹³⁶ Pembangunan konstruksi kapal selam akan dilaksanakan di Brasil, yaitu di wilayah Sepetiba selatan kota Rio de Janeiro.¹³⁷

Pada tahun 2009, Menteri Pertahanan Brasil Nelson Jobim mengungkapkan bahwa pemerintah Brasil berencana membangun kembali tiga armada kapal selam nuklir. Sementara di tahun 2010 melalui program perencanaan angkatan laut yang tertuang dalam program *O Plano de Articulação e Equipamento da Marinha do Brasil* (PAEMB), pemerintah Brasil dalam jangka panjang menargetkan akan membangun 15 kapal selam konvensional dan enam kapal selam nuklir yang dibangun di dalam negeri.¹³⁸ Pembangunan pertama galangan kapal selam dalam program *ProSub* diresmikan oleh Presiden Dilma Rousseff pada tahun 16 Juli 2011. Peresmian pembangunan galangan kapal selam tersebut ditandai dengan upacara penerimaan replika kapal selam oleh pihak Angkatan Laut Brasil (EB) beserta jajaran terkait lainnya kepada Presiden Dilma Rousseff di Rio de Janeiro.¹³⁹ Pengoperasian kapal selam konvensional baru Brasil mulai dioperasikan pada tahun 2015, sementara untuk kapal selam nuklir secara

¹³⁵ Benny Adrian. "Rebutan Jadi Penguasa Laut Asia". *Angkasa*. Edisi Koleksi 11. Hal. 103

¹³⁶ Fabiana Frayssinet. 2011. "Brazil's New Nuclear Subs to Defend Oil". *Loc. Cit*

¹³⁷ Anthony Boadle. 2013. "Brazil Launches Program to Build Nuclear Submarine in a Decade". <http://www.reuters.com/article/2013/03/01/brazil-defense-submarines-idUSL1N0BT5WK20130301> (Diakses pada: 15 Mei 2014)

¹³⁸ Global Security. 2013. "Submarinos Nucleares de Ataque (SNA)".

<http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/sna.htm> (Diakses pada: 12 November 2014)

¹³⁹ Fabiana Frayssinet. 2011. "Brazil's New Nuclear Subs to Defend Oil". *Loc. Cit*.

penuh akan dioperasikan pada tahun 2023.¹⁴⁰ Tabel 3.2 berikut akan menjelaskan mengenai spesifikasi dari kapal selam kelas *Scorpene* (*Scorpene Class*) yang akan digunakan untuk memperkuat armada Angkatan Laut Brasil (MB):

Tabel 3.2 Spesifikasi Kapal Selam *Scorpene*

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Tipe	Diesel Electric – SSK Submarine
2	Berat	1700 Ton
3	Panjang	66.4 Meter
4	Luas	6.2 Meter
5	Awak Kapal	37 Orang
6	Mesin	4 x SEMT Dieslick 12 PA4 V 200 SMDS
7	Kecepatan	20 Knot
8	Jarak Tempuh	6.000 Nautic Miles
9	Persenjataan	6 x Torpedo standar NATO (533 mm x 7,10 meter), 18 Torpedo Berat (SUT, F17, DMA2, F21), Misil anti kapal tempur MBDA SM39 Exocet, 30 Ranjau Laut
10	Perusahaan	DCNS
11	Negara Operator	Brazil, Chile, Malaysia, India
12	Ketahanan dalam Laut	60 Hari

Sumber: Navy Recognition. 2012. “Scorpène class SSK Submarine Diesel-electric/AIP – DCNS”. <http://www.navyrecognition.com/index.php/world-naval-forces/south-american-navies-vessels-ships-equipment/.htm>

¹⁴⁰ Anthony Boadle. 2013. “Brazil Launches Program to Build Nuclear Submarine in a Decade”. *Loc. Cit.*

Tabel 3.2 diatas merupakan spesifikasi standar dari kapal selam kelas *Scorpene (Scorpene Class)* yang diproduksi oleh perusahaan Perancis DCNS. Untuk kapal selam kelas *Scorpene (Scorpene Class)* yang akan digunakan oleh Angkatan Laut Brasil (MB), berbeda dengan *Scorpene Class* versi standar. Pada versi standar, kapal selam tersebut memiliki panjang 66.4 meter dengan awak kapal 37 orang serta berat 1.700 ton sementara untuk *Scorpene Class* Brasil memiliki panjang 75 meter dengan awak kapal hingga 45 orang serta memiliki berat 2.000 ton¹⁴¹. Selain itu, kapal selam *Scorpene Class* juga dilengkapi dengan teknologi canggih yakni lambung kapal memiliki tingkat kesunyian yang tinggi (*minimum hydrodynamic noise*) yang bertujuan untuk menghindari deteksi radar musuh.¹⁴²

3.4 Program Peningkatan Kapabilitas Angkatan Udara

Salah satu bentuk dari pertahanan nasional ialah pertahanan udara, pertahanan ini menitikberatkan pada bagaimana sebuah negara melindungi dan menjaga wilayah udaranya terhadap ancaman dari negara lain. Dalam sistem pertahanan udara, keberadaan pesawat dan helikopter militer sangat diperlukan karena memiliki peranan penting antara lain sebagai sarana mobilitas untuk mengontrol wilayah udara. Berdasarkan pada Buku Putih Pertahanan Brasil atau *Livro Branco de Defesa Nacional* tahun 2012, proyek peningkatan kapabilitas Angkatan Udara Brasil (FAB) diantaranya adalah:

3.4.1 Proyek FX-2: Akuisisi dan Modernisasi Pesawat Tempur

Angkatan Udara Brasil (FAB) melakukan modernisasi pesawat tempur melalui proyek FX-2. Proyek tersebut pertama kali dicanangkan tahun 2001 yang dikenal sebagai proyek FX dengan anggaran sebesar 700 juta US\$ untuk pengadaan 12 pesawat tempur generasi keempat.¹⁴³ Namun pada Februari 2005

¹⁴¹ Navy Recognition. 2012. "Scorpène class SSK Submarine Diesel-electric/AIP – DCNS". <http://www.navyrecognition.com/index.php/world-naval-forces/south-american-navies-vessels-ships-equipment/.html> (Diakses pada: 13 November 2014)

¹⁴² Naval Technology. 2014. "SSK Scorpene Class Attack Submarine, France". <http://www.naval-technology.com/projects/scorpene/> (Diakses pada: 13 November 2014)

¹⁴³ Inigo Guevara. *Op. Cit.*

proyek FX dibatalkan oleh pemerintahan Lula da Silva yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Brasil dan anggaran proyek dialihkan untuk program sosial. Pada 4 November 2007, proyek ini kembali dilanjutkan, namun ditengah perjalanannya kembali ditunda hingga tahun 2008. Tujuan dari proyek ini ialah untuk modernisasi pesawat tempur yang dimiliki angkatan udara Brasil selama kurun waktu 2015-2025. Selama ini, Brasil menggunakan pesawat tempur Mirage produksi Perancis. Pesawat tempur tersebut digunakan FAB sejak tahun 1972 dan digantikan oleh pesawat tempur baru pada akhir tahun 2013 dalam proyek FX-2.¹⁴⁴

Pengadaan pesawat tempur baru melalui proyek FX-2 Brasil ini dilakukan melalui tender. Tender pengadaan pesawat tempur Brasil dinilai memiliki keuntungan bagi negara produsen. Tender tersebut melibatkan tiga negara produsen pesawat tempur dunia yakni Amerika Serikat, Swedia dan Perancis. Amerika Serikat dalam hal ini diwakili oleh perusahaan pesawat Boeing yang menawarkan varian pesawat tempur F/A 18 *Super Hornet*. Sementara dari pihak Perancis adalah perusahaan Dassault Aviation dengan menawarkan pesawat tempur *Rafale*. Swedia diwakili oleh perusahaan SAAB yang menawarkan produk pesawat tempur *Gripen*.¹⁴⁵ Persaingan mengenai perusahaan dalam tender pengadaan pesawat tempur bagi Angkatan Udara Brasil (FAB) dimulai pada akhir 1990-an dibawah pemerintahan Presiden Fernando Henrique Cardoso, yang dilanjutkan pada masa Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan kini diteruskan oleh Presiden Dilma Rousseff.¹⁴⁶

Sebagai tindak lanjut dari tender tersebut, pada 7 September 2009 Presiden Lula da Silva mengumumkan akan bernegosiasi dengan pemerintah Perancis terkait pembelian 36 unit pesawat tempur *Rafale*. Pada hari berikutnya, Menteri Pertahanan Brasil juga mengumumkan bahwa penawaran dari Boeing Amerika Serikat masih dipertimbangkan. Pihak Boeing menawarkan harga pesawat tempur

¹⁴⁴ *ibid.*

¹⁴⁵ Brian Winter and Alonso Soto. 2013. *Loc. Cit*

¹⁴⁶ A-Satu News. 2013. "Brasil Batalkan Kontrak Beli Jet Tempur Boeing". <http://www.asatunews.com/berita-15941-nsa-terpukul-brasil-batalkan-kontrak-beli-jet-tempur-boeing.html> (Diakses pada : 18 Februari 2014)

lebih rendah daripada pesaing tender lainnya. Pada tahun 2011 pemerintah Brasil mengumumkan bahwa tidak ada batas waktu yang pasti dalam pengumuman pemenang tender proyek FX-2. Pada bulan Maret 2011, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Dilma Rousseff. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kelanjutan proyek FX-2 dan Obama menyatakan bahwa pesawat tempur F-18 adalah pesawat terbaik. Namun sebagian besar pihak, terutama politisi Brasil termasuk Kementerian Pertahanan masih beranggapan bahwa bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam proyek FX-2 dapat berimplikasi buruk bagi Brasil.¹⁴⁷

Penyadapan yang dilakukan oleh agen keamanan Amerika Serikat *National Security Agency* (NSA) pada September 2013 berimplikasi pada pembatalan tender terhadap pihak Boeing dalam proyek FX-2.¹⁴⁸ Dengan dibatalkannya penawaran pihak Boeing, ada dua pesawat tempur pesaing kuat dalam proyek FX-2 yakni *Rafale* dan *Gripen*. Pada 18 Desember 2013, secara mengejutkan pemerintah Brasil mengumumkan pemenang tender dalam proyek FX-2. Pemerintah Brasil melalui Menteri Pertahanan Celso Amorim menyatakan memilih pesawat tempur *Gripen* varian JAS-39 sejumlah 36 unit dari perusahaan SAAB Swedia dengan nilai kontrak 5 milyar US\$¹⁴⁹. *Gripen* dari segi merupakan pesawat yang memiliki penawaran harga paling rendah dibandingkan pesaing lain dalam proyek FX-2. Selain itu pesawat tempur *Gripen* memiliki kapabilitas untuk melakukan pertempuran udara serta misi pengintaian udara.¹⁵⁰

Pemerintah Brasil juga memilih perusahaan SAAB Swedia sebagai mitra dalam pengembangan pesawat tempur *Gripen* untuk membangun industri pesawat dalam negeri. Pemilihan SAAB Swedia sebagai mitra dalam pembangunan industri pesawat dalam negeri Brasil melalui berbagai pertimbangan, diantaranya

¹⁴⁷ Global Security. 2013. "F-X BR/FX-2-2008-2012". <http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/fx-br-4.htm> (Diakses pada: 15 November 2014)

¹⁴⁸ Global Security. 2013. "FX-2 Project". <http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/fx-br.htm> (Diakses pada: 24 Februari 2014)

¹⁴⁹ Aaron Mehta. 2013. "Brazil Picks Sweden's Gripen Fighter Jet". <http://www.defensenews.com/article/2013/12/18DEFREG02312180027/Brazil-Picks-Sweden-s-Gripen-Fighter-Jet.htm> (Diakses pada: 24 Februari 2014)

¹⁵⁰ *ibid.*

pertimbangan dari berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga eksekutif, kementerian dan pihak militer. Proses pengambilan keputusan (terkait tarik ulur kepentingan) mengenai pemilihan mitra dalam membangun industri pertahanan dalam negeri Brasil lebih lanjut dijelaskan pada bab selanjutnya.

3.4.2 Proyek HX-BR, H-60 dan AH-X: Akuisisi dan Modernisasi Helikopter Angkatan Udara

Selain memodernisasi pesawat tempur, Angkatan Udara Brasil (FAB) juga memodernisasi armada helikopter guna meningkatkan kapabilitas pertahanan udara. Adapun proyek modernisasi helikopter tersebut diantaranya proyek HX-BR. Sebagaimana disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan Brasil atau *Livro Branco de Defesa Nacional* tahun 2012, proyek HX-BR adalah proyek akuisisi helikopter untuk yang selanjutnya akan dikembangkan oleh perusahaan pertahanan dalam negeri Brasil Helibras¹⁵¹. Terdapat tiga negara yang bersaing dalam proyek HX-BR, Rusia, Amerika Serikat, dan Perancis.¹⁵² Pada Juni 2008 Pemerintah Brasil menandatangani perjanjian kontrak kerjasama dengan Pemerintah Perancis mengenai proyek HX-BR dengan nilai kontrak sebesar 1 milyar US\$. Menteri Pertahanan Brasil yang saat itu masih dijabat oleh Nelson Jobim mengatakan bahwa Brasil akan membeli 50 helikopter EC-725 *Super Cougar* yang mulai dikirim tahun 2010 hingga tahun 2016 dari perusahaan Eurocopter.¹⁵³ Perakitan helikopter EC-725 *Super Cougar* baru oleh Helibras akan dilakukan pada tahun 2012 di wilayah Itajuba. Sejauh ini Helibras telah memproduksi lebih dari 500 unit helikopter baik untuk Angkatan Udara Brasil (FAB) maupun memenuhi pasar ekspor.¹⁵⁴ Pada Tahun 2013, Angkatan udara

¹⁵¹ Brazilian Government. 2012. *Op. Cit.* Hal. 203

¹⁵²UPI. 2012. "Brazil Helicopter Deal in Full Swing". http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2012/01/11/Brazil-Eurocopter-deal-in-full-swing/UPI-65101326285000/ (Diakses pada: 16 November 2014)

¹⁵³ Defense Industry Daily. 2012. "Brazil's \$1B+ Order for EC725 Cougar Helicopters". <http://www.defenseindustrydaily.com/brazil-signs-1b-production-deal-for-cougar-helicopters-04959/> (Diakses pada: 16 November 2014, 14:03)

¹⁵⁴UPI. 2012. "Brazil Helicopter Deal in Full Swing". *Loc. Cit.*

Brasil (FAB) melakukan uji coba penerbangan enam helikopter EC-725 *Super Cougar* di pangkalan angkatan udara Santa Cruz di wilayah Rio de Janeiro.¹⁵⁵

Proyek modernisasi helikopter Angkatan Udara Brasil (FAB) selanjutnya adalah H-60. H-60 adalah proyek akuisisi helikopter kelas angkut menengah *Black Hawk* untuk menggantikan helikopter UH-1H yang sebelumnya digunakan dalam memperkuat pertahanan udara.¹⁵⁶ Pada September 2008, pemerintah Brasil mengumumkan akan membeli helikopter angkut menengah hingga UH-60 L *Black Hawk* 15 unit dari perusahaan helikopter asal Amerika Serikat Sikorsky dengan nilai kontrak sebesar 525 juta US\$.¹⁵⁷ Sebulan kemudian enam unit helikopter UH-60 L *Black Hawk* diterima oleh Skuadron 7/8 Harpias Angkatan Udara Brasil (FAB) di wilayah Manaus. Sementara pada tahun 2011 Skuadron 5/8 yang bermarkas di Pangkalan Udara Santa Maria di dekat wilayah selatan perbatasan dengan Uruguay menerima delapan unit helikopter UH-60 L *Black Hawk* menggantikan helikopter UH-1H. Satu helikopter digunakan untuk keperluan SAR dan bantuan kebencanaan yang dioperasikan Skuadron 4 Angkatan Darat Brasil (EB).¹⁵⁸

Mengenai Spesifikasi, UH-60 L *Black Hawk* pada dasarnya merupakan helikopter angkut dengan kemampuan sekunder sebagai helikopter serang. Helikopter *UH-60 L Black Hawk* memiliki daya jelajah sejauh 592 km dengan kecepatan 278 hingga 295 km/jam, dan ketinggian terbang maksimum mencapai 3.200 hingga 5.790 meter serta beban maksimum tinggal landas sebesar sembilan ton.¹⁵⁹ Sebagai helikopter dengan kemampuan sekunder sebagai helikopter serang, UH-60 L *Black Hawk* dapat dilengkapi dengan berbagai perangkat persenjataan seperti senapan mesin serta kombinasi antara peluncur roket, peluru kendali anti-tank dan tangki bahan bakar tambahan.¹⁶⁰

¹⁵⁵Defense Industry Daily. 2012. "Brazil's \$1B+ Order for EC725 Cougar Helicopters". *Loc. Cit.*

¹⁵⁶ Brazilian Government. 2012. *Op. Cit.* Hal. 204

¹⁵⁷Defense Industry Daily. 2012. "Brazil Buys UH-60 L Black Hawk".

<http://www.defenseindustrydaily.com/brazil-requests-6-uh-60ls-for-300m-03418/> (Diakses pada: 16 November 2014)

¹⁵⁸ *ibid.*

¹⁵⁹ Pimpinan Redaksi. 2013. "Apache, Black Hawk dan Kemandirian Alutsista". *Defender*. Edisi 66/2013. Hal.17

¹⁶⁰ *Ibid.* Hal.16

Selain kedua proyek tersebut, Angkatan Udara Brasil (FAB) juga memiliki proyek akuisisi helikopter serbu yang selanjutnya disebut dengan proyek AH-X. Pada November 2008 Pemerintah Brasil menandatangani kontrak kerjasama dengan pemerintah Rusia akuisisi 12 helikopter serbu MI-35 atau AH-2 Sabre dalam proyek AH-X yang telah dikirim melalui beberapa gelombang (*batch*). Nilai kontrak dari proyek akuisisi helikopter serbu tersebut sebesar 300 juta US\$. Tiga unit MI-35 atau AH-2 Sabre telah dikirim pihak Rusia di pangkalan udara Porto Velho, Amazon bagian Barat dekat perbatasan Bolivia bagian Utara.¹⁶¹ Selanjutnya pengiriman helikopter tersebut akan dilakukan dalam tiga gelombang (*batch*) yakni pada Juli 2010, April 2011 dan Februari 2012.¹⁶² Perakitan helikopter MI-35 akan dilakukan di Brasil melalui perusahaan Elbit's Brazilian.

Spesifikasi dari helikopter MI-35 selain sebagai helikopter serbu juga dapat digunakan sebagai helikopter pengangkut personel. Sebagai helikopter serbu MI-35 dilengkapi sistem persenjataan yang cukup memadai mulai dari senapan mesin GSh-23V 23mm *Cannon Mounted*, roket, misil anti-tank *Ataka* hingga misil udara *Igla-V*¹⁶³. Helikopter MI-35 memiliki kecepatan maksimum hingga 310 km/jam dengan jarak jelajah 435 kilometer serta mengangkut sepuluh personel (dua pilot dan *co-pilot*). Berat helikopter pada saat tinggal landas adalah 11.5 ton dan panjang sekitar 17 meter dan tinggi 6.5 meter.¹⁶⁴

¹⁶¹ Defense Industry Daily. 2013. "Mi-35M Wins Brazilian Attack Helicopter Competition". <http://www.defenseindustrydaily.com/mi-35m-wins-brazilian-attack-helicopter-competition-05180/> (Diakses pada: 17 November 2014)

¹⁶² Milavia. 2012. "Brazilian Air Force Formally Inducts New Mi-35 into Service as AH-2 Sabre". <http://www.milavia.net/news/2010/brazilian-air-force-formally-inducts-new-mi-35-into-service-as-ah-2-sabre.html> (Diakses pada: 16 November 2014)

¹⁶³ Army Recognition. 2013. "Russia Completes the Delivery of 12 Mi-35AH 2 Sabre Attack Helicopters to Brazilian Army". http://www.armyrecognition.com/laad_2013_news_coverage_report_pictures_video/russia_completes_delivery_12_mi-35_ah2_sabre_attack_helicopters_to_brazilian_armed_forces_1404133.html (Diakses pada: 17 November 2014)

¹⁶⁴ Zaal Tchkuaseli. 2014. "MI-35: Attack Helicopter". http://www.military-today.com/helicopters/mi_35m.htm (Diakses pada: 17 November 2014)

3.4.3 Proyek KC-X2: Akuisisi dan Modernisasi Pesawat Angkut Militer

Pesawat militer Angkatan Udara Brasil (FAB) yang juga dimodernisasi adalah pesawat angkut jet medium (*transport aircraft*). Sebagaimana telah disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan Brasil tahun 2012, proyek tersebut bertujuan untuk mengganti pesawat angkut KC-137 yang telah digunakan sebelumnya¹⁶⁵. Pesawat pengganti dari KC-137 adalah KC-390 produksi perusahaan pesawat dalam negeri Brasil Embraer. Pesawat tersebut memiliki kelebihan selain sebagai pengangkut personil dan perlengkapan militer juga dapat berfungsi sebagai pesawat tanker bahan bakar. KC-390 memiliki berat 81 ton yang mampu membawa kargo 23 ton serta 80 personil. Pada tahun 2010 Angkatan Udara Brasil (FAB) mengumumkan akan membeli 28 unit KC-390 dari Embraer dengan nilai kontrak dana 1.5 milyar US\$.¹⁶⁶

Dalam proyek pengembangan pesawat KC-390 tersebut, perusahaan pesawat dalam negeri Brasil Embraer bekerjasama dengan perusahaan pesawat asal Amerika Serikat Boeing. Pengembangan dilakukan dengan mengkonversi pesawat komersial Boeing 767-300 ER menjadi pesawat angkut militer dengan fungsi strategis seperti evakuasi medis, angkut personil dan pengisian bahan bakar.¹⁶⁷ Pada tahun 2012, Embraer telah menetapkan mengenai desain KC-390. KC-137 mulai diproduksi pada dekade 1960-an dan mulai digunakan oleh Angkatan Udara Brasil (FAB) mulai tahun 1986. Sementara pengganti KC-137 yaitu KC-390 akan melakukan penerbangan perdana pada tahun 2014 dan digunakan Angkatan Udara Brasil pada tahun 2016. KC-390 dilengkapi dengan dua mesin turbofan V2500 dan mampu terbang hingga sejauh 2.000 *nautical* mil.

¹⁶⁵ Brazilian Government. 2012. *Op. Cit.* Hal. 204

¹⁶⁶ Pimpinan Redaksi. "Pesawat Angkut Militer Makin Diminati". *Op. Cit.* Hal.56

¹⁶⁷UPI. 2013. "IAI wins Brazilian KC-X competition".

http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2013/03/15/IAI-wins-Brazilian-KC-X-competition/UPI-98451363366032/ (Diakses pada: 17 November 2014)

BAB IV

KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER BRASIL

4.1 Menjaga Kedaulatan Nasional Brasil

Pada bab ini penulis menguraikan analisis mengenai argumen utama terkait alasan pemerintah Brasil meningkatkan kapabilitas militernya. Adapun argumen pertama peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh pemerintah Brasil pada masa pemerintahan Presiden Luis Inacio Lula da Silva dan Presiden Dilma Rousseff adalah bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara Brasil. Sebagai negara dengan wilayah terluas di Amerika Selatan, tingkat ancaman bagi Brasil pun cukup besar pula. Bab ini menguraikan bagaimana ancaman dapat berpengaruh terhadap kedaulatan negara, khususnya Brasil sebagai objek kajian penelitian dalam karya ilmiah ini. Dari ancaman tersebut, maka Pemerintah Brasil membuat suatu kebijakan nasional untuk menjaga dan melindungi kedaulatan nasional. Namun sebelum menganalisis dari argumen pertama, penulis memaparkan mengenai hakikat kedaulatan nasional dan ancaman kedaulatan nasional Brasil secara terperinci.

4.1.1 Hakikat Kedaulatan Nasional

Menurut Jean Bodin sebagaimana yang dikutip oleh Gabriella Slomp, menjelaskan bahwa kedaulatan bersifat permanen dengan kata lain kedaulatan akan tetap ada selama negara itu berdiri, tidak berasal dari kekuasaan lain, absolut atau tidak dapat dibagi-bagi dengan artian bahwa kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan tidak dibatasi oleh siapapun. Sementara itu, menurut Thomas Hobbes dalam kedaulatan diperlukan adanya suatu perlindungan terhadap warga negara guna menciptakan perdamaian.¹⁶⁸

Baik pandangan Jean Bodin maupun Thomas Hobbes mengenai kedaulatan, keduanya memiliki persamaan persepsi mengenai fungsi kedaulatan. Menurut keduanya, fungsi utama dari kedaulatan adalah melindungi warga negara

¹⁶⁸ Gabriella Slomp. 2008. *On Sovereignty* dalam Trevor C. Salmon. 2008. *Issues in International Relation, Second Edition*. New York: Routledge Taylor and Francis Group. Hal. 35

dari ancaman yang berasal dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal).¹⁶⁹ Bagi kaum neorealis sebagaimana diungkapkan oleh Kenneth Waltz, menyatakan bahwa suatu negara berdiri atas dasar kedaulatan. Hal tersebut memiliki pengertian bahwa setiap negara memiliki cara tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah internal dan eksternalnya.¹⁷⁰

Kedaulatan sendiri berdasarkan sifatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Sebagaimana Gabriella Slomp dalam *On Sovereignty* mengutip Evans dan Newnham, kedaulatan internal memiliki pengertian kekuasaan tertinggi berada pada negara disamping warga negara dalam batas-batas teritori atau wilayah negara. Sementara kedaulatan eksternal memiliki pengertian bahwa pada dasarnya negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam hubungan internasional dan tidak ada otoritas tertinggi dari negara tersebut.¹⁷¹ Hal senada juga diungkapkan oleh Kenneth Waltz yang menyatakan bahwa masing-masing negara secara formal sama terhadap yang lain, tidak ada yang berhak memerintah dan tak ada yang perlu dipatuhi.¹⁷²

4.1.2 Ancaman Kedaulatan Nasional bagi Brasil

Pada Bab II sebelumnya telah diuraikan secara singkat mengenai ancaman kedaulatan nasional Brasil. Ancaman tersebut diantaranya adalah terorisme serta kejahatan transnasional. Pada bagian ini penulis menguraikan kembali secara terperinci ancaman tersebut. Ancaman pertama terkait terorisme bagi Brasil adalah keberadaan para gerilyawan yang tergabung dalam Tentara Revolusioner Kolombia atau *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC). Dalam wilayah operasionalnya, FARC terdiri dari beberapa wilayah yang disebut dengan

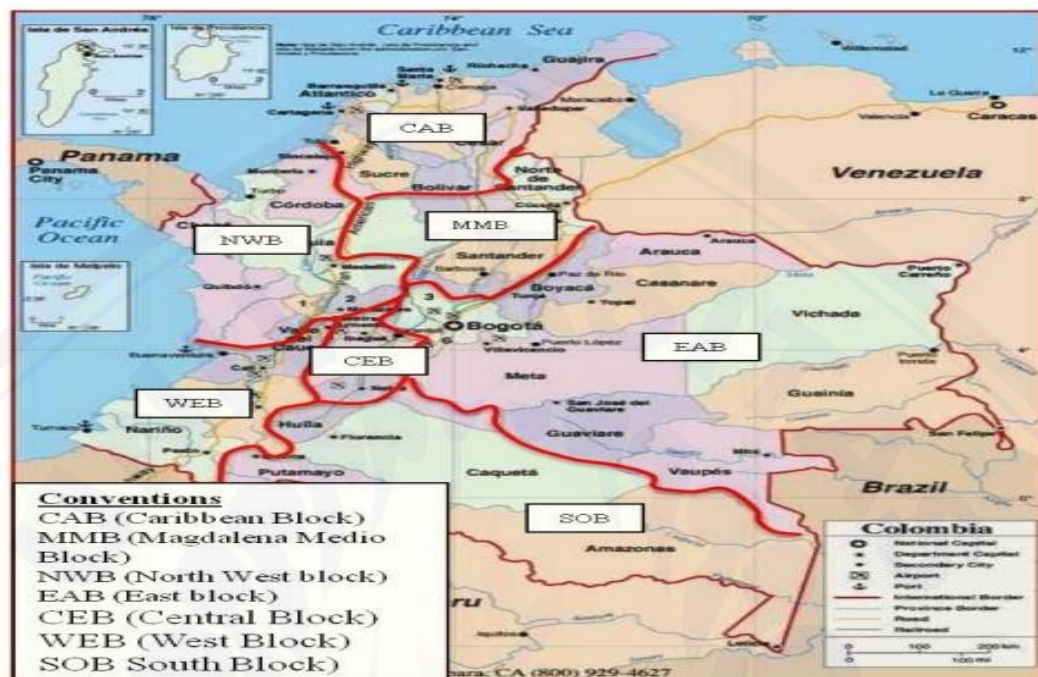
¹⁶⁹ *Ibid.*, Hal. 37-38

¹⁷⁰ Kenneth Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hill. Hal. 96 dalam Robert Jackson & Georg Sorensen. *Op Cit.* Hal.114

¹⁷¹ Evans and Newnham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books. Hal. 504 dalam Trevor C. Salmon. *Op Cit.* Hal. 40

¹⁷² Kenneth Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. *Op Cit.* Hal. 88 dalam Robert Jackson & Georg Sorensen. *Op Cit.* Hal.114

Blok seperti pada Gambar 4.1. Blok inilah merupakan wilayah atau ruang gerak dari FARC di Kolombia.



Gambar 4.1: Wilayah Operasi FARC di Kolombia

Sumber: *Colombian Army Staff College* dalam Gerson Rolim da Silva. 2013. *FARC's Influences in Brazil*. Hal. 28

Dari Gambar 4.1 tersebut salah satu potensi ancaman bagi Brasil dari FARC ialah Blok Timur atau *East Block* (EAB) dan Blok Selatan atau *South Block* (SAB). Pada Blok tersebut FARC melakukan penyelundupan obat-obatan terlarang dan senjata ilegal. Penyelundupan senjata ilegal oleh para gerilyawan ialah mulai senjata ringan seperti senapan hingga senjata berat seperti tank ringan, sistem radar dan bagian dari peralatan senjata nuklir serta sistem persenjataan udara.¹⁷³ FARC mulai memasuki kawasan perbatasan Brasil kembali sejak awal tahun 2000-an pasca serangan di tahun 1991. Berdasarkan laporan dari komando militer Brasil di wilayah Amazon, pada tahun 2004 FARC merencanakan serangan terhadap militer Brasil perbatasan antara Kolombia dengan Brasil

¹⁷³ Alvaro de Souza Pinheiro. 2006. "Narcoterorism in Latin America: A Brazilian Perspective". *JSOU Report 06-4 April 2006*. The JSOU Press: Florida. Hal.15

sepanjang 1.600 kilometer.¹⁷⁴ Pada waktu yang sama, satelit milik Kementerian Pertahanan Brasil mengidentifikasi keberadaan gerilyawan di sekitar wilayah hutan Amazon. Menanggapi hal tersebut, Komando Militer Amazon menyebutkan terdapat 160 pria dan wanita gerilyawan di wilayah Jurupari.¹⁷⁵

Selain fakta pada paragraf diatas, dalam perkembangannya terdapat dua front gerilya FARC yang berada di kawasan perbatasan Brasil. Kedua front tersebut yakni Front 1 dan Front 16 memiliki gerilyawan yang cukup besar dari segi jumlah personil. Keduanya berada di wilayah Sao Gabriel da Chacoiera yang termasuk dalam wilayah negara bagian Amazonas. Front 1 yang berjumlah 447 gerilyawan dan front 16 yang berjumlah 2.853 gerilyawan termasuk dalam wilayah operasi Blok Timur (EAB) dari FARC (lihat Gambar 4.1)¹⁷⁶. Letak wilayah kamp gerilya Front 1 tidak jauh dari keberadaan pos penjagaan militer Brasil di wilayah Querari yang hanya berjarak 30 kilometer, dalam kamp tersebut terdiri atas sekitar 300 orang gerilyawan. Sementara Front 16 yang merupakan salah satu wilayah Front FARC terletak di wilayah Cucui. Wilayah tersebut juga berdekatan dengan pos penjagaan detasemen militer Brasil di Mitu yang hanya berjarak 50 kilometer.

Dalam struktur FARC, Front 16 adalah front gerilya yang sangat vital karena front inilah yang bertanggungjawab atas pendanaan dan bisnis ilegal FARC.¹⁷⁷ Pendanaan yang diperoleh dari FARC berasal dari penyelundupan senjata serta penjualan obat-obatan. Penyelundupan senjata dan obat-obatan ilegal seperti kokain melewati wilayah hutan Amazon yang sebagian besar berada dalam wilayah kedaulatan Brasil. Dari pemaparan data-data tersebut, penulis berkesimpulan bahwa keberadaan FARC merupakan salah satu ancaman potensial terbesar bagi kedaulatan nasional Brasil. Selain menimbulkan kerugian baik dari segi materi maupun segi lain seperti segi ekonomi, keberadaan FARC juga

¹⁷⁴ Gerson Rolim da Silva. 2013. *FARC's Influences in Brazil*. Kansas: School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth. Thesis. Hal. 31

¹⁷⁵ *Ibid.*

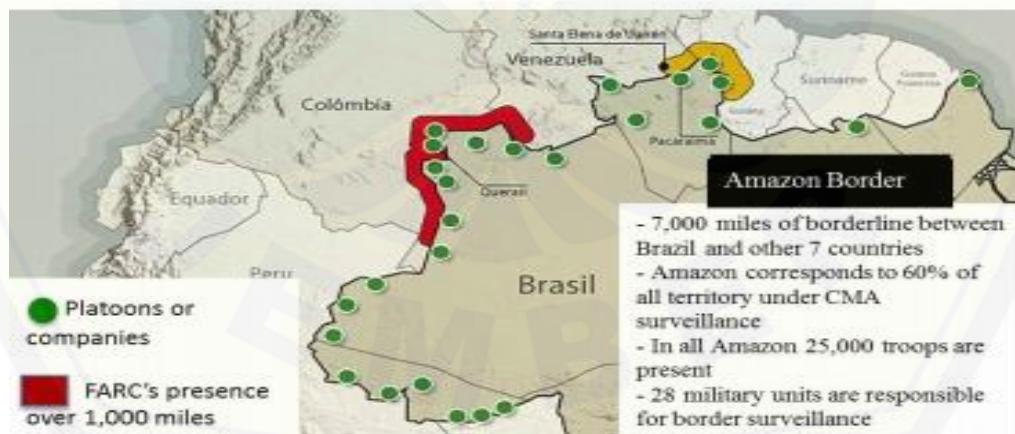
¹⁷⁶ Colombian Armed Forces. 2010 "*Informacion sobre el enemigo, Apreciacion de Inteligencia,*" Comando General de las Fuerzas Militares, Anexo Inteligencia. Bogota, Colombia. dalam *Ibid.* Hal. 40

¹⁷⁷ *Ibid.* Hal. 41

menimbulkan kerugian lain. Kerugian tersebut diantaranya dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan kawasan Amerika Selatan, khususnya di wilayah perbatasan antara Brasil dengan Kolombia serta kepentingan nasional Brasil.

4.1.3 Respon Brasil terhadap Ancaman Kedaulatan Negara

Mengingat FARC merupakan salah satu ancaman potensial bagi kedaulatan nasional Brasil, Pemerintah Brasil melakukan langkah-langkah dalam menghadapi gerilyawan FARC. Adapun langkah tersebut diantaranya ialah memperkuat keberadaan militer di sekitar wilayah Amazon dan melaksanakan operasi militer yang melibatkan satuan militer serta kepolisian Brasil. Langkah Brasil untuk mengamankan wilayah Amazon menjadi prioritas dalam dokumen *National Defense Strategy* tahun 2008. Langkah tersebut dilakukan dengan memfokuskan penyebaran militer ke wilayah tenggara dan selatan Brasil.¹⁷⁸ Sebelumnya Brasil juga memiliki program *Calha Notre* yang berfokus pada pengamanan wilayah Amazon. Program tersebut dicanangkan pada tahun 1985, dengan menempatkan militer di wilayah perbatasan yang dinilai rawan terhadap gerilyawan FARC dari tahun 2003 hingga 2009 dibawah Komando Militer Amazon (CMA).¹⁷⁹ Mengenai penyebaran militer dalam program *Calha Notre* dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.2 : Persebaran Militer Brasil dalam Program *Calha Notre*

Sumber: *Na Fronteira com as FARC*,” Epoca Magazine, edition 502 dalam Gerson Rolim da Silva. 2013. *FARC’s Influences in Brazil*. Hal. 43

¹⁷⁸ Ministry of Defense. *Op.Cit.* Hal.13

¹⁷⁹ Gerson Rolim da Silva. *Op. Cit* Hal.42-44

Dari Gambar 4.2 tersebut dapat dilihat penyebaran militer tersebut berada di tujuh wilayah negara bagian dengan total pasukan berjumlah 25.000 personil terdiri dari 28 unit militer. Dengan dikeluarkannya dokumen *National Defense Strategy* tahun 2008, penulis melihat bahwa penempatan militer di wilayah selatan dan tenggara Brasil dilakukan untuk melengkapi program *Calha Notre*. Jika program *Calha Notre* hanya difokuskan untuk wilayah utara dan barat Brasil, maka melalui dokumen tahun 2008 tersebut pemerintah Brasil juga memandang wilayah selatan dan tenggara merupakan prioritas dalam menjaga kedaulatan nasional. Mengingat sebelumnya wilayah selatan dan tenggara kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Brasil.

Selain menempatkan militer di wilayah perbatasan, Pemerintah Brasil juga melaksanakan operasi militer dalam mencegah tindakan kekerasan dan penyelundupan yang dilakukan oleh kelompok FARC. Operasi militer yang dilakukan oleh Brasil adalah Operasi Poraque tahun 2008 dan Operasi Agatha dari 2011 hingga tahun 2013. Operasi Poraque bertujuan untuk memperkuat militer Brasil dalam menghadapi konflik di wilayah Amazon. Sementara Operasi Agatha bertujuan untuk mencegah tindakan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok teroris maupun gerilyawan FARC.¹⁸⁰ Selain melibatkan militer, operasi tersebut juga melibatkan penegak hukum lain di Brasil seperti Polisi Federal.¹⁸¹ Operasi Agatha melibatkan sekitar 27.000 personil dan sarana tempur militer seperti APC, pesawat tempur serta kapal tempur. Tabel 4.1 berikut menunjukkan rincian mengenai operasi Agatha yang dilaksanakan dari tahun 2011 hingga 2012:

¹⁸⁰ *Ibid* Hal.46

¹⁸¹ Brazilian Ministry of Defense, “Operações em Andamento”, <https://www.defesa.gov.br/index.php/operacoes-em-andamento> dalam *Ibid*.

Tabel 4.1 Wilayah Operasi Agatha

No	Operasi	Wilayah Operasi	Perbatasan
1	Agatha I	Amazon	Kolombia, Peru dan Venezuela
2	Agatha II	Rio Grande do Sul, Parana, Santa Catarina	Argentina, Paraguay, dan Uruguay
3	Agatha III	Matto Grosso do Sul, Matto Grosso, Rondonia, Acre dan Amazon	Bolivia, Kolombia, Paraguay, Venezuela, dan Peru
4	Agatha IV	Amapa, Para, Roraima, dan Amazon	Paraguay, Guyana Perancis, Guyana, Venezuela, Peru dan Suriname
5	Agatha V	Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, dan Mato Grosso do Sul	Argentina, Bolivia, Paraguay, dan Uruguay

Sumber: Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL. Hal 156

Dari pemaparan Tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa Brasil memiliki komitmen yang serius dalam menjaga ancaman eksternal terkait kedaulatan negara, terutama di wilayah perbatasan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pengalokasian kekuatan militer baik dari segi alat utama sistem persenjataan dan segi personel dalam Operasi Agatha seperti dijelaskan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Personil dan Peralatan Tempur Operasi Agatha

No	Armada Tempur	2011	2011	2011	2012	Total
		Agatha I	Agatha II	Agatha III	Agatha IV	
1	Personil Militer	3.044	8.705	7.146	8.494	27.389
2	Kapal Tempur	5	6	10	7	28
3	Kapal Kecil	50	60	123	57	290
4	Kendaraan Militer	43	64	203	65	375
5	Pesawat Tempur	23	29	47	24	123
6	Jam Terbang	587	1.324	1.499	785	4.195

Sumber: Paz Tibbileti and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: RESDAL. Hal. 156

Operasi Agatha sendiri dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan No. 7496 tahun 2011. Selain Operasi Agatha, pemerintah Brasil juga mencanangkan program pendukung yakni Sistem Monitoring Perbatasan atau *Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras* (SISFRON). Pelaksanaan program SISFRON dilakukan oleh Angkatan Darat Brasil (EB) melalui program Sistem Pengawasan Amazon atau *Sistema de Vigilância da Amazônia* (SIVAM). Dalam pelaksanaan SIVAM terdiri atas enam satelit, 18 pesawat tempur, 25 radar yang meliputi wilayah pengawasan seluas 5,2 juta kilometer persegi.¹⁸² Dengan demikian diharapkan militer Brasil mampu menjaga wilayah kedaulatan nasional di segi pertahanan darat dari berbagai ancaman eksternal yang datang, terutama ancaman gerilyawan FARC.

4.2 Membangun Kembali Industri Pertahanan Brasil

Tujuan kedua dari peningkatan kapabilitas militer Brasil adalah untuk membangun kembali industri pertahanan. Hal tersebut tercantum dalam dokumen *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil* tahun 2008 pada bagian *Reorganization of National Defense Industry: Independent Technological Development*. Bagian tersebut terdiri dari panduan meliputi tujuan, permasalahan anggaran serta operasionalisasi pembangunan industri pertahanan Brasil. Dalam pelaksanaannya, pembangunan industri pertahanan Brasil sempat mengalami tarik ulur pada tataran birokrasi antara pihak militer dengan pihak eksekutif (dalam hal ini presiden dan Kementerian terkait) mengenai mitra kerjasama.

4.2.1 Hakikat Industri Pertahanan Nasional

Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai hakikat dari industri pertahanan nasional suatu negara. Tujuan suatu negara melakukan industrialisasi di bidang pertahanan adalah untuk membangun kemampuan pertahanan yang berkelanjutan. Selain itu tujuan industri pertahanan ialah membantu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor nasional sebagai sarana diplomasi dan kerjasama

¹⁸² *Ibid.*, Hal. 48

dalam bidang pertahanan dan keamanan.¹⁸³ Langkah untuk membangun industri pertahanan suatu negara diantaranya dengan:¹⁸⁴

1. Memenuhi sebagian kebutuhan sendiri dengan produksi atas dasar lisensi.
Langkah dari poin pertama ini dilakukan untuk menghemat biaya investasi dan juga meningkatkan kemampuan industri nasional. Langkah ini juga disebut dengan alih teknologi (*transfer of technology*).
2. Memenuhi kebutuhan sendiri (*self-sufficiency*) dan untuk ekspor.
Keuntungan dari langkah tersebut adalah adanya kebebasan dalam menentukan sendiri tingkat kemampuan pertahanan, baik dari aspek strategis maupun aspek teknik serta teknologi. Langkah ini bisa dilakukan oleh negara yang memiliki tingkat perekonomian, keuangan dan industri yang kuat selain kemampuan di bidang pengetahuan dan teknologi.
3. Melakukan kerjasama dengan negara lain dalam proyek bersama (*cooperative projects*) atau disebut juga dengan kerjasama pertahanan.
Meningkat besarnya anggaran yang diperlukan dalam membangun industri pertahanan, tidak jarang membuat negara melakukan kerjasama dengan negara lain dalam hal pengembangan. Langkah ini biasanya dilakukan oleh negara-negara menengah secara ekonomi dengan kemampuan teknologi yang cukup canggih.
4. Bertujuan ekspor.
Langkah pada poin keempat ini memiliki tujuan jangka panjang, yakni untuk mempertahankan kelangsungan hidup bagi industri pertahanan itu sendiri. Selain itu, bertujuan untuk memelihara penguasaan dan keunggulan teknologi persenjataan. Semakin banyak alutsista yang diekspor maka semakin tinggi pula kemampuan sumber daya suatu negara dalam membangun industri pertahanan.

¹⁸³ A. Hasnan Habib. 1997. *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. Hal.114

¹⁸⁴ Frank B. Horton. 1974. *Comparative Defense Policy*. Baltimore: John Hopkins University Press. Hal. 412-425 dalam *ibid*.

Dalam membangun industri pertahanan negara memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu. Prasyarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸⁵

1. Motif pembangunan industri pertahanan harus jelas
2. Komitmen penuh dari pemerintah secara berkesinambungan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pembangunan industri pertahanan bukanlah kebijakan jangka pendek. Komitmen pemerintah tersebut dapat diwujudkan berupa adanya kebijakan politik, pembangunan sarana dan prasarana, serta adanya anggaran yang memadai.
3. Faktor fasilitas yang meliputi sumber daya yang memadai, perekonomian negara yang kuat serta anggaran penelitian di bidang teknologi persenjataan yang memadai.

4.2.2 Industri Pertahanan Brasil

Dalam *National Defense Strategy* tahun 2008, pembangunan terhadap industri pertahanan nasional Brasil juga menjadi salah satu isu yang dibahas. Mengenai mekanisme manajemen pelaksanaan pembangunan industri pertahanan, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.¹⁸⁶ Apabila melihat tujuan utama dari pembangunan industri pertahanan Brasil seperti yang tertuang dalam *National Defense Strategy* tahun 2008 adalah untuk memacu pertumbuhan industri dan untuk tujuan ekspor.¹⁸⁷ Saat ini Brasil memiliki pangsa pasar industri pertahanan yang cukup besar, terutama di wilayah Asia dan Amerika Selatan. Produk industri pertahanan Brasil yang memasuki pasar ekspor diantaranya jenis pesawat latih militer *Super Tucano* yang diproduksi oleh perusahaan EMBRAER dan Peluncur Roket Multilaras (MLRS) ASTROS yang diproduksi oleh perusahaan AVIBRAS. Selain kedua perusahaan bidang pertahanan tersebut terdapat pula perusahaan pertahanan yang bergerak dibidang industri angkatan laut EMEGPRON dan AMAZUL serta IMBEL

¹⁸⁵ *Ibid.*, Hal.117-118

¹⁸⁶ Ministry of Defense. *Op. Cit.* Hal.54

¹⁸⁷ *Ibid.*

dibidang industri angkatan darat.¹⁸⁸ Ekspor pesawat latih militer *Super Tucano* selama tahun 2008 hingga 2013 tercatat sebagai berikut:¹⁸⁹

- Chile mengakuisisi 12 unit *Super Tucano* selama tahun 2008 hingga 2009
- Kolombia mengakuisisi 25 unit *Super Tucano* selama tahun 2009
- Republik Dominika mengakuisisi delapan unit *Super Tucano* selama tahun 2009
- Ekuador mengakuisisi 24 unit *Super Tucano* selama tahun 2009
- Indonesia mengakuisisi 16 unit *Super Tucano* selama tahun 2011 hingga 2012
- Angola, Burkina Faso, dan Mauritania di tahun 2012 juga mengakuisisi *Super Tucano* sejumlah enam unit
- Awal tahun 2013 Afghanistan mengakuisisi 20 unit, Guatemala enam unit dan Senegal sejumlah tiga unit.

Untuk melaksanakan tujuan dari industri pertahanan, khususnya untuk ekspor diperlukan adanya komitmen yang serius dari pemerintah secara berkesinambungan. Langkah tersebut ditindaklanjuti Pemerintah Brasil dengan mengeluarkan Undang-undang No.12.598 tahun 2012 mengenai standar akuisisi, pengembangan produk dan sistem pertahanan.¹⁹⁰ Undang-undang tahun 2012 melengkapi undang-undang sebelumnya mengenai industri pertahanan tahun 2000, 2002, dan tahun 2005.

Karena didalam pembangunan industri pertahanan membutuhkan anggaran yang sangat besar, maka diperlukan adanya *cooperative project* atau kerjasama pertahanan dengan negara lain dan transfer teknologi guna efisiensi anggaran. Dalam hal ini, Pemerintah Brasil melakukan *cooperative project* dan transfer teknologi dalam pengembangan industri pertahanan. Langkah tersebut dilakukan pemerintah Brasil mengingat dalam dokumen *National Defense Strategy* tahun 2008, terdapat beberapa program pembangunan yang memerlukan anggaran cukup besar seperti yang telah penulis paparkan pada Bab III. Program tersebut

¹⁸⁸ Tibbileti, Paz and Marcela Donadio. *Op Cit.* Hal.155

¹⁸⁹ Greg Goebel. 2013. "The EMBRAER Tucano and Super Tucano"
<http://www.airvectors.net/avtucano.html> (Diakses pada: 17 April 2015)r

¹⁹⁰ Tibbileti, Paz and Marcela Donadio. *Op Cit.* Hal.155

diantaranya pengembangan pesawat tempur dan pesawat transport militer, kapal selam konvensional dan kapal selam nuklir, kendaraan tempur, misil, helikopter tempur dan sebagainya.¹⁹¹ Terdapat beberapa negara mitra dalam pembangunan industri pertahanan Brasil seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Swedia. Namun, didalam menentukan mengenai mitra *cooperative project* terjadi tarik ulur yang menjadi perhatian penulis dalam bagian analisis karya ilmiah ini.

4.3 Sebagai Respon Terhadap Kehadiran Militer Amerika Serikat di Kawasan Amerika Selatan

Argumen utama selanjutnya dalam karya ilmiah ini adalah sebagai respon Brasil atas kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan. Sejarah kehadiran militer Amerika Serikat ditandai dengan dikeluarkannya Doktrin Monroe (*Monroe Doctrine*) tahun 1823 oleh Presiden Amerika Serikat saat itu James Monroe. Doktrin tersebut dikeluarkan sebagai respon terhadap politik di Eropa pasca era berakhirnya Perang Napoleon. Mengingat pasca Perang Napoleon, muncul kembali kekuatan baru yang dimotori oleh Kerajaan Inggris Raya terutama pada kekuatan angkatan laut.¹⁹² Fenomena tersebut menjadikan Amerika Serikat merasa cemas bahwa keberadaan rezim kolonialisme Eropa berimplikasi terhadap negara-negara Amerika Selatan. Mengingat kawasan Amerika Selatan menyediakan peluang bagi Amerika Serikat terutama mengenai ekonomi dan untuk menyebarkan pengaruhnya, namun disisi lain Amerika Selatan juga dapat menjadi ancaman bagi Amerika Serikat.¹⁹³

Penerapan Doktrin Monroe mulai kembali terlihat pada era Perang Dingin terutama di awal dekade 1960-an dibawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy, yang mulai memperhatikan kembali pentingnya Amerika Selatan bagi Amerika Serikat. Presiden Kennedy menyumbangkan dana dalam jumlah besar dengan dalih untuk kemajuan Amerika Selatan. Tahun 1965 Presiden Johnson

¹⁹¹ Ministry of Defense. *Op.Cit.* Hal.56

¹⁹² Mark T. Gilderhus. "The Monroe Doctrine: Meanings and Implications". *Presidential Studies Quarterly*. Vol.36, No.1, Presidential Doctrine (March.,2006) pp.51-16. :Blackwell Publishing. Hal.6-7

¹⁹³ *Ibid.*,Hal.9

menerapkan Doktrin Johnson yang mengacu pada Doktrin Monroe, doktrin tersebut dikeluarkan terhadap Amerika Selatan karena Amerika Serikat tidak menginginkan adanya kekuatan asing di bumi belahan Barat.¹⁹⁴ Kemudian pada akhir tahun 1982 Presiden Reagan berkunjung ke Brasil dalam rangka memberikan bantuan dana sekaligus melancarkan isu anti Soviet yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Usaha Reagan tersebut tidak menghasilkan sesuatu dan hanya ditanggapi secara dingin oleh Pemerintah Brasil saat itu karena adanya ketidakpercayaan Brasil terhadap Amerika Serikat.¹⁹⁵

Pada bagian ini penulis melihat bahwa bentuk kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan merupakan implementasi dari Doktrin Monroe (*Monroe Doctrine*) dalam mewujudkan *The American Dreams*. Untuk mewujudkan *The American Dreams* serta memperluas hegemoninya¹⁹⁶, Amerika Serikat membagi beberapa wilayah komando yang tersebar di seluruh belahan dunia. Komando militer Amerika Serikat tersebut yaitu:

1. *United States Northern Command* (USNORTHCOM) yang meliputi wilayah operasi Pasifik sebelah utara seperti Laut Bering, Alaska, Kepulauan Aleut dan sebagian wilayah Atlantik Utara
2. *United States Pacific Command* (USPACOM) dalam komando ini meliputi dua armada besar di Pasifik yaitu armada ketiga (*third fleet*) dan armada ketujuh (*seventh fleet*)
3. *United States Southern Command* (USSOUTHCOM) yang meliputi wilayah operasi perairan Karibia dan Atlantik Selatan

¹⁹⁴ Albertine Minderop. 2006. *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal.136

¹⁹⁵ *Ibid.*, Hal.167

¹⁹⁶ Hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno "*Eugemonia*", pada awalnya diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara kota (*polis*) secara individual misalnya yang dilakukan oleh Athena dan Sparta terhadap negara lain yang sejajar sebagaimana dikutip dalam Nezar Patria dan Andi Arief. 2009. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 115-116. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hegemoni adalah perluasan pengaruh atau kekuasaan suatu negara ke negara atau kawasan lain (lihat Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta: Putra A Bardin. Hal.204). Dalam konteks politik internasional saat ini, Amerika Serikat menjadi salah satu kekuatan hegemoni dunia.

4. *United States Central Command* (USCENTCOM) yang meliputi wilayah operasi Timur Tengah seperti Teluk Persia, Laut Merah, Laut Arab dan sebagian Laut India
5. *United States European Command* (USEUCOM) yang meliputi wilayah operasi di Eropa Utara
6. *United States Africa Command* (USAFRICOM) yang meliputi wilayah operasi di Afrika

Dari pemaparan diatas mengenai wilayah komando militer Amerika Serikat, kawasan Amerika Selatan berada dibawah komando USSOUTHCOM. Dua agenda besar yang menjadi fokus utama USSOUTHCOM, yaitu pembangunan pangkalan militer di Kolombia dan pengaktifan kembali armada keempat (*fourth fleet*) yang dimulai sejak tahun 2008. Pihak Amerika Serikat dan USSOUTHCOM berdalih kedua agenda tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan Amerika Selatan dari ancaman terorisme, dan kejahatan transnasional seperti peredaran obat-obatan terlarang dan senjata api ilegal.¹⁹⁷ Selain misi tersebut, misi kemanusiaan lain seperti penanggulangan bencana. Dalam perkembangannya, kedua agenda militer Amerika Serikat menuai kritikan dari sebagian negara-negara di kawasan Amerika Selatan termasuk Brasil.

4.3.1 Pembangunan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Kolombia

Sejarah awal pembangunan pangkalan militer di Kolombia dimulai sejak tahun 2000 yang dikenal dengan "*Plan Colombia*". Pada tahun 2004, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengusulkan kepada Kongres untuk menambah pasukan hingga 800 personil dan 600 kontraktor sipil. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh Otoritas Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2005.¹⁹⁸ Pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia semakin diperkuat

¹⁹⁷ SOUTHCOM. 2014. "USSOUTHCOM Main Mission". <http://www.southcom.mil/ourmissions/Pages/Our-Missions.aspx> (Diakses pada: 18 Desember 2014)

¹⁹⁸ Andre Feicert. 2005. "U.S. Military Operations in the Global War on Terrorism: Afghanistan, Africa, the Philippines, and Colombia". *CRS Report for Congress*. February 4, 2005. Hal.13-15

setelah adanya penandatanganan kerjasama pertahanan kedua negara tahun 2009.¹⁹⁹ Pihak Kolombia menyetujui rencana Amerika Serikat membangun tujuh pangkalan militer dengan dalih untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kolombia pada khususnya dan Amerika Selatan pada umumnya. Ketujuh pangkalan militer tersebut yaitu Cartagena dan Bahia Malaga yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, tiga pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat terletak di wilayah Malambo, Palanquero dan Apiay. Sementara dua pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat berada di wilayah Tolemaida dan Larandia.²⁰⁰ Gambar 4.3 berikut menjelaskan mengenai letak pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia.



Gambar 4.3 Pangkalan Militer Amerika Serikat di Kolombia

Sumber: John Lindsay Poland. 2010. "Military Bases Delegation in Colombia"
<http://forusa.org/john-lindsay-poland/military-bases-delegation-colombia>

Pembentukan pangkalan militer Amerika Serikat yang dimulai pada awal tahun 2000 dan hingga ditandatanganinya perjanjian kerjasama pertahanan Amerika Serikat-Kolombia atau *U.S.-Colombia Defense Cooperation Agreement*

¹⁹⁹ CNN. 2009. "Colombia, U.S Sign Deal on Uses of Bases".

<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/10/30/us.colombia.bases/index.html?iref=nextin>
(Diakses pada: 23 Desember 2014)

²⁰⁰ Leigh Wedenoja. 2010. "Briefing on Military Bases in Colombia". *ICPJ Intern*. Hal.01

(DCA) tahun 2009 menuai kecaman dari Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Lula da Silva menilai DCA dapat mengganggu kestabilan strategis di kawasan Amerika Selatan.²⁰¹ Selain mengganggu terhadap kestabilan strategis Amerika Selatan, Lula da Silva juga menilai bahwa DCA merupakan sebuah fondasi bagi hegemoni Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan.²⁰²

4.3.2 Pengaktifan Kembali Armada Keempat (*Fourth Fleet*) Angkatan Laut Amerika Serikat

Dalam militer Amerika Serikat, terutama bagi Angkatan Laut (*U.S Navy*) dikenal adanya konsep *Sea Power*. Konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi doktrin militer Angkatan Laut Amerika Serikat (*U.S Navy*). Konsep *Sea Power* muncul dari gagasan Alfred Mahan, seorang pakar geostrategi pada abad ke-19. Mahan berpendapat bahwa kekuatan laut merupakan kunci kekuatan luar negeri. Pendapat Mahan yang hingga saat ini menjadi landasan doktrin *U.S Navy* untuk menjalankan politik luar negeri Amerika Serikat adalah:²⁰³

1. Pendudukan Hawaii
2. Mengontrol Karibia
3. Membuat kanal penghubung antara Samudra Atlantik dan Pasifik
4. Menjauhkan peperangan dari pantai Amerika Serikat
5. Membentuk aliansi dalam membendung kekuatan lawan

Apabila kita melihat apa yang telah dikemukakan oleh Mahan tersebut, militer Amerika Serikat menggunakan USSOUTHCOM sebagai implementasi dari konsep *Sea Power* dalam menjalankan politik luar negerinya. Dalam hal mengontrol Karibia dan membuat kanal penghubung antara Samudra Atlantik dan Pasifik, Amerika Serikat mengaktifkan kembali armada keempat (*fourth fleet*) setelah 50 tahun pasca Perang Dunia. Pada 24 April 2008, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui situs resminya mengeluarkan *press release*

²⁰¹ Manuel Iglesias Cavicchioli. "U.S. Foreign Policy, The South American Integration, and The Case of The Military Bases in Colombia". *Revista Electrónica De Estudios Internacionales*. 15 May 2010. Hal.6

²⁰² *Ibid.* Hal.5

²⁰³ Daoed Joesoef. 2014. *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Hal. 65

nomor 338-07 tentang pengaktifan kembali armada keempat (*fourth fleet*). Dalam *press release* tersebut disebutkan bahwa armada keempat akan mulai aktif sejak tanggal 1 Juli 2008 dengan armada yang terdiri dari kapal selam, pesawat tempur dan beberapa kapal tempur. Kepala Satuan Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan bahwa keberadaan armada keempat bertujuan untuk mendukung stabilitas politik dan keamanan maritim di kawasan Karibia dan Amerika Selatan.²⁰⁴ Wilayah operasi armada keempat tersebut meliputi 31 negara dan 15 wilayah kedaulatan khusus sebagaimana yang tertera pada gambar 4.3. berikut:



Gambar 4.4: Wilayah Operasi *Fourth Fleet* dan Komando USSOUTHCOM

²⁰⁴ US Department of Defense. 2008. "Immediate Release: Navy Re-establishes U.S Fourth Fleet". <http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=11862> (Diakses pada: 18 Desember 2014)

Sumber: Telma Luzzani. 2008. "Resurrected U.S. Fourth Fleet Creates Suspicion Across South America".

<http://worldmeets.us/clarinar000007.shtml#ixzz3XSvbapAf>

Berdasarkan pada Gambar 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa rute dari armada keempat Amerika Serikat (*fourth fleet*) sebagian memasuki kedaulatan wilayah perairan Brasil. Wilayah perairan Brasil yang dilalui oleh armada keempat (*fourth fleet*) merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya mineral terutama minyak bumi. Seperti yang telah diuraikan pada bagian awal karya ilmiah ini, pada tahun 2007 perusahaan minyak Brasil Petrobras menemukan sumber minyak yang diperkirakan mampu mencapai 50 juta barel di wilayah Santos Basin. Melihat kondisi tersebut, Brasil merasa terancam akan pengaktifan kembali armada keempat (*fourth fleet*) yang disinyalir merupakan sebuah upaya dari Amerika Serikat beserta Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization*) atau NATO untuk menguasai salah satu sumber minyak terbesar di Amerika Selatan tersebut. Mengingat selain menjadi incaran Amerika Serikat, wilayah tersebut juga menjadi perhatian pihak Inggris dengan dalih untuk mengamankan Kepulauan Falkland (*British Channel*).²⁰⁵ Namun disatu sisi Amerika Serikat merasa juga berhak atas wilayah tersebut karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh terbesar dalam NATO.

4.3.3 Respon Brasil Terhadap Kehadiran Militer Amerika Serikat di Kawasan Amerika Selatan

Keberadaan militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan dalam perkembangannya memicu reaksi dari negara-negara kawasan, salah satu negara yang bereaksi atas tindakan tersebut adalah Brasil. Reaksi keras Brasil muncul dari petinggi Pemerintah Brasil seperti Presiden Lula da Silva, Menteri Pertahanan yang pada waktu itu masih dijabat oleh Nelson Jobim dan para Senator Brasil. Mereka menganggap keberadaan *fourth fleet* sebagai upaya Amerika Serikat untuk menguasai sumber energi minyak Brasil. Hal tersebut

²⁰⁵ Adriana Erthal Abdenur and Danilo Marcondes de Souza Neto. 2103. "Brazil's Maritime Strategy in the South Atlantic: The Nexus Between Security and Resources". *South African Institute of International Affairs*. Occasional Paper No 161-November 2013. Hal. 7

diungkapkan oleh Lula da Silva dalam pidatonya pada saat membuka wilayah pengeboran minyak baru di selatan Brasil, Ia mengatakan sebagai berikut:²⁰⁶

"The (Brazilian) Navy plays an important role in protecting our subsalt reserves, because the men of Fourth Fleet are almost there on top of the subsalt areas,"

Atas tindakan Amerika Serikat, Brasil berencana membentuk sebuah Dewan Pertahanan Amerika Selatan (*South American Defense Council*) bersama negara kawasan lainnya.²⁰⁷ Namun upaya pembentukan Dewan Pertahanan tersebut masih sebatas wacana. Salah satu upaya Brasil dalam membendung kekuatan armada keempat Amerika Serikat adalah dengan memperkuat poros maritim. Program penguatan poros maritim Brasil dilakukan dalam program *The Blue Amazon Project*. Program tersebut pada awalnya muncul pada tahun 2004 sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayah yurisdiksi perairan dan zona ekonomi eksklusif Brasil.

Dalam pelaksanaan kebijakan *The Blue Amazon Project*, Pemerintah Brasil mengembangkan kemampuan pengawasan melalui satelit dan radar jarak jauh dalam program *Blue Amazon Management System* (SisGAAz). Tujuan utama dari SisGAAz adalah untuk mengawasi wilayah sumber energi minyak di kawasan Amerika Selatan.²⁰⁸ Dari segi alat utama sistem persenjataan (alutsista), Pemerintah Brasil memiliki beberapa agenda dalam memodernisasi angkatan lautnya guna membendung kekuatan armada keempat Amerika Serikat. Seperti yang telah penulis uraikan pada Bab III, diantaranya akuisisi kapal selam baru termasuk satu diantaranya kapal selam nuklir. Selain memodernisasi kapal selam, Brasil juga memodernisasi kapal pengangkut pesawat ringan *Sao Paulo*, kapal militer tersebut termasuk dalam kapal induk ringan. Hingga saat ini tidak ada negara di Amerika Selatan yang mengoperasikan kapal pengangkut pesawat

²⁰⁶ Eric Walsh. 2008. *New fleet may mean U.S. covets Brazil's oil: Lula*. Loc. Cit

²⁰⁷ "Cristovam Cita Episódio da 4ª Frota dos EUA para Pedir Fortalecimento da Marinha Brasileira," Senado Federal, October 7, 2008, <http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=76845> dalam Jeffrey D. Maclay, et.al. 2009. *The Fourth Fleet: A Tool of U.S Engagement in the Americas*. Washington: Center for Strategic and International Studies (CSIS). Hal. 11-12

²⁰⁸ Adriana Erthal Abdenur and Danilo Marcondes de Souza Neto. *Op.Cit.* Hal.9

kecuali Brasil²⁰⁹. Selain memodernisasi alutsista sebagai sarana memperkuat poros maritim, dalam dokumen *National Defense Strategy* tahun 2008 Brasil juga mengkonsentrasikan kekuatan Angkatan Laut (MB) di wilayah Rio de Janeiro.²¹⁰

4.4 Sebagai Promosi Militer Brasil di Kawasan Amerika Selatan dan Dunia Internasional

Argumen utama selanjutnya dari peningkatan kapabilitas militer Brasil yang penulis kemukakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai sarana promosi militer Brasil dalam dunia internasional. Sebagai negara yang besar dengan pendapatan ekonomi yang tinggi di Amerika Selatan, Brasil ingin memainkan perannya di kawasan dan internasional. Salah satu tujuan utama Brasil adalah menjadi anggota tetap dalam Dewan Keamanan PBB (DK-PBB). Pada bagian ini penulis menggunakan konsep neoliberal-institusional untuk menganalisis upaya Brasil dalam upayanya menjadi anggota tetap DK-PBB.

Neoliberal-institusional berasumsi bahwa sifat anarkis dalam sistem internasional membatasi cara negara berinteraksi dan menyulitkan mereka untuk bekerjasama. Untuk itulah tidak jarang negara membentuk institusi internasional dengan tujuan mengatasi hambatan anarkis guna mencapai kerjasama dan mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan dari adanya institusi internasional tersebut.²¹¹ Lebih jauh Robert Keohane menjelaskan ada tiga alasan mengapa institusi internasional menjadi penting yaitu:²¹²

1. Ketika ada banyak poin kerjasama yang disepakati, institusi sering berperan sebagai titik sentral dengan memberikan pedoman tentang perilaku antar negara anggota
2. Institusi setelah dibentuk memiliki kehidupan sendiri yang akan mengikat dan merekatkan antar anggota

²⁰⁹ Michael E. Connors. 2005. *Tudo Pela Patria: The Brazilian Navy's Drive to Blue Water*. California: Naval Postgraduate School. Thesis. Hal.5

²¹⁰ Ministry of Defense. *Op.Cit.* Hal.14

²¹¹ Byungwoon Woo. 2013. *Rezim dan Organisasi Internasional* dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning. *Op.Cit.*,Hal.699

²¹² *Ibid.*,Hal.702

3. Institusi juga memberikan ruang untuk bermanuver terutama bagi negara-negara besar

Terkait efektivitas dari institusi internasional, John Mearsheimer berpendapat bahwa institusi internasional hanyalah refleksi dari kepentingan negara-negara kuat. Dalam hal ini setelah kepentingan negara kuat tersebut terpenuhi, maka institusi internasional tidak lagi berguna.²¹³ Artinya, negara memanfaatkan institusi internasional sebagai jalan untuk mencapai kepentingan dan tidak jarang sebagai sarana untuk menghegemoni negara lain yang lebih lemah.

4.4.1 Brasil dan Dewan Keamanan PBB

Sejarah Brasil dalam Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) dimulai pada tahun 1956. Pada tahun tersebut Brasil mengirim batalion infanteri dalam misi perdamaian PBB *First UN Emergency Force* (UNEF I) di Semenanjung Sinai. Tahun berikutnya Brasil mulai turut aktif dalam misi perdamaian PBB lainnya, seperti tergabung dalam misi PBB di Kongo atau (ONUC), Guinea Barat (UNSF), Siprus (UNFICYP), Republik Dominika (DOMREP), dan India-Pakistan (UNIPOM).²¹⁴ Pada era Perang Dingin dan selama era otoritarian Brasil tahun 1964 hingga 1985, Brasil menarik diri dari misi perdamaian yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB (DK-PBB). Selanjutnya, pasca era Perang Dingin pada tahun 1990 hingga 2002 Brasil kembali aktif berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB. Tercatat pada tahun-tahun tersebut Brasil berpartisipasi dalam 20 misi perdamaian dari 40 misi yang diselenggarakan PBB.²¹⁵ Misi perdamaian tersebut diantaranya dua misi di Timor Timur, *International Force for East Timor* (INTERFET) tahun 1999 dan *UN Mission of Support to East Timor* (UNMISSET) tahun 2002.

Peran serta Brasil dalam misi perdamaian PBB semakin meningkat sejak Luiz Inacio Lula da Silva menjabat sebagai presiden di tahun 2003 hingga 2010.

²¹³ *Ibid.*, Hal.703

²¹⁴ Rita Santos and Teresa Almeida Cravo. 2014. "Brazil's Rising Profile in United Nations Peacekeeping Operation Since the End of the Cold War". *Norwegian Peacebuilding Resource Centre Report*. March 2014. Hal.1-2

²¹⁵ DPKO. 2013. *UN Peacekeeping*. <http://www.un.org/en/peacekeeping/> dalam *Ibid.* Hal.6

Pada periode tersebut Brasil berpartisipasi dalam enam dari delapan misi perdamaian PBB.²¹⁶ Salah satu kontribusi besar Brasil terhadap misi perdamaian PBB selama periode kepemimpinan Lula da Silva yaitu pada misi perdamaian di Haiti (MINUSTAH). Dalam misi perdamaian tersebut, Brasil menjadi pemimpin misi berdasarkan Resolusi PBB Nomor 1542 tertanggal 30 April 2004 (RES/1542/2004).²¹⁷ Periode berikutnya pada awal masa pemerintahan Presiden Dilma Rousseff tahun 2011, Brasil kembali berkontribusi dalam misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dan Siprus (UNFICYP). Pada tahun 2011 Brasil juga menempati urutan kesebelas dalam hal kontribusi bidang kemiliteran dan kepolisian.²¹⁸

4.4.2 Upaya Brasil untuk menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

Upaya Brasil untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mulai tampak ketika Luiz Inacio da Silva menjabat Presiden Brasil. Penulis melihat ada dua upaya yang dilakukan Brasil untuk menjadi anggota tetap DK-PBB baik melalui peran serta militer dalam misi perdamaian maupun diplomasi dengan negara lain di sidang umum PBB. Dalam karya ilmiah ini, penulis hanya membahas upaya yang dilakukan Brasil melalui ranah militer, namun penulis juga sedikit mengulas usaha yang dilakukan melalui diplomasi di sidang umum PBB sebagai data pembanding.

Upaya melalui perundingan dan diplomasi di sidang umum PBB dilakukan melalui strategi yang disebut *G-4 Strategy*. Strategi tersebut merupakan kerjasama antar Pemerintah Jerman, Brasil, India, dan Jepang yang terbentuk sejak tahun 2004. Tujuan dari dibentuknya G-4 tersebut adalah untuk menekan PBB menata ulang struktur organisasi Dewan Keamanan, terutama bagi keanggotaan tetap dan hak veto. Selanjutnya negara yang tergabung dalam G-4 tersebut mengajukan

²¹⁶ *Ibid.* Hal.3

²¹⁷ Carlos Enrique Ruiz Ferreira. 2013. "Brazil as a Non-Permanent Member of the UN Security Council During the 2010-2011 term". *Friedrich Ebert Stiftung: UN Security in Focus*. November 2012. Hal.1

²¹⁸ Rita Santos and Teresa Almeida Cravo. *Op. Cit.* Hal. 4

proposal kepada PBB terkait penataan ulang struktur keanggotaan DK-PBB. Adapun poin penting dalam proposal tersebut diantaranya:²¹⁹

1. Dewan Keamanan terdiri dari 25 anggota
2. Pembentukan anggota tetap DK-PBB baru yang terdiri dari enam anggota
3. Enam anggota tetap DK-PBB tersebut terdiri dari dua negara Afrika, dua negara Asia, satu negara Eropa Barat, dan satu negara Amerika Selatan dan Karibia

Brasil melihat upaya melalui G-4 tersebut berdampak baik dalam usahanya menjadi anggota tetap DK-PBB.

Upaya yang dilakukan Brasil melalui ranah militer ialah melalui misi perdamaian dan operasi gabungan yang berada dibawah PBB. Hal tersebut juga diperkuat dalam dokumen *National Defense Strategy* tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Brasil harus lebih aktif berperan serta dalam misi perdamaian dibawah pengawasan PBB dan Kementerian Pertahanan.²²⁰ Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, salah satu misi perdamaian Brasil yang terbesar dalam upayanya menjadi anggota tetap DK-PBB adalah MINUSTAH. Dalam pelaksanaannya, misi perdamaian yang dipimpin Brasil tersebut mengalami peningkatan dari segi jumlah personil. Pada tahun 2005, satu tahun dari dicanangkannya operasi MINUSTAH Brasil menambah personil dari 83 menjadi 1.367 personil dan di tahun 2010 dari 1.287 personil menjadi 2.190 personil.²²¹ Sementara itu, dari segi anggaran berdasarkan Buku Putih Pertahanan Brasil juga mengeluarkan anggaran dalam program MINUSTAH mencapai 1.670 juta Reais atau sekitar US\$ 1.850 juta hingga Juni 2012.²²² Peningkatan kapabilitas militer terutama Angkatan Laut Brasil (MB) selain untuk melindungi wilayah kedaulatan Brasil juga bertujuan untuk memperkuat armada laut Brasil dalam misi perdamaian dan sebagai upaya Brasil menjadi anggota tetap DK-PBB.

²¹⁹ Carlos Enrique Ruiz Ferreira. *Op.Cit.* Hal.5

²²⁰ Ministry of Defense. *Op.Cit.* Hal.62

²²¹ UNGA. 2012. "Scale of assessments for the apportionment of the expenses of United Nations peacekeeping operations. A/RES/67/239 of December 29th".

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/PV.62 dalam Rita Santos and Teresa Almeida Cravo. *Op. Cit.* Hal.3

²²² Brazilian Government. *Op. Cit.* Hal.163

Dokumen *National Defense Strategy* tahun 2008 menyebutkan bahwa Angkatan Laut Brasil (MB) juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan misi perdamaian diluar wilayah yurisdiksi Brasil dibawah pengawawsan PBB.²²³

4.5 Analisa Teoritis Peningkatan Kapabilitas Militer Brasil

Setelah menguraikan mengenai empat argumen utama dalam karya ilmiah ini, pada bagian ini penulis akan menganalisis kebijakan peningkatan kapabilitas militer Brasil pasca diterbitkannya *National Defense Strategy* tahun 2008. Landasan analisis permasalahan dalam karya ilmiah ini menggunakan dua pendekatan konseptual, pertama adalah dengan pendekatan teori hubungan internasional *neorealisme*. Pendekatan kedua adalah dengan pendekatan konsep model birokratik atau *beureaucratic model* Graham T.Allison dalam menganalisis proses pengambilan keputusan pertahanan dan keamanan Brasil serta proses pengambilan keputusan mengenai *partner* atau mitra dalam pengembangan industri pertahanan Brasil.

4.5.1 Pendekatan Menggunakan Teori Neorealis

Peningkatan kapabilitas militer dan perimbangan kekuatan (*balancing*) dalam mengantisipasi potensi maupun ancaman riil penting dilakukan ketika hal tersebut diperlukan. Artinya, kapabilitas yang dimiliki suatu negara tidak perlu dilakukan secara berlebihan untuk menginvasi negara lain, namun dilakukan ketika negara menghadapi ancaman. Dengan demikian negara lain tidak memandang suatu negara yang meningkatkan kapabilitas militer tersebut sebagai negara ekspansionis. Pada bagian ini penulis menganalisis peningkatan kapabilitas militer Brasil dengan menggunakan kerangka pemikiran neorealisme dalam studi hubungan internasional. Terdapat dua poin utama dalam neorealisme mengenai tujuan dan strategi negara ketika berupaya meningkatkan kapabilitas militernya yaitu untuk tujuan defensif dan ofensif. Seperti yang telah penulis paparkan pada bab pertama karya ilmiah ini, apabila suatu negara hanya memaksimalkan keamanannya (*security maximize*) maka negara tersebut termasuk dalam defensif.

²²³ Ministry of Defense. *Op.Cit.* Hal. 20

Dalam kasus peningkatan kapabilitas militer Brasil pada karya ilmiah ini, penulis memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Brasil tergolong dalam strategi defensif. Hal tersebut diperkuat dalam Buku Putih Pertahanan Brasil tahun 2012 yang menyebutkan bahwa tujuan dari peningkatan kapabilitas militer Brasil adalah untuk menahan serangan dari negara lain (agresor) terhadap teritori Brasil serta untuk menciptakan perdamaian nasional. Selain itu tugas militer adalah menjaga amanat Konstitusi 1988, yang mana salah satu pokok amanat tersebut adalah menjaga kedaulatan negara seperti yang tertuang dalam Pasal 1. Apabila negara terlibat konflik dengan pihak (negara) lain, maka akan diselesaikan secara damai melalui perundingan sesuai dengan amanat Konstitusi 1988 Pasal 4 mengenai prinsip hubungan internasional Brasil. Jika proses perundingan tidak menemukan hasil dan harus diselesaikan dengan kekuatan militer, maka semata-mata ditujukan untuk melindungi kedaulatan negara dan kemerdekaan nasional (seperti yang tercantum dalam Pasal 4). Pemerintah Brasil melalui Kementerian Pertahanan dalam situs resminya juga menyebutkan:

“A política de defesa determina a capacidade do Estado de oferecer proteção ao povo brasileiro e de garantir a não ingerência externa em seu território e em suas águas jurisdicionais, inclusive no espaço aéreo sobrejacente, no leito marinho e no subsolo.”²²⁴

(Kebijakan Pertahanan negara yang dibuat merupakan suatu upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Brasil dan untuk memastikan pencegahan ancaman yang datang dari luar terhadap wilayah yurisdiksi baik darat, laut dan udara).

Dari pernyataan tersebut disebutkan bahwa kebijakan pertahanan (dalam hal ini salah satunya adalah peningkatan kapabilitas militer) ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat terhadap adanya ancaman dari luar di wilayah yurisdiksi Brasil, baik di wilayah perairan, darat dan udara serta wilayah batas kontinen.

²²⁴ Ministerio da Defesa. 2014. “Relações Internacionais”. <http://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais> (Diakses pada: 16 Maret 2014)

Seperti yang telah penulis paparkan pada bab pertama mengenai realitas defensif, Stephen Walt berpendapat bahwa terdapat dua pilihan dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar. Pilihan tersebut yaitu melakukan *balancing* atau dengan melakukan *bandwagoning*, yaitu melakukan politik mengalihkan kekuatan dengan beraliansi dengan sumber bahaya (ancaman).²²⁵ *Balancing* sendiri dapat dilakukan dengan aliansi atau melalui mobilisasi kekuatan domestik (internal) untuk menghadapi kekuatan yang mengancam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Brasil cenderung menggunakan *balancing* dalam menghadapi ancaman eksternalnya. Hal ini didasarkan pada dokumen *National Defense Strategy* tahun 2008 tentang persebaran kekuatan militer. Angkatan Laut (MB) yang difokuskan di Rio de Janeiro yang bertujuan untuk melindungi sumber daya mineral terutama minyak. Sumber daya mineral yang kaya minyak tersebut adalah Santos Basin yang hanya berjarak sekitar 250 kilometer selatan Rio de Janeiro. Dengan kandungan minyak yang mampu mencapai hingga 33 milyar barel, tidak menutup kemungkinan area tersebut menjadi incaran bagi negara besar. Kekhawatiran Brasil tersebut juga tertuang dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2012 yang menyebutkan bahwa seiring meningkatnya berbagai kepentingan di wilayah Atlantik Selatan, tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat menjadi sumber konflik di masa depan.

Selain itu, keberadaan armada keempat Amerika Serikat di wilayah Atlantik Selatan juga dikategorikan sebagai salah satu ancaman eksternal bagi Brasil. Brasil menilai keberadaan armada keempat Amerika Serikat tersebut dapat menjadi salah satu bibit konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan regional. Persepsi ancaman tersebut yang kemudian membuat Pemerintah Brasil memprioritaskan kekuatan laut di wilayah Rio de Janeiro dengan kekuatan yaitu 73.97 persen dari kekuatan laut nasional (lihat Tabel 2.3 pada Bab II) dan menempatkan armada kapal selam dan kapal induk kelas ringan *Sao Paulo* di kawasan tersebut. Selain itu, program poros maritim *Blue Amazon* juga merupakan upaya Brasil untuk mencegah upaya Amerika Serikat mendominasi

²²⁵ Stephan Walt. 1987. *The Origins of Alliances*. Itacha: Cornell University Press. Hal.5 dalam Abubakar Eby Hara. Op.Cit.,Hal.44

perairan kawasan Amerika Selatan, terutama perairan Brasil yang kaya akan sumber daya mineral dan minyak bumi. Dengan demikian diharapkan upaya pengalokasian kekuatan militer (terutama Angkatan Laut Brasil) di sekitar Rio de Janeiro dan program *Blue Amazon* setidaknya dapat mengimbangi kekuatan (*balancing*) Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan Amerika Selatan.

Seperti telah disebutkan pada bagian tentang hakikat kedaulatan negara pada bab empat ini, neorealis sebagaimana dikemukakan oleh Kenneth Waltz memandang bahwa kedaulatan negara merupakan salah satu aspek penting dan layak untuk diperjuangkan. Dalam menjaga kedaulatan nasional suatu negara diperlukan adanya kekuatan militer dan daya tangkal (*deterrence*) yang tangguh. Penulis berpendapat bahwa program *Calha Notre* dan Operasi Agatha merupakan salah satu bentuk dari upaya Brasil menjaga wilayah kedaulatannya dari pengaruh ancaman luar terutama dari pengaruh pendudukan FARC di wilayah perbatasan. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2012, pengamanan wilayah perbatasan yang meliputi wilayah perairan (sungai), wilayah udara, serta laut merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap tindak kejahatan yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan negara.²²⁶ Selain melalui program operasi militer, akuisisi alutsista kendaraan tempur, pesawat tempur dan modernisasi sistem persenjataan misil bagi militer Brasil seperti yang dipaparkan dalam bab ketiga juga merupakan upaya Brasil untuk menciptakan daya tangkal (*deterrence*) yang tangguh. Apabila melihat pada bab kedua dalam karya ilmiah ini secara keseluruhan di wilayah Amerika Selatan, militer Brasil memang memiliki kapabilitas yang unggul jika dibandingkan dengan negara lain. Namun keunggulan tersebut bukan berarti Brasil ingin menyerang negara lain, melainkan sebagai upaya memperkuat keamanannya (*security maximize*) dengan tujuan melindungi kedaulatan negara sesuai dengan amanat Konstitusi 1988.

Pada bagan Gambar 1.1 karya ilmiah ini juga disebutkan bahwa dalam realis defensif pasca Perang Dingin memunculkan kekuatan (polar) baru dalam dunia internasional. Namun disisi lain banyak pengamat hubungan internasional menilai bahwa pasca Perang Dingin tatanan dunia justru lebih mengarah pada

²²⁶ Brazilian Government. *Op. Cit.* Hal. 56

unipolar, yakni hanya ada satu kekuatan besar dalam hal ini Amerika Serikat. Sistem unipolar sendiri memiliki kelemahan diantaranya adalah adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara pemegang *super power* tersebut. Akibatnya adalah banyak negara menjadi khawatir akan keamanan nasionalnya karena tidak adanya kekuatan penyeimbang yang muncul. Lain halnya dengan multipolar, dengan adanya multipolar maka *deterrence* lebih mudah dilakukan karena banyak aktor kuat yang bersama-sama melakukan *balancing* dalam membendung kekuatan hegemoni (negara *super power*). Berdasarkan pada realitas distribusi kekuatan militer Brasil dewasa ini, pada karya ilmiah ini penulis memilih menggunakan pandangan yang kedua, yaitu tatanan multipolar dalam menjelaskan fenomena peningkatan kapabilitas militer Brasil.

Dalam dunia multipolar yang ditandai dengan munculnya kekuatan (polar) baru jika kita melihat pada kawasan Amerika Selatan, Brasil berpotensi muncul sebagai kekuatan baru dalam dunia internasional. Keanggotaan Brasil dalam jajaran negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Cina) menandakan bahwa Brasil dan negara anggota BRIC lainnya berdasarkan pengamatan dan analisis penulis, merupakan kekuatan penyeimbang bagi negara *super power* dalam tatanan internasional yang bersifat multipolar pasca Perang Dingin. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan Brasil dalam dunia internasional, yaitu upaya untuk menjadi anggota tetap DK-PBB bisa dianggap sebagai langkah yang wajar mengingat kapabilitas militer yang dimilikinya. Guna merintis ambisi tersebut, Brasil berusaha mengoptimalkan peran serta negaranya dalam misi perdamaian PBB seperti yang dilakukan dalam MINUSTAH. Dalam kaitannya dengan tujuan Brasil sebagai anggota tetap DK-PBB, jika kita kaitkan dengan menggunakan pendekatan neo-liberal institusional seperti dikemukakan Keohane yang menyebutkan institusi internasional sebagai ruang manuver bagi negara untuk melaksanakan kepentingannya, disini penulis melihat bahwa PBB sebagai institusi internasional menjadi ruang manuver Brasil sebagaimana yang dikemukakan oleh Keohane tersebut.

Selain itu untuk menjadi salah satu kekuatan (polar) baru dalam multipolar, Brasil juga berusaha menjadi pemain penting di ranah produsen

alutsista baik di level regional maupun internasional. Seperti yang tercantum dalam *National Defense Strategy* tahun 2008, Brasil ingin menjadi pemain penting dalam produsen industri pertahanan terutama dalam produksi pesawat tempur. Saat ini Brasil mulai diperhitungkan dalam hal produsen alutsista internasional. Selain itu proyek kapal selam nuklir (*ProSub*) juga merefleksikan bahwa Brasil akan menjadi salah satu kekuatan baru di kawasan Amerika Selatan. Dengan dibangunnya kapal selam nuklir, Brasil memiliki kekuatan angkatan laut yang relatif sejajar dengan negara anggota tetap DK-PBB dan BRIC lainnya seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina dan India. Dengan demikian, ditunjang dengan kondisi ekonomi yang maju serta kapabilitas militer yang mumpuni tersebut, maka bukan tidak mungkin jika dalam jangka waktu lima tahun mendatang Brasil akan bisa dicatat sebagai salah satu kekuatan baru dan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu anggota tetap DK-PBB.²²⁷ Tentu saja kemungkinan terakhir tersebut dengan catatan jika restrukturisasi keanggotaan tetap DK-PBB benar-benar dilaksanakan.

4.5.2 Pendekatan Menggunakan *Bureaucratic Model*

Pada bagian ini, penulis menganalisis tarik menarik kepentingan di tataran birokrat dalam kebijakan peningkatan kapabilitas militer Brasil. Seperti yang telah penulis paparkan pada bab pertama karya ilmiah ini, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus utama ketika kebijakan itu dibuat yaitu *players in position* dan *perception and issues*. *Players in position* menunjukkan bagaimana seorang aktor baik individu maupun kelompok berperan dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Sementara *perception and issues* menjelaskan mengenai batasan apa saja dan isu aktual yang dibahas. Pada tataran inilah seringkali terjadi perbedaan pandangan saat merumuskan suatu kebijakan antar aktor-aktor yang bermain didalamnya (*players in position*).

Dalam kasus Brasil tarik menarik kepentingan sangat terlihat dalam proses pembuatan kebijakan pertahanan negara, terlebih karena kebijakan pertahanan dan keamanan negara juga memiliki dampak yang lain seperti penjualan senjata,

²²⁷ Joao Fabio Bertonha. *Op. Cit.* Hal. 120-121

transfer teknologi, dan akuisisi. Hal tersebut dapat kita lihat terutama pada proyek FX-2, mengenai akuisisi pesawat tempur baru dan negara mitra dalam modernisasi Angkatan Udara Brasil (FAB). Pergulatan kepentingan tersebut melibatkan para birokrat, baik pada lembaga eksekutif (dalam hal ini presiden beserta kementerian terkait) dan pihak militer yang selanjutnya disebut dengan *players in position*. Sementara *perception and issues* adalah mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

Dalam perumusan kebijakan akuisisi pesawat tempur dalam program FX-2 terdapat tiga negara kandidat sebagai mitra yaitu Amerika Serikat, Perancis, dan Swedia. Ketiga negara tersebut bersaing untuk dapat memenangkan tender pengadaan pesawat tempur pengganti F-5 dan *Mirage* yang digunakan oleh Angkatan Udara Brasil (FAB). Dalam proses penentuan mitra tersebut, pihak militer Brasil lebih cenderung memilih pesawat tempur *Gripen* produksi perusahaan SAAB asal Swedia sementara pihak eksekutif Brasil lebih memilih pesawat tempur *Raffale* produksi Perancis. Muncul perbedaan pendapat antara militer dan pihak eksekutif pada masalah tersebut. Pihak militer memilih pesawat tempur *Gripen* atas dasar kemampuan serta pertimbangan alih teknologi yang ditawarkan oleh pihak Swedia. Pihak eksekutif Brasil memilih mitra Perancis karena adanya faktor kedekatan hubungan antara Brasil dengan Perancis yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Lula da Silva. Kedekatan kedua negara tersebut sebelumnya dapat kita lihat dari penandatanganan kerjasama pertahanan pada 12 Februari 2008 di Guyana, dan penjualan 50 helikopter angkut serta empat kapal selam konvensional.²²⁸

Setahun kemudian, tepatnya pada September 2009 Kementerian Pertahanan Brasil mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan negosiasi dengan pihak *Dassault Aviation* untuk pengadaan 36 pesawat tempur *Raffale* dalam proyek FX-2. Pada awal tahun 2010 salah seorang anggota kabinet Brasil

²²⁸ Par Bruno Muxagato. 2009. "President Lula's International Ambitions And The Franco-Brazilian Strategic Partnership". <http://www.diploweb.com/President-Lula-s-international.html>

(Diakses pada: 22 Oktober 2014)

menyebutkan bahwa walaupun pihak eksekutif lebih memilih Perancis sebagai mitra namun masih bernegosiasi kembali untuk masalah keuangan kontrak.²²⁹ Penulis memandang bahwa negosiasi kembali dilakukan mengingat Presiden Lula da Silva pada saat itu telah berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh Presiden Dilma Rousseff. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Presiden Lula da Silva yang mengatakan bahwa *“It’s a very big debt, it’s a long-term debt for Brazil. I could sign off on it and do a deal with France, but I’m not going to do that...”*.²³⁰ Keadaan tersebut mengakibatkan kelanjutan proyek FX-2 menjadi tidak jelas ditambah lagi perbedaan pendapat mengenai mitra antara militer Brasil dengan pihak eksekutif.

Menanggapi permasalahan proyek FX-2, pada awal tahun 2011 Presiden Dilma Rousseff berharap adanya solusi dari proyek FX-2. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan dialog terbuka antara kedua belah pihak yang berbeda pendapat, dalam hal ini adalah militer yang menginginkan Swedia sebagai mitra dengan pihak eksekutif dan kementerian yang menginginkan Perancis sebagai mitra. Kedua belah pihak tersebut memiliki argumen masing-masing dalam memilih mitra, adapun argumen dari pihak militer adalah perbandingan kemampuan dan harga dari pengadaan pesawat tempur baru seperti yang penulis uraikan dalam Tabel 4.3 berikut

Tabel 4.3 Perbandingan Kompetitor dalam Proyek FX-2

No	Kompetitor	Kelebihan	Kelemahan	Penawaran	Nilai Kontrak
1	Gripen JAS-39 NG (Swedia)	Memiliki kemampuan tempur yang cukup baik.	Pesawat tempur Gripen JAS-39 NG masih dalam tahap pengembangan	Pihak SAAB selaku produsen menawarkan kontrak transfer	US\$ 4.5 milyar

²²⁹ Defense Industry Daily. 2014. “F-X2: Brazil Picks Saab’s JAS-39 Gripen-NG over Rafale, Super Hornet”. <http://www.defenseindustrydaily.com/brazil-embarking-upon-f-x2-fighter-program-04179/#> (Diakses pada : 14 Maret 2014)

²³⁰ *Ibid.*

No	Kompetitor	Kelebihan	Kelemahan	Penawaran	Nilai Kontrak
		<p>Apabila dibandingkan dengan <i>Raffale F-3R</i>, pesawat tempur ini memiliki kemampuan yang sama. Kelebihan lainnya ialah biaya perawatan yang lebih murah dibandingkan dua kompetitor lainnya.</p>	<p>n, sehingga belum teruji secara maksimal</p>	<p>teknologi dengan pihak produsen pesawat militer Brasil EMBRAER. Sekitar 80 persen perakitan pesawat tempur <i>Gripen</i> akan dilaksanakan di Brasil, dengan demikian industri pertahanan dalam negeri dapat berkembang.</p>	
2	Raffale F-3R (Perancis)	<p>Memiliki kelebihan dibanding kompetitor lain dilengkapi dengan mesin ganda serta tambahan persenjataan yang cukup</p>	<p>Memiliki kekurangan yaitu dari segi rancangan perlindungan badan pesawat terhadap pilot, hal ini menyebabkan pesawat dapat diserang</p>	<p>Pihak <i>Dassault</i> menawarkan transfer teknologi hingga 30 tahun kedepan, dan mampu mengurangi biaya perawatan hingga US\$ 2 milyar.</p>	<p>US\$ 8.2 milyar</p>

No	Kompetitor	Kelebihan	Kelemahan	Penawaran	Nilai Kontrak
		baik. Memiliki kemampuan terbang lebih baik dibandingkan F-18	dengan jarak dekat di udara. Selain itu, harga pesawat tempur ini cukup mahal jika dibanding kompetitor lain.	Namun, terkait penawaran tersebut masih belum ada kejelasan lebih lanjut.	
3	F/A 18 Super Hornet (Amerika Serikat)	Memiliki kelebihan untuk satuan tempur, yakni dilengkapi sistem radar elektronik canggih.	Memiliki kemampuan aerodinamis dan manuver yang minim daripada kompetitor lain.	Pihak Boeing menawarkan transfer teknologi dengan nilai hingga US\$ 1.9 milyar.	US\$ 7.7 milyar

Sumber: Defense Industry Daily. 2014. "F-X2: Brazil Picks Saab's JAS-39 Gripen-NG over Rafale, Super Hornet".

<http://www.defenseindustrydaily.com/brazil-embarking-upon-f-x2-fighter-program-04179/#> (data diolah)

Sementara para pihak eksekutif Brasil memiliki pandangan dengan lebih mengedepankan dari segi politik dalam memilih mitra pada proyek FX-2. Pandangan pihak eksekutif (dalam hal ini presiden dan kementerian) tersebut sebagaimana tertera dalam Tabel. 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Pandangan Pihak Eksekutif Brasil terhadap Kompetitor Proyek FX-2

o	Kompetitor	Pandangan Pihak Eksekutif
1	Gripen JAS-39 NG (Swedia)	SAAB merupakan halangan bagi Brasil dalam mengembangkan faktor geopolitik dengan kedua kompetitor lainnya yakni Perancis dan Amerika Serikat. Dengan demikian Brasil terancam mendapatkan sanksi embargo oleh Amerika Serikat.
2	Raffale F-3R (Perancis)	Pihak eksekutif lebih condong memilih Perancis karena faktor kedekatan kedua negara sejak Brasil dibawah pemerintahan Presiden Lula da Silva. Selain itu, Perancis yang memiliki kedekatan dengan Brasil mendukung kebijakan geopolitik Brasil untuk menjadi anggota tetap DK-PBB. Hal tersebut berimplikasi pada proyek FX-2, yang mana pihak eksekutif Brasil menginginkan transfer teknologi dapat dilakukan dengan Perancis.
3	F/A 18 Super Hornet (Amerika Serikat)	Hubungan bilateral antara Brasil dengan Amerika Serikat menjadi berpengaruh pada penentuan mitra dalam proyek FX-2. Pada awalnya Brasil akan memilih pesawat <i>Super Hornet</i> produksi Amerika Serikat, namun akibat penyadapan yang dilakukan oleh NSA terhadap Brasil membuat persepsi negatif Brasil terhadap Amerika Serikat dan berujung pada pembatalan kontrak. Banyak para pemimpin politik Brasil merasa tidak ingin hubungan Brasil dengan Amerika Serikat dalam bidang keamanan terlalu dekat, dan lebih mempercayai kerjasama keamanan dengan Perancis. ²³¹

Sumber: Defense Industry Daily. 2014. "F-X2: Brazil Picks Saab's JAS-39 Gripen-NG over Rafale, Super Hornet".

<http://www.defenseindustrydaily.com/brazil-embarking-upon-f-x2-fighter-program-04179/#> (data diolah)

²³¹ Nikolas Kozloff. 2012. *Is Obama wary of Brazil and Dilma Rousseff?*. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/04/2012428134850333757.html> (Diakses pada: 24 Mei 2014)

Hasil dari pertemuan tersebut adalah pemerintah Brasil memilih pesawat tempur *Gripen* produksi perusahaan SAAB Swedia. Pemilihan pesawat tempur asal Swedia tersebut diumumkan oleh Presiden Dilma Rousseff pada tanggal 18 Desember 2013. Pemilihan pesawat tempur *Gripen* didasarkan pada penawaran kerjasama jangka panjang, biaya perawatan serta nilai kontrak yang tidak terlalu tinggi serta kapabilitas pesawat tempur tersebut. Pada tataran model birokratik Graham T. Allison terdapat ungkapan yang menyebutkan “*where you sit determines where you stand*” yakni mengenai posisi aktor birokratik dalam pembuatan kebijakan.²³² Pada kasus yang terjadi di Brasil tersebut, penulis melihat pihak yang mendeterminasi kebijakan FX-2 adalah pihak eksekutif Brasil terutama Presiden. Hal tersebut terlihat pada keinginan Presiden Brasil yang ingin bekerjasama dan mengakuisisi pesawat tempur Brasil untuk kepentingan geopolitik Brasil. Keinginan Presiden tersebut juga didukung oleh lembaga lainnya seperti kementerian.²³³ Namun, pihak militer berpandangan lain dalam menilai keputusan Presiden dan disinilah terjadi distorsi persepsi atau pertentangan kepentingan dalam lingkungan politik.

Keputusan pemerintah Brasil memilih bekerjasama dengan Swedia dalam proyek FX-2 merupakan hasil dari adanya negosiasi atau *politicking* dari para pemimpin birokratik (dalam hal ini eksekutif dengan petinggi militer). Pada dasarnya tujuan utama mereka adalah sama, yakni berkaitan dengan kebijakan keamanan nasional, tetapi mereka berbeda dalam mencapai kesepakatan. Mengutip pendapat Allison sebagaimana ditulis oleh Abubakar Eby Hara menyebutkan bahwa kesepakatan terhadap kebijakan yang disetujui tersebut mungkin akan terkikis sejalan dengan waktu, perubahan situasi, setelah kepentingan organisasi berkembang dan setelah individu memperoleh dan kehilangan kekuasaan, status birokrasi dan akses informasi.²³⁴

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis, dalam proyek FX-2 sebagaimana pendapat Allison tersebut kebijakan yang pada awalnya akan

²³² Abubakar Eby Hara. *Op. Cit.* Hal.97

²³³ Defense Industry Daily. 2014. “F-X2: Brazil Picks Saab’s JAS-39 Gripen-NG over Rafale, Super Hornet”. *Op. Cit.*

²³⁴ Abubakar Eby Hara. *Op. Cit.* Hal.97

bekerjasama dengan Perancis atau Amerika Serikat mengalami perubahan. Perubahan tersebut dikarenakan Presiden Lula da Silva kehilangan kekuasaan pasca kemenangan Presiden Dilma Rousseff tahun 2010 dan suksesi ini membuat hubungan Perancis dengan Brasil tidak begitu dekat seperti pada era Presiden Lula da Silva. Perubahan situasi yang kedua adalah penyadapan terhadap Brasil oleh agen keamanan Amerika Serikat atau NSA juga mengakibatkan pembatalan kontrak dengan pihak Boeing. Kedua faktor inilah yang pada akhirnya membuka peluang bagi Swedia untuk memenangkan tender dan kerjasama pertahanan dalam proyek FX-2.

BAB V KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa alasan Pemerintah Brasil meningkatkan kapabilitas militernya yang *Pertama* menjaga kedaulatan nasional. *Kedua*, untuk membangun kembali industri pertahanan Brasil. *Ketiga*, sebagai respon terhadap pergerakan pasukan Amerika Serikat di wilayah Amerika Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia serta pengaktifan kembali armada keempat (*fourth fleet*) angkatan laut Amerika Serikat di perairan Amerika Selatan termasuk perairan Brasil. *Keempat* sebagai promosi militer Brasil di dunia internasional melalui upaya untuk menjadi anggota tetap DK-PBB.

Adanya persepsi ancaman terhadap kedaulatan negara yang dilakukan oleh kelompok gerilyawan FARC dan kecemasan akan pergerakan kekuatan militer Amerika Serikat di wilayah Amerika Selatan, mempengaruhi Pemerintah Brasil untuk meningkatkan kapabilitas militernya melalui kebijakan pertahanan atau *National Defense Strategy* di tahun 2008. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pertahanan tersebut, Pemerintah Brasil meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 53 persen di tahun 2008 dan melakukan serangkaian program di sektor pertahanan yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara dari kedua ancaman eksternal tersebut. Serangkaian program pertahanan yang menjadi fokus utama pemerintah Brasil diantaranya memperkuat kembali program poros maritim yang telah ada sejak tahun 2004 dikenal dengan *The Blue Amazon* dan pengalokasian kekuatan militer melalui program *Calha Notre*. Program *The Blue Amazon* dimaksudkan untuk melindungi perairan Brasil yang kaya akan sumber minyak, seperti di wilayah Santos Basin yang terletak di lepas pantai Rio de Janeiro. Seperti yang telah dijelaskan pada bab pembahasan, pergerakan armada keempat (*fourth fleet*) yang tergabung dalam komando militer SOUTHCOM Amerika Serikat membuat Pemerintah Brasil khawatir kawasan kaya minyak tersebut dikuasai oleh Amerika Serikat. Sementara program *Calha Notre*

ditujukan untuk melindungi kawasan perbatasan dari ancaman eksternal yang dilakukan oleh kelompok gerilyawan FARC.

Selain sebagai respon terhadap ancaman eksternal dari FARC dan pergerakan militer Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan, tujuan peningkatan kapabilitas militer Brasil adalah untuk membangun kembali industri pertahanan Brasil. Saat ini, industri pertahanan Brasil memiliki pangsa pasar yang cukup besar, terutama pesawat latih militer dan peluncur roket multilaras. Namun seiring dengan dikeluarkannya *National Defense Strategy* di tahun 2008, Brasil mencoba mengembangkan industri pesawat tempur dan kapal selam. Keduanya tampak pada proyek FX-2 dan program *ProSub* yang mana tujuan utama dari proyek tersebut selain untuk memperkuat militer juga ditujukan untuk dikembangkan lebih lanjut guna memenuhi ambisinya sebagai pemasok pesawat tempur ke pasar internasional. Dengan demikian Brasil juga menjadi satu-satunya negara di kawasan Amerika Selatan yang memproduksi pesawat tempur.

Tujuan selanjutnya adalah sebagai upaya promosi (kampanye) militer Brasil untuk menjadi anggota tetap DK-PBB. Adapun upaya yang dilakukan Brasil adalah *pertama* melalui jalur diplomasi seperti yang dilakukan dalam program *G-4 Strategy* bersama Jerman, India, dan Jepang di sidang umum PBB. *Kedua*, melalui bidang militer yakni berperan serta dalam misi perdamaian PBB di Haiti (MINUSTAH), dengan mengirimkan personil, peralatan militer, dan bantuan material. Dari segi militer, *ketiga* adalah dengan membangun kapal selam nuklir. Kepemilikan kapal selam nuklir, setidaknya diharapkan Brasil sebagai indikator yang menunjukkan superioritas kapabilitas militer dalam keanggotaan tetap DK-PBB seperti yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Inggris dan China. Negara besar bukan anggota tetap DK-PBB yang tercatat memiliki kapal selam nuklir diantaranya adalah India dan Brasil hingga saat ini. Dengan demikian apabila dilihat dari segi kapabilitas militer, terutama kepemilikan kapal selam nuklir, Brasil bisa dianggap sejajar dengan anggota tetap DK-PBB dan tidak menutup kemungkinan peluang Brasil dapat menjadi anggota tetap DK-PBB yang baru apabila reformasi keanggotaan DK-PBB dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alberro, Hernan. 2008. *Press Freedom and Economic Development in Latin America 2008*. Montevideo: CADAL.
- Allison, Graham T. 1968. *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis : Rational Policy, Organizational Process, and Bureaucratic Politics*. California: The Rand Corporation.
- Brazilian Government. 2012. *Livro Branco da Defesa Nacional*. Brazil: Brazilian Government.
- Breuning, Maurijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Copeland, Dale. 2000. *The Origins of Major War*. New York: Cornell University Press.
- Coplin, William D. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis: Edisi Kedua* (terj. Marsedes Marbun). Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Diniz, Robert and Roberto Muggah. 2013. *Securing the Border: brazil's "South America First" Approach to Transnational Organized Crime (Strategic Paper 5 |October 2013)*. Rio de Janeiro: Igarape Institute.
- Griffiths, Martin (eds). 2007. *International Relation Theory for the Twenty-First Century*. New York: Routledge.
- Habib , A. Hasnan. 1997. *Kapita Selekt: Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.
- Hiscock, Geof. 2012. *Earth Wars : The Battle of Global Resources*. Singapore: John Wiley & Sons Pte. Ltd
- Ishiyama, John T. and Marijke Breuning. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Keduapuluh Satu: Sebuah Referensi Panduan Tematis*. (terj. A.Fedyani Syaifudin). Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Joesoef, Daoed. 2014. *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Karp, Aaron. 2009. *Surplus Arms in South America: A Survey*. Geneva: Graduate Institute of International and Development Studies.
- Kartini, Kartono. 1990. *Metodologi Riset*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Kassenova, Toghzan. 2014. *Brazil's Nuclear Kaleidoscope: An Eenvolving Identity*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Kaup, Mark V. & Paul R Viotti. 1987. *International Relation Theory : Realism, Pluralism, Globalism*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Kincaid , John and G. Alan Tarr. 2005. *Constitutional Origins, Structure, and Change in Federal Countries*. Ontario: McGill-Queen's Press.
- Maclay., Jeffrey D. et al. 2009. *The Fourth Fleet: A Tool of U.S Engagement in the Americas*. Washington: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Mahendra, Ihza Yusron. 2009. *Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional*. Edisi kedua. Bandung: Mizan Media Utama.
- Minderop , Albertine. 2006. *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ministry of Defense.2008. *National Strategy of Defense: Peace and Security for Brazil*. Brazilia: Ministry of Defense of Brazil.
- Salmon, Trevor C. 2008. *Issues in International Relation, Second Edition*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Sitepu, P.Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Souza, Celina. (Tanpa Tahun). *Federal Republic of Brazil*. International Association of Cenetr for Federal Studies.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tibbileti, Paz and Marcela Donadio. 2012. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean: 2012 edition*. Buenos Aires: Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL).

Trikunas, Harold. 2014. *Brazil Rise: Seeking Influences on Global Governance*. Washington DC: The Brookings Institution.

Tucker, Spencer C. 2004. *Tank: an Illustrated History of Their Impact*. California: ABC-CLIO Inc

Jurnal dan Artikel Ilmiah Lainnya :

Abdenur , Adriana Erthal and Danilo Marcondes de Souza Neto. 2013. "Brazil's Maritime Strategy in the South Atlantic: The Nexus Between Security and Resources". *South African Institute of International Affairs*. Occasional Paper No 161-November 2013.

Bertonha, Joao Fabio. Brazil: an Emerging Military Power? The Problem of the Use of Force in Brazilian International Relations in the 21st Century. *Revista Brasileira de Politica Internacional*. Vol.53 (2) – 2010.

Cavicchioli, Manuel Iglesias. 2010. "U.S. Foreign Policy, The South American Integration, and The Case of The Military Bases in Colombia". *Revista Electrónica De Estudios Internacionales*. 15 May 2010.

Feicert, Andre. 2005. U.S. Military Operations in the Global War on Terrorism: Afghanistan, Africa, the Philippines, and Colombia. *CRS Report for Congress*. February 4, 2005.

Ferreira, Carlos Enrique Ruiz. 2012. "Brazil as a Non-Permanent Member of the UN Security Council During the 2010-2011 term". *Friedrich Ebert Stiftung: UN Security in Focus*. November 2012.

Gilderhus, Mark T. "The Monroe Doctrine: Meanings and Implications". *Presidential Studies Quarterly*. Vol.36, No.1, Presidential Doctrine (March.,2006) Blackwell Publishing.

Hammond, Thomas H and Jonathan Bendor.Rethinking Allison's Models.*The American Political Science Review*, Vol. 86, No. 2 (June 1992). Washington DC: American Political Science Association.

Helén, Wilandh and Sam Perlo-Freeman, Elisabeth Sköns, Carina Solmirano. Trends in World Military Expenditure. *SIPRI Fact Sheet* April 2012.

Olii, Mohammad Irvan. 2005. "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang *Transnational Crime*". *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. I September 2005.

- Pinheiro, Alvaro de Souza. 2006. "Narcoterorism in Latin America: A Brazilian Perspective". *JSOU Report 06-4 April 2006*.
- Santos, Rita and Teresa Almeida Cravo. 2014. "Brazil's Rising Profile in United Nations Peacekeeping Operation Since the End of the Cold War". *Norwegian Peacebuilding Resource Centre Report*. March 2014.
- Ruizhuang, Zhang and Liu Feng. 2006. "The Typologies of Realism". *Chinese Journal of International Politics*, Vol. 1 , 2006
- Schweller, Randall L. 1994. "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In". *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer, 1994)
- Taliaferro, Jeffrey W. 2000. "Security Seeking under Anarchy". *International Security*, Vol. 25, No.3 (Winter 2000/01).
- Waltz, Keneth N. 1993. "The Emerging Structure of International Politics". *International Security*, Vol.18, No.2 (Autumn, 1993).
- Waltz, Keneth N. 2000. "Structural Realism After the Cold War". *International Security*, Vol. 25, No. 1 (Summer 2000).
- Wedenoja, Leigh. 2010."Briefing on Military Bases in Colombia". Broadway: ICPJ Intern.

Thesis:

- Connors , Michael E. 2005. *Tudo Pela Patria: The Brazilian Navy's Drive to Blue Water*. California: Naval Postgraduate School.
- Rolim da Silva, Gerson. 2013. *FARC's Influences in Brazil*. Kansas: School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth.

Surat Kabar dan Majalah:

- Ardiansyah, Yulian. 2012. "Tank Medium: Benarkah lebih Cocok Dibanding MBT di Indonesia?". *Defender*. Edisi 56/2012. Jakarta: PT. Strata Pesan Chakti.
- Adrian, Benny. 1998. "Rebutan Jadi Penguasa Laut Asia". *Angkasa*. Edisi Koleksi XI. Jakarta: Kompas Gramedia.

Guevara, Inigo. 2010. "Analysis : Brazil's Fighter Choice Will Not be an Easy One." *JDW's*. 31 Maret 2010. United Kingdom: IHS Global Ltd

Pemimpin Redaksi. 2014. "Pesawat Angkut Militer Makin Diminati". *Angkasa*. Edisi Koleksi No.90 2014. Jakarta: Kompas Gramedia.

Pemimpin Redaksi. 2013. "Apache, Black Hawk dan Kemandirian Alutsista". *Defender*. Edisi 66/2013. Jakarta: PT.Strata Pesan Chakti.

Sumber Internet:

Alsema, Adriaan. 2010. "FARC Has Permanent Bases in Brazil". <http://colombiareports.co/farc-has-permanent-bases-in-brazil/>. (Diakses pada: 07 Oktober 2014).

Army Technology. 2014. "Multi Launch Rocket System (MLRS), United States of America". <http://www.army-technology.com/projects/mlrs/>. (Diakses pada: 16 Oktober 2014).

Army Recognition. 2013. "Russia Completes the Delivery of 12 Mi-35AH 2 Sabre Attack Helicopters to Brazilian Army". http://www.armyrecognition.com/laad_2013_news_coverage_report_pictures_video/russia_completes_delivery_12_mi-35_ah2_sabre_attack_helicopters_to_brazilian_armed_forces_1404133.html. (Diakses pada: 17 November 2014).

ASD News. 2009. "KMW Hands Over 1st LEOPARD 1A5 to Brazilian Army", http://www.asdnews.com/news24182/KMW_Hands_Over_1st_LEOPAD_1A5_to_Brazilian_Army.htm. (Diakses pada: 08 November 2014).

A-Satu News. 2013. "Brasil Batalkan Kontrak Beli Jet Tempur Boeing". <http://www.asatunews.com/berita-15941-nsa-terpukul-brasil-batalkan-kontrak-beli-jet-tempur-boeing.html>. (Diakses pada: 18 Februari 2014).

Bame, Michael. 2014. "Types of Navy Ships". <http://defense.about.com/od/weaponry/a/Types-Of-Navy-Ships.htm>. (Diakses pada: 18 Oktober 2014).

Barreira, Victor. 2013. "ASTROS 2020 Enters Service With Brazilian Army". <http://www.janes.com/article/30869/astros-2020-enters-service-with-brazilian-army>. (Diakses pada: 10 November 2014).

Barreira, Victor. 2014. "Brazilian Navy to reveal indigenous OPV design at Euronaval 2014". <http://www.janes.com/article/43378/brazilian-navy-to-reveal-indigenous-opv-design-at-euronaval->. (Diakses pada: 10 November 2014).

- Boadle, Anthony. 2013. "Brazil Launches Program to Build Nuclear Submarine in a Decade". <http://www.reuters.com/article/2013/03/01/brazil-defense-submarines-idUSL1N0BT5WK20130301>. (Diakses pada: 15 Mei 2014).
- Christensen, Steen Fryba. 2014. "Brazil's South Atlantic Strategy". http://vbn.aau.dk/files/196425669/Brazil_s_South_Atlantic_Strategy_ISA_Toronto.docx. (Diakses pada: 06 November 2014).
- CNN. 2009. "Colombia, U.S Sign Deal on Uses of Bases". <http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/10/30/us.colombia.bases/index.html?iref=nextin>. (Diakses pada: 23 Desember 2014).
- Diehl, Sarah. 2009. "Brazil's New National Defense Strategy Calls for Strategic Nuclear Developments" <http://www.nti.org/analysis/articles/brazils-new-defense-strategy/>. (Diakses pada: 29 Juni 2014).
- Deagel. 2011. "Brazilian Army Orders Logistics Support for its Leopard 1A5 Tanks". http://www.deagel.com/news/Brazilian-Army-Orders-Logistics-Support-for-its-Leopard-1A5-Tanks_n000009499.aspx. (Diakses pada: 08 November 2014).
- Defense Industry Daily. 2012. "Brazil's \$1B+ Order for EC725 Cougar Helicopters". <http://www.defenseindustrydaily.com/brazil-signs-1b-production-deal-for-cougar-helicopters-04959/>. (Diakses pada: 16 November 2014).
- Defense Industry Daily. 2012. "Brazil Buys UH-60 L Black Hawk". <http://www.defenseindustrydaily.com/brazil-requests-6-uh-60ls-for-300m-03418/>. (Diakses pada: 16 November 2014).
- Defense Industry Daily. 2013. "Mi-35M Wins Brazilian Attack Helicopter Competition". <http://www.defenseindustrydaily.com/mi-35m-wins-brazilian-attack-helicopter-competition-05180/>. (Diakses pada: 17 November 2014).
- Defense Industry Daily. 2013. "ASTROS 2020: Brazil Moves to Revive Avibras". <http://www.defenseindustrydaily.com/astros-2020-brazil-moves-to-revive-avibras-07069/>. (Diakses pada: 17 November 2014).
- Defense Market Intelligence. 2013. "Brazil: National Defense Strategy Confirmed". http://dmilt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7983:brazil-national-defense-strategy-confirmed-&catid=35:latin-america&Itemid=58. (Diakses pada: 06 November 2014).

- Downie, Andrew. 2007. "A South American Arms Race?" <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1697776,00.htm> 1. (Diakses pada: 24 Mei 2014).
- Eshel, Tamir. 2011. "IVECO Inaugurates New Production Plant in Brazil Supporting VBTP Program". http://defense-update.com/20110413_iveco-vbtp-production.html#.VF-I-VdHTMw. (Diakses pada: 09 November 2014).
- Frayssinet, Fabiana . 2011. "Brazil's New Nuclear Subs to Defend Oil Well" <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/07/201172213173679528.html>. (Diakses pada: 15 Mei 2014).
- Fraser, Douglas. 2012. "BAE Systems sells patrol vessels to Brazil". <http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-business-16383765>. (Diakses pada: 11 November 2014).
- Fujikawa. 2008. "Terrorism in Brazil". <http://thebrazilbusiness.com/article/terrorism-in-brazil>. (Diakses pada: 07 Oktober 2014).
- Fujikawa. 2008. "Brazilian Armed Forces". <http://thebrazilbusiness.com/article/brazilian-armed-forces>. (Diakses pada: 07 Oktober 2014).
- Genys, Andrius. 2014. "VBTP-MR". http://www.military-today.com/apc/vbtp_mr.htm. (Diakses pada: 09 November 2014).
- Global Security. 2013. "Exercito Brasileiro-Brazilian Army Modernization", <http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/army-mods.htm>. (Diakses pada: 16 September 2014).
- Global Security. 2013. "Brazilian Air Force". <http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/airforce.htm>. (Diakses pada: 13 Oktober 2014).
- Global Security. 2013. "Submarinos Nucleares de Ataque (SNA)". <http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/sna.htm>. (Diakses pada: 12 November 2014).
- Global Security. 2013. "F-X BR/FX-2-2008-2012". <http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/fx-br-4.htm>. (Diakses pada: 15 November 2014).

- Global Security. 2013. "FX-2 Project".
<http://www.globalsecurity.org/military/world/brazil/fx-br.htm>. (Diakses pada: 24 November 2014).
- Global Security. 2014. "Worldwide Frigates and Corvettes".
<http://www.globalsecurity.org/military/world/frigates.htm>. (Diakses pada: 18 Oktober 2014).
- Goebel, Greg. "The EMBRAER Tucano & Super Tucano" 2013.
<http://www.airvectors.net/avtucano.html>. (Diakses pada: 17 April).
- Hoffman, Bruce. 1998. "Inside Terrorism".
<http://www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html>. (Diakses pada: 07 Oktober 2014).
- Jepson, Victoria. 2012. "Identify the Major Differences between Classical Realism and Neo-realism" <http://www.e-ir.info/2012/01/24/the-differences-between-classical-realism-and-neo-realism/>. (Diakses pada: 15 Mei 2014).
- Kozloff, Nikolas. 2011. "Brazil's Military on the World Stage".
http://www.huffingtonpost.com/nikolas-kozloff/wikileaks-brazils-militar_b823124.html. (Diakses pada: 24 Mei 2014).
- Kozloff, Nikolas. 2012. "Is Obama wary of Brazil and Dilma Rouseff?".
<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/04/2012428134850333757.html>. (Diakses pada: 24 Mei 2014).
- Loop, Barnhardt. 2014. "Military Helicopters Defined".
<http://www.usmilitaryhelicopters.org/military-helicopters-defined> (Diakses pada: 07 Oktober 2014).
- Maldonado, Leonardo. 2013. "Brazilian Air Force".
<http://www.milavia.net/airforces/brazil/fab.htm>. (Diakses pada: 22 Oktober 2014).
- Martin, Tyrone G. 2014. "What Is a Frigate".
<http://www.usconstitutionmuseum.org/constitution-resources/the-captain-speaks/what-is-a-frigate/>. (Diakses pada: 18 Oktober 2014).
- Marvin, Taylor. 2013. "Why Does Brazil Operate an Aircraft Carrier".
<http://smokeandstir.org/2013/12/29/why-does-brazil-operate-an-aircraft-carrier/>. (Diakses pada: 18 Oktober 2014).

- Maxwell, Kenneth. 2014. "After the Brazilian Fighter Deal: An Update on the Evolution of Brazilian Aviation". <http://www.sldinfo.com/after-the-brazilian-fighter-deal-an-update-on-the-evolution-of-brazilian-aviation>. (Diakses pada: 23 September 2014).
- Mehta, Aaron. 2013. "Brazil Picks Sweden's Gripen Fighter Jet". <http://www.defensenews.com/article/2013/12/18DEFREG02312180027/Brazil-Picks-Sweden-s-Gripen-Fighter-Jet.htm>. (Diakses pada: 24 Februari 2014).
- Mercopress. 2007. "Brazil to boost defense industry and acquire 36 fighter jets", <http://en.mercopress.com/2007/11/06/brazil-to-boost-defense-industry-and-acquire-36-fighter-jets>. (Diakses pada: 23 Maret 2014).
- Mercopress. 2011. "Brazil releases funds to develop surface to surface missile system for the Army". <http://en.mercopress.com/2011/08/31/brazil-releases-funds-to-develop-surface-to-surface-missile-system-for-the-army>. (Diakses pada: 10 November 2014).
- Milavia. 2012. "Brazilian Air Force Formally Inducts New Mi-35 into Service as AH-2 Sabre". <http://www.milavia.net/news/2010/brazilian-air-force-formally-inducts-new-mi-35-into-service-as-ah-2-sabre.html>. (Diakses pada: 16 November 2014).
- Moran, Michael. 2011. "Analysis: Brazil Goes Nuclear" <http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/brazil/110714/brazil-nuclear-submarine-falkland-islands-brazil-argentina-oil>. (Diakses pada: 15 Mei 2014).
- Nations Encyclopedia. 2013. "Brazil", <http://www.nationsencyclopedia.com/geography/Afghanistan-to-Comoros/Brazil.html>. (Diakses pada: 21 Juni 2014)
- Naval Technology. 2014. "Inahuma Class Corvette, Brazil". <http://www.naval-technology.com/projects/inahuma-class/>. (Diakses pada: 15 November 2014).
- Naval Techmology. 2014. "SSK Scorpene Class Attack Submarine, France". <http://www.naval-technology.com/projects/scorpene/>. (Diakses pada: 13 November 2014).

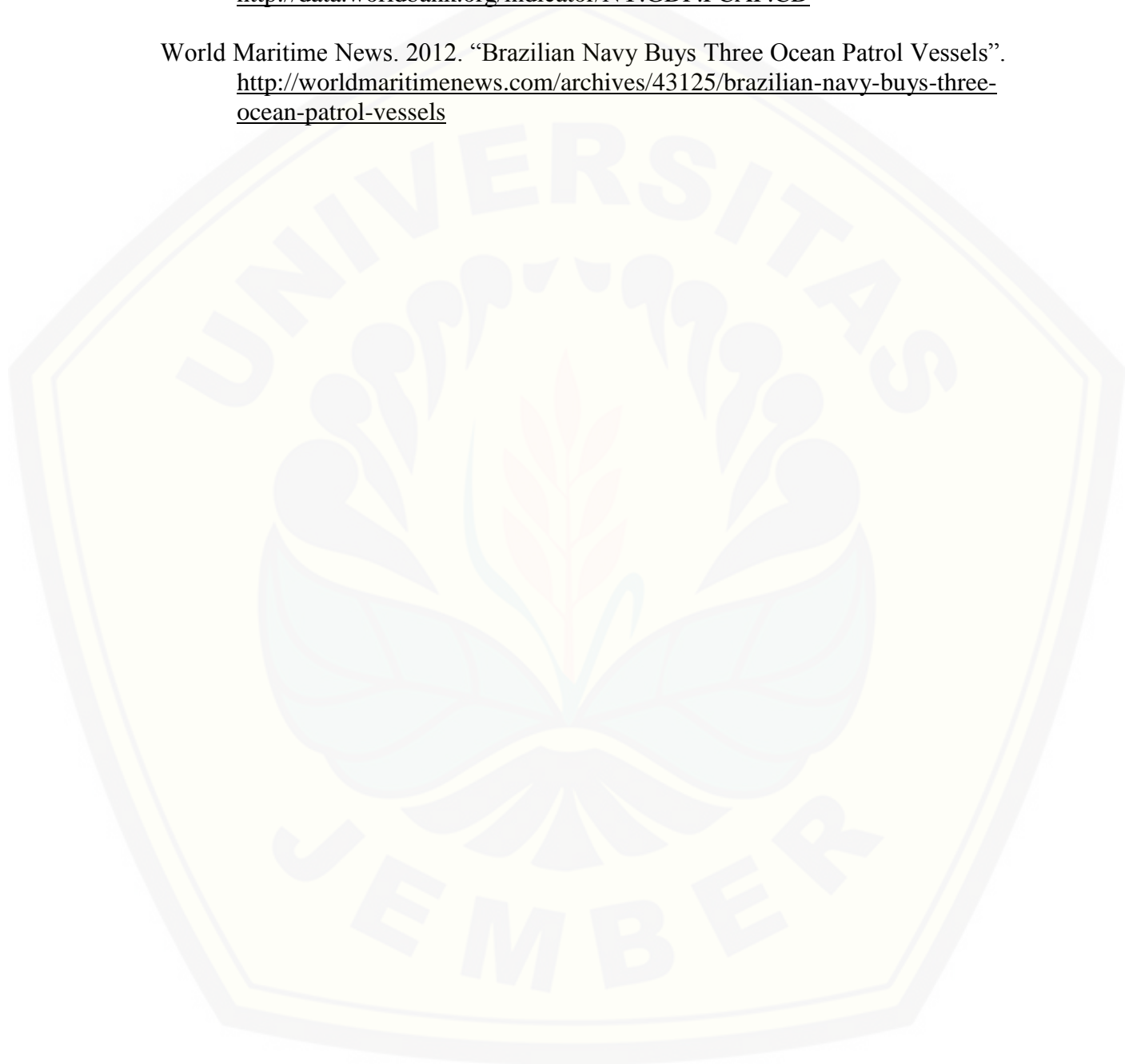
- Navy Recognition. 2012. "Scorpène class SSK Submarine Diesel-electric/AIP – DCNS". <http://www.navyrecognition.com/index.php/world-naval-forces/south-american-navies-vessels-ships-equipment/.html>. (Diakses pada: 13 November 2014).
- NSP Global. "Brazil Launches its National Defense Strategy". <http://npsglobal.org/eng/component/content/article/13-news/342-brazil-launches-its-national-defense-strategy.html>. (Diakses pada: 05 November 2014).
- Reichert, Will. 2002. "Brazilian Constitution". <http://web.mit.edu/12.000/www/m2006/teams/willr3/const.htm>. (Diakses pada: 09 Oktober 2014).
- Robinson, Walton L. 2014. "The Brazilian Navy in The World War". <http://www.usni.org/magazines/proceedings/1936-12/brazilian-navy-world-war>. (Diakses pada: 11 Oktober 2014).
- Rudnei Diaz da Cunha. 2014. "The FAB and the Second World War". <http://www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/en/>. (Diakses pada: 13 Oktober 2014).
- UNODC. 2012. "Brazil to Document Cases of Humantrafficking in Public Global Database". <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2012/brazil-to-document-cases-of-human-trafficking-in-public-global-database.html>. (Diakses pada: 08 Oktober 2014).
- UPI. 2012. "Brazil Helicopter Deal in Full Swing". http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2012/01/11/Brazil-Eurocopter-deal-in-full-swing/UPI-65101326285000/. (Diakses pada: 16 November 2014).
- UPI. 2013. "IAI wins Brazilian KC-X competition". http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2013/03/15/IAI-wins-Brazilian-KC-X-competition/UPI-98451363366032/. (Diakses pada: 17 November 2014).
- U.S Department of Defense. 2008. "Immediate Release: Navy Re-establishes U.S Fourth Fleet". <http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=11862>. (Diakses pada: 18 Desember 2014).
- Samantha, Maya et.al. 2014. "Brazilian Politics, Government, and Taxation". <http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Americas/Brazil-POLITICS-GOVERNMENT-AND-TAXATION.html>. (Diakses pada: 30 September 2014).

- Santana, Humberto. 2008. "US Navy resurrects Fourth Fleet to police Latin America". <http://www.wsws.org/en/articles/2008/05/navy-m07.html>. (Diakses pada: 08 Agustus 2014).
- SIPRI. 2014. "SIPRI Military Expenditures Database". <http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/country-search>. (Diakses pada: 08 Oktober 2014).
- SOUTHCOM. 2014. "USSOUTHCOM Main Mission". <http://www.southcom.mil/ourmissions/Pages/Our-Missions.aspx>. (Diakses pada: 18 Desember 2014).
- Suara Media. 2009. "Lindungi Devisa Negara, Brasil Kembangkan Kapal Selam Nuklir", <http://www.suaramedia.com/amerika/2009/08/24/lindungi-devisa-megara-brazil-kembangkan-kapal-selam-nuklir>. (Diakses pada: 27 Juni 2014).
- Submarine on Stamps.2013. "Marinha do Brasil Submarine", <http://www.submarinesonstamps.co.il/History.aspx?h=230>. (Diakses pada: 16 September 2014).
- Survincity. 2010. "Brazilian Armed Forces Need Urgent Modernization", <http://survincity.com/2010/01/brazilian-armed-forces-need-urgent-modernization/>. (Diakses pada: 09 Mei 2014).
- Tchkuaseli, Zaal. 2014. "MI-35:Attack Helicopter". http://www.military-today.com/helicopters/mi_35m.htm. (Diakses pada: 17 November 2014).
- Walsh, Eric . 2008. New fleet may mean U.S. covets Brazil's oil: Lula, <http://www.reuters.com/article/2008/09/18/us-brazil-oil-usa-idUSN1827567620080918>. (Diakses pada: 08 Agustus 2014).
- Winter, Brian and Alonso Soto. 2013.Saab wins Brazil jet deal after NSA spying sours Boeing bid <http://www.reuters.com/article/2013/12/18/brazil-jets-idUSL2N0JX17W20131218>. (Diakses pada: 18 Februari 2014).
- Whitaker, Renato.2011. AÇO - Chega o Sexto Lote de Leopard 1A5BR. <http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/3405/ACO----Chega-o-Sexto-Lote-de-Leopard-1A5BR>. (Diakses pada: 08 November 2014).
- World Bank . 2014. "GDP Per-Capita (Current US\$)". <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>. (Diakses pada: 27 Oktober 2014).
- World Maritime News. 2012. "Brazilian Navy Buys Three Ocean Patrol Vessels". <http://worldmaritimeneeds.com/archives/43125/brazilian-navy-buys-three-ocean-patrol-vessels>. (Diakses pada: 11 November 2014).

Whitaker, Renato.2011. AÇO - Chega o Sexto Lote de Leopard 1A5BR.
<http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/3405/ACO----Chega-o-Sexto-Lote-de-Leopard-1A5BR>

World Bank . 2014. “GDP Per-Capita (Current US\$)”.
<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>

World Maritime News. 2012. “Brazilian Navy Buys Three Ocean Patrol Vessels”.
<http://worldmaritimeneeds.com/archives/43125/brazilian-navy-buys-three-ocean-patrol-vessels>



Lampiran 1: Dekrit Presiden Brasil tentang Pengesahan *National Defense Strategy 2008*



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 6.703, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

Aprova a Estratégia Nacional de Defesa, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto de 6 de setembro de 2007, que institui o Comitê Ministerial de Formulação da Estratégia Nacional de Defesa,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Estratégia Nacional de Defesa anexa a este Decreto.

Art. 2º Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão considerar, em seus planejamentos, ações que concorram para fortalecer a Defesa Nacional.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de dezembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Nelson Jobim

Roberto Mangabeira Unger

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.2008

ANEXO
ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA
I – FORMULAÇÃO SISTEMÁTICA

Introdução

O Brasil é pacífico por tradição e por convicção. Vive em paz com seus vizinhos. Rege suas relações internacionais, dentre outros, pelos princípios constitucionais da não-intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Esse traço de pacifismo é parte da identidade nacional e um valor a ser conservado pelo povo brasileiro.

País em desenvolvimento, o Brasil ascenderá ao primeiro plano no mundo sem exercer hegemonia ou dominação. O povo brasileiro não deseja exercer mando sobre outros povos. Quer que o Brasil se engrandeça sem imperar.

Talvez por isso nunca tenha sido realizado no Brasil, em toda a sua história, amplo debate sobre os assuntos de defesa. Periodicamente, os governos autorizavam a compra ou a produção de novos materiais de defesa e introduziam reformas pontuais nas Forças Armadas. No entanto, nunca propuseram uma estratégia nacional de defesa para orientar de forma sistemática a reorganização e reorientação das Forças Armadas; a organização da indústria de material de defesa, com a finalidade de assegurar a autonomia operacional para as três Forças: a

Marinha, o Exército e a Aeronáutica; e a política de composição dos seus efetivos, sobretudo a reconsideração do Serviço Militar Obrigatório.

Porém, se o Brasil quiser ocupar o lugar que lhe cabe no mundo, precisará estar preparado para defender-se não somente das agressões, mas também das ameaças. Vive-se em um mundo em que a intimidação tripudia sobre a boa fé. Nada substitui o envolvimento do povo brasileiro no debate e na construção da sua própria defesa.

Estratégia Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Desenvolvimento

1. Estratégia nacional de defesa é inseparável de estratégia nacional de desenvolvimento. Esta motiva aquela. Aquela fornece escudo para esta. Cada uma reforça as razões da outra. Em ambas, se desperta para a nacionalidade e constrói-se a Nação. Defendido, o Brasil terá como dizer não, quando tiver que dizer não. Terá capacidade para construir seu próprio modelo de desenvolvimento.

2. Difícil – e necessário – é para um País que pouco trato teve com guerras convencer-se da necessidade de defender-se para poder construir-se. Não bastam, ainda que sejam proveitosos e até mesmo indispensáveis, os argumentos que invocam as utilidades das tecnologias e dos conhecimentos da defesa para o desenvolvimento do País. Os recursos demandados pela defesa exigem uma transformação de consciências para que se constitua uma estratégia de defesa para o Brasil.

3. Difícil – e necessário – é para as Forças Armadas de um País tão pacífico como o Brasil manterem, em meio à paz, o impulso de se prepararem para o combate e de cultivarem, em prol desse preparo, o hábito da transformação.

Disposição para mudar é o que a Nação está a exigir agora de seus marinheiros, soldados e aviadores. Não se trata apenas de financiar e de equipar as Forças Armadas. Trata-se de transformá-las, para melhor defenderem o Brasil.

4. Projeto forte de defesa favorece projeto forte de desenvolvimento. Forte é o projeto de desenvolvimento que, sejam quais forem suas demais orientações, se guie pelos seguintes princípios:

a) Independência nacional, efetivada pela mobilização de recursos físicos, econômicos e humanos, para o investimento no potencial produtivo do País. Aproveitar a poupança estrangeira, sem dela depender;

b) Independência nacional, alcançada pela capacitação tecnológica autônoma, inclusive nos estratégicos setores espacial, cibernético e nuclear. Não é independente quem não tem o domínio das tecnologias sensíveis, tanto para a defesa como para o desenvolvimento; e

c) Independência nacional, assegurada pela democratização de oportunidades educativas e econômicas e pelas oportunidades para ampliar a participação popular nos processos decisórios da vida política e econômica do País. O Brasil não será independente enquanto faltar para parcela do seu povo condições para aprender, trabalhar e produzir.

Os setores estratégicos: o espacial, o cibernético e o nuclear

1.Três setores estratégicos - o espacial, o cibernético e o nuclear –são essenciais para a defesa nacional.

2.Nos três setores, as parcerias com outros países e as compras de produtos e serviços no exterior devem ser compatibilizadas com o objetivo de assegurar espectro abrangente de capacitações e de tecnologias sob domínio nacional.

3.No setor espacial, as prioridades são as seguintes:

4.As capacitações cibernéticas se destinarão ao mais amplo espectro de usos industriais, educativos e militares. Incluirão, como parte prioritária, as tecnologias de comunicação entre todos os contingentes das Forças Armadas de modo a assegurar sua capacidade para atuar em rede. Contemplarão o poder de comunicação entre os contingentes das Forças Armadas e os veículos espaciais. No setor cibernético, será constituída organização encarregada de desenvolver a capacitação cibernética nos campos industrial e militar.

5.O setor nuclear tem valor estratégico. Transcende, por sua natureza, a divisão entre desenvolvimento e defesa.

Por imperativo constitucional e por tratado internacional, privou-se o Brasil da faculdade de empregar a energia nuclear para qualquer fim que não seja pacífico. Fê-lo sob várias premissas, das quais a mais importante foi o progressivo desarmamento nuclear das potências nucleares.

O Brasil zelará por manter abertas as vias de acesso ao desenvolvimento de suas tecnologias de energia nuclear. Não aderirá a acréscimos ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares destinados a ampliar as restrições do Tratado sem que as potências nucleares tenham avançado na premissa central do Tratado: seu próprio desarmamento nuclear.

6.A primeira prioridade do Estado na política dos três setores estratégicos será a formação de recursos humanos nas ciências relevantes. Para tanto, ajudará a financiar os programas de pesquisa e de formação nas universidades brasileiras e nos centros nacionais de pesquisa e aumentará a oferta de bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento nas instituições internacionais pertinentes. Essa política de apoio não se limitará à ciência aplicada, de emprego tecnológico imediato. Beneficiará, também, a ciência fundamental e especulativa.

A reorganização da indústria nacional de material de defesa: desenvolvimento tecnológico independente

1.A defesa do Brasil requer a reorganização da indústria nacional de material de defesa, de acordo com as seguintes diretrizes:

a. Dar prioridade ao desenvolvimento de capacitações tecnológicas independentes.

Essa meta condicionará as parcerias com países e empresas estrangeiras ao desenvolvimento progressivo de pesquisa e de produção no País.

b. Subordinar as considerações comerciais aos imperativos estratégicos.

Isso importa em organizar o regime legal, regulatório e tributário da indústria nacional de material de defesa para que reflita tal subordinação.

c. Evitar que a indústria nacional de material de defesa polarize-se entre pesquisa avançada e produção rotineira.

Isso implica buscar a modernização permanente das plataformas, seja pela reavaliação à luz da experiência operacional, seja pela incorporação de melhorias providas do desenvolvimento tecnológico.

2. Estabelecer-se-á, para a indústria nacional de material de defesa, regime legal, regulatório e tributário especial.

Tal regime resguardará as empresas privadas de material de defesa das pressões do imediatismo mercantil ao eximi-las do regime geral de licitações; as protegerá contra o risco dos contingenciamentos orçamentários e assegurará a continuidade nas compras públicas. Em contrapartida, o Estado ganhará poderes especiais sobre as empresas privadas, para além das fronteiras da autoridade regulatória geral. Esses poderes serão exercidos quer por meio de instrumentos de direito privado, como a “golden share”, quer por meio de instrumentos de direito público, como os licenciamentos regulatórios.

3. O componente estatal da indústria de material de defesa terá por vocação produzir o que o setor privado não possa projetar e fabricar, a curto e médio prazo, de maneira rentável. Atuará, portanto, no teto, e não no piso tecnológico. Manterá estreito vínculo com os centros avançados de pesquisa das próprias Forças Armadas e das instituições acadêmicas brasileiras.

4. O Estado ajudará a conquistar clientela estrangeira para a indústria nacional de material de defesa. Entretanto, a continuidade da produção deve ser organizada para não depender da conquista ou da continuidade de tal clientela. Portanto, o Estado reconhecerá que em muitas linhas de produção, aquela indústria terá de operar em sistema de “custo mais margem” e, por conseguinte, sob intenso escrutínio regulatório.

5. O futuro das capacitações tecnológicas nacionais de defesa depende mais da formação de recursos humanos do que do desenvolvimento de aparato industrial. Daí a primazia da política de formação de cientistas, em ciência aplicada e básica, já abordada no tratamento dos setores espacial, cibernético e nuclear.

6. No esforço de reorganizar a indústria nacional de material de defesa, buscar-se-á parcerias com outros países, com o objetivo de desenvolver a capacitação tecnológica nacional, de modo a reduzir progressivamente a compra de serviços e de produtos acabados no exterior. A esses interlocutores estrangeiros, o Brasil deixará sempre claro que pretende ser parceiro, não cliente ou comprador. O País está mais interessado em parcerias que fortaleçam suas capacitações independentes do que na compra de produtos e serviços acabados.

7. Estabelecer-se-á, no Ministério da Defesa, uma Secretaria de Produtos de Defesa. O Secretário será nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro da Defesa.

8. A Secretaria responsável pela área de Ciência e Tecnologia no Ministério da Defesa deverá ter, entre as suas atribuições, a de coordenar a pesquisa avançada em tecnologias de defesa que se realize nos Institutos de pesquisa da Marinha, do

Exército e da Aeronáutica, bem como em outras organizações subordinadas às Forças Armadas.

O objetivo será implementar uma política tecnológica integrada, que evite duplicação; compartilhe quadros, idéias e recursos; e prime por construir elos entre pesquisa e produção, sem perder contato com avanços em ciências básicas. Para assegurar a consecução desses objetivos, a Secretaria fará com que muitos projetos de pesquisa sejam realizados conjuntamente pelas instituições de tecnologia avançada das três Forças Armadas. Alguns desses projetos conjuntos poderão ser organizados com personalidade própria, seja como empresas de propósitos específicos, seja sob outras formas jurídicas.

Os projetos serão escolhidos e avaliados não só pelo seu potencial produtivo próximo, mas também por sua fecundidade tecnológica: sua utilidade como fonte de inspiração e de capacitação para iniciativas análogas.

9. Resguardados os interesses de segurança do Estado quanto ao acesso a informações, serão estimuladas iniciativas conjuntas entre organizações de pesquisa das Forças Armadas, instituições acadêmicas nacionais e empresas privadas brasileiras. O objetivo será fomentar o desenvolvimento de um complexo militar-universitário-empresarial capaz de atuar na fronteira de tecnologias que terão quase sempre utilidade dual, militar e civil.

II – MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Contexto

A segunda parte da Estratégia Nacional de Defesa complementa a formulação sistemática contida na primeira.

São três seus propósitos. O primeiro é contextualizá-la, enumerando circunstâncias que ajudam a precisar-lhe os objetivos e a explicar-lhe os métodos. O segundo é aplicar a Estratégia a um espectro, amplo e representativo, de problemas atuais enfrentados pelas Forças Armadas e, com isso, tornar mais claras sua doutrina e suas exigências. O terceiro é enumerar medidas de transição que indiquem o caminho que levará o Brasil, de onde está para onde deve ir, na organização de sua defesa.

Podem ser considerados como principais aspectos positivos do atual quadro da defesa nacional:

- Forças Armadas identificadas com a sociedade brasileira, com altos índices de confiabilidade;
- adaptabilidade do brasileiro às situações novas e inusitadas, criando situação propícia a uma cultura militar pautada pelo conceito da flexibilidade; e
- excelência do ensino nas Forças Armadas, no que diz respeito à metodologia e à atualização em relação às modernas táticas e estratégias de emprego de meios militares, incluindo o uso de concepções próprias, adequadas aos ambientes operacionais de provável emprego.

Por outro lado, configuram-se como principais vulnerabilidades da atual estrutura de defesa do País:

- pouco envolvimento da sociedade brasileira com os assuntos de defesa e escassez de especialistas civis nesses temas;
- insuficiência e descontinuidade na alocação de recursos orçamentários para a defesa;
- obsolescência da maioria dos equipamentos das Forças Armadas; elevado grau de dependência em relação a produtos de defesa estrangeiros; e ausência de direção unificada para aquisições de produtos de defesa;
- inadequada distribuição espacial das Forças Armadas no território nacional, para o atendimento otimizado às necessidades estratégicas;
- falta de articulação com o Governo federal e com a sociedade do principal Instituto brasileiro de altos estudos estratégicos - a Escola Superior de Guerra - no desenvolvimento e consolidação dos conhecimentos necessários ao planejamento de defesa e no assessoramento à formulação de políticas e estratégias decorrentes;
- insuficiência ou pouca atratividade e divulgação dos cursos para a capacitação de civis em assuntos de defesa; e inexistência de carreira civil na área de defesa, mesmo sendo uma função de Estado;
- limitados recursos aplicados em pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de material de emprego militar e produtos de defesa, associados ao incipiente nível de integração entre os órgãos militares de pesquisa, e entre estes e os institutos civis de pesquisa;
- inexistência de planejamento nacional para desenvolvimento de produtos de elevado conteúdo tecnológico, com participação coordenada dos centros de pesquisa das universidades, das Forças Armadas e da indústria;
- falta de inclusão, nos planos governamentais, de programas de aquisição de produtos de defesa em longo prazo, calcados em programas plurianuais e em planos de equipamento das Forças Armadas, com priorização da indústria nacional de material de defesa. Essa omissão ocasiona aquisições de produtos de defesa no exterior, às vezes, calcadas em oportunidades, com desníveis tecnológicos em relação ao “estado da arte” e com a geração de indesejável dependência externa;
- inexistência de regras claras de prioridade à indústria nacional, no caso de produtos de defesa fabricados no País;
- dualidade de tratamento tributário entre o produto de defesa fabricado no País e o adquirido no exterior, com excessiva carga tributária incidente sobre o material nacional, favorecendo a opção pela importação;
- deficiências nos programas de financiamento para as empresas nacionais fornecedoras de produtos de defesa, prejudicando-as nos mercados interno e externo;
- falta de garantias para apoiar possíveis contratos de fornecimento oriundos da indústria nacional de defesa;
- bloqueios tecnológicos impostos por países desenvolvidos, retardando os projetos estratégicos de concepção brasileira;
- cláusula de compensação comercial, industrial e tecnológica (off-set) inexistente em alguns contratos de importação de produtos de defesa, ou mesmo a não-participação efetiva da indústria nacional em programas de compensação; e
- otimização dos esforços em Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa, por intermédio, dentre outras, das seguintes medidas:

(a) maior integração entre as instituições científicas e tecnológicas, tanto militares como civis, e a indústria nacional de defesa;

(b) definição de pesquisas de uso dual; e

(c) fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos de interesse da defesa;

- maior integração entre as indústrias estatal e privada de material de defesa, com a definição de um modelo de participação na produção nacional de meios de defesa;

- estabelecimento de regime jurídico especial para a indústria nacional de material de defesa, que possibilite a continuidade e o caráter preferencial nas compras públicas;

- integração e definição centralizada na aquisição de produtos de defesa de uso comum, compatíveis com as prioridades estabelecidas;

- condicionamento da compra de produtos de defesa no exterior à transferência substancial de tecnologia, inclusive por meio de parcerias para pesquisa e fabricação no Brasil de partes desses produtos ou de sucedâneos a eles;

- articulação das Forças Armadas, compatível com as necessidades estratégicas e de adestramento dos Comandos Operacionais, tanto singulares quanto conjuntos, capaz de levar em consideração as exigências de cada ambiente operacional, em especial o amazônico e o do Atlântico Sul;

Ações Estratégicas

Enunciam-se a seguir as ações estratégicas que irão orientar a implementação da Estratégia Nacional de Defesa:

Disposições Finais

Os documentos complementares e decorrentes da presente Estratégia Nacional de Defesa, cujas necessidades de elaboração ou atualização atendem às exigências desta Estratégia, deverão ser confeccionados conforme o quadro a seguir:

PRAZO	TAREFA A REALIZAR	RESPONSÁVEL
31/12/2010	Planos Estratégicos que servirão de base para os Planos de Campanha dos Comandos Conjuntos, para cada HE	MD
30/06/2009	Planos de Equipamento e Articulação das Forças Armadas (2009-2030)	MD e Forças Armadas
30/09/2009	Proposta de Projeto de Lei de Equipamento e Articulação da Defesa Nacional a ser submetida ao Presidente da República	CC e MD
31/03/2009	Atualização da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional e instrumentos normativos decorrentes.	MD e MCT
31/03/2009	Atualização da Política Nacional da Indústria de Defesa	MD, MF, MDIC, MPOG MCT e SAE
31/03/2009	Proposta de estabelecimento de parcerias estratégicas com países que possam contribuir	MD, MRE e SAE

PRAZO	TAREFA A REALIZAR	RESPONSÁVEL
	para o desenvolvimento de tecnologia de ponta de interesse para a defesa	
31/03/2009	Proposta de estabelecimento de ato legal que garanta a alocação, de forma continuada, de recursos financeiros específicos, para viabilizar o desenvolvimento integrado e a conclusão de projetos relacionados à defesa nacional.	CC, MF, MD, MPOG e SAE
30/06/2009	Proposta de dispositivos necessários a viabilizar investimentos nas Forças Armadas a partir de receitas eventualmente geradas pelos bens imóveis da União, administrados pelas Forças.	CC, MD, MF e MPOG
30/06/2009	Proposta de uma legislação específica que possibilite a aplicação, nas Forças Armadas, dos recursos provenientes do recolhimento de taxas e serviços	CC, MD, MF e MPOG
30/06/2009	Projeto de Lei com a nova Estrutura Militar de Defesa contemplando a estruturação de núcleos de Estados-Maiores Conjuntos vinculados ao MD.	CC e MD
30/06/2009	Apresentação de estudo de viabilidade para a criação e regulamentação de um Serviço Civil, em todo o território nacional, a ser prestado por cidadãos que não forem designados para a realização do Serviço Militar	CC, MD, MPOG e SAE, MEC e SAÚDE
30/06/2009	Projeto de Lei propondo a criação de quadro específico de Especialistas de Defesa, para a inclusão no Plano Único de Carreira dos servidores da área de defesa, em complementação às carreiras existentes na administração civil e militar	CC, MD e MPOG
30/06/2009	Plano de Transferência da ESG para Brasília e proposta de medidas complementares necessárias	MD
31/03/2009	Projeto de Lei alterando a Lei de Criação da ESG, viabilizando a criação de cargos DAS	CC, MD e MPOG
30/06/2009	Proposta de Política de Ensino para as Forças Armadas, em particular no nível de Altos Estudos	MD e MEC
31/03/2009	Proposta de Modificação da Lei do Sistema Nacional de Mobilização	CC, MD e SAE
30/06/2009	Projeto de Lei propondo nova estrutura do MD, com a criação de órgão encarregado do processo de aquisição de produto de defesa, devidamente integrado ao processo de catalogação de material	CC, MD e MPOG
31/03/2009	Proposta de criação de estrutura, subordinada ao MD, encarregada da coordenação dos processos de certificação, de metrologia, de normalização e de fomento industrial	MD, MDIC e MPOG

PRAZO	TAREFA A REALIZAR	RESPONSÁVEL
31/03/2009	Proposta de modificações na Lei nº 8.666 e legislação complementar, possibilitando regime jurídico e econômico especial para compras de produtos de defesa junto às empresas nacionais	CC, MD, MDIC, MT, MPOG e SAE
31/03/2009	Proposta de modificações na legislação referente à tributação incidente sobre a indústria nacional de defesa, por meio da criação de regime jurídico especial que viabilize incentivos e desoneração tributária à iniciativa privada na fabricação de produto de defesa prioritário para as Forças Armadas	CC, MD, MDIC, MF, MT, MPOG e SAE
31/03/2009	Proposta de modificações na legislação referente à viabilização, por parte do Ministério da Fazenda, de procedimentos de garantias para contratos de exportação de produto de defesa de grande vulto	CC, MD, MF, MT, MDIC e SAE
30/06/2009	Propostas de alterações na LCP 97, na LCP 117 e na Lei nº 9.299, para adequá-las à Estratégia Nacional de Defesa	CC e MD

A ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA E SEUS DOCUMENTOS DECORRENTES SERÃO COMPLEMENTADOS POR ANEXOS. TAIS ANEXOS FORMULARÃO PLANOS PARA DIVERSAS HIPÓTESES DE EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS. SERÃO ELABORADOS, SOB A DIREÇÃO DO MINISTRO DA DEFESA, PELO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS E PELOS ESTADOS-MAIORES DAS TRÊS FORÇAS.

Lampiran 2: Dekrit Presiden Brasil tentang Penjagaan Wilayah Perbatasan



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

A. DECRETO Nº 7.496, DE 8 DE JUNHO DE 2011.

Institui o Plano Estratégico de Fronteiras.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Plano Estratégico de Fronteiras para o fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira.

Art. 2º O Plano Estratégico de Fronteiras terá como diretrizes:

I - a atuação integrada dos órgãos de segurança pública e das Forças Armadas;
e

I - a atuação integrada dos órgãos de segurança pública, da Secretaria da Receita Federal do Brasil e das Forças Armadas; e (Redação dada pelo Decreto nº 7.638, de 2011)

II - a integração com os países vizinhos.

Art. 3º O Plano Estratégico de Fronteiras terá como objetivos:

I - a integração das ações de segurança pública e das Forças Armadas da União com a ação dos estados e municípios situados na faixa de fronteira;

II - a execução de ações conjuntas entre os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, e as Forças Armadas;

III - a troca de informações entre os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, e as Forças Armadas;

I - a integração das ações de segurança pública, de controle aduaneiro e das Forças Armadas da União com a ação dos Estados e Municípios situados na faixa de fronteira; (Redação dada pelo Decreto nº 7.638, de 2011)

II - a execução de ações conjuntas entre os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Forças Armadas; (Redação dada pelo Decreto nº 7.638, de 2011)

III - a troca de informações entre os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Forças Armadas; (Redação dada pelo Decreto nº 7.638, de 2011)

IV - a realização de parcerias com países vizinhos para atuação nas ações previstas no art. 1º; e

V - a ampliação do quadro de pessoal e da estrutura destinada à prevenção, controle, fiscalização e repressão de delitos na faixa de fronteira.

Art. 4º O Plano Estratégico de Fronteiras será efetivado mediante a realização, entre outras, das seguintes medidas:

I - ações de integração federativa entre a União e os estados e municípios situados na faixa de fronteira;

II - implementação de projetos estruturantes para o fortalecimento da presença estatal na região de fronteira; e

III - ações de cooperação internacional com países vizinhos.

Art. 5º As ações do Plano Estratégico de Fronteiras serão implementadas por meio de:

I - Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira - GGIF; e

II - Centro de Operações Conjuntas - COC.

Art. 6º Os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira terão como objetivo a integração e a articulação das ações da União previstas no art. 1º com as ações dos estados e municípios, cabendo a eles:

I - propor e coordenar a integração das ações;

II - tornar ágil e eficaz a comunicação entre os seus órgãos;

III - apoiar as secretarias e polícias estaduais, a polícia federal e os órgãos de fiscalização municipais;

IV - analisar dados estatísticos e realizar estudos sobre as infrações criminais e administrativas;

V - propor ações integradas de fiscalização e segurança urbana no âmbito dos municípios situados na faixa de fronteira;

VI - incentivar a criação de Gabinetes de Gestão Integrada Municipal; e

VII - definir as áreas prioritárias de sua atuação.

§ 1º Não haverá hierarquia entre os órgãos que compõem os GGIF e suas decisões serão tomadas por consenso.

§ 2º Cada GGIF será constituído por ato do Governo Estadual e será composto pelas autoridades federais e estaduais que atuem nos termos do art. 1º e por representantes dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipal da região de fronteira.

Art. 7º O Centro de Operações Conjuntas será composto por representantes de todas as instituições partícipes das operações, mediante assinatura de acordo de cooperação.

§ 1º Não haverá hierarquia entre os órgãos que compõem o COC e suas decisões serão tomadas por consenso.

§ 2º Compete ao COC realizar a integração entre os partícipes mencionados no **caput**, o acompanhamento e a coordenação das ações do Plano Estratégico de Fronteiras.

§ 3º O COC terá como sede as instalações do Ministério da Defesa.

Art. 8º A participação dos estados e dos municípios no Plano Estratégico de Fronteiras se dará mediante a assinatura de termo de adesão.

Art. 9º A Coordenação do Plano Estratégico de Fronteiras será exercida pelos Ministros de Estado da Justiça e da Defesa.

Art. 9º A coordenação do Plano Estratégico de Fronteiras será exercida pelos Ministros de Estado da Justiça, da Defesa e da Fazenda. (Redação dada pelo Decreto nº 7.638, de 2011)

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de junho de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

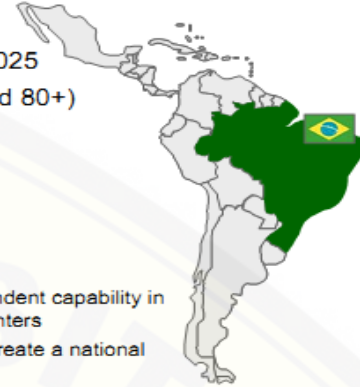
Nelson Jobim

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.6.2011

Lampiran 3: Skema Kerjasama Brasil dan Swedia dalam Proyek FX-2

BACKGROUND - FX

- Current fleet need to be replaced 2014-2025
- Initial quantity: 36 aircraft (Long term need 80+)
- Budget: ~ 4.0+ BUSD (initial package)
- Competitors:
 - Dassault (FR) - Rafale F3
 - Boeing (US) - F-18 E/F Super Hornet
- Overall political objective:
 - Use FX-2 as a stepping stone to future independent capability in design and development of next generation fighters
 - Strengthen Brazilian Aerospace Industry and create a national (independent) supplier base
 - Ability to protect borders and strategic energy resources
- Will open the doors to other markets in the region



BRAZILIAN INDUSTRY – SINGLE SOURCE SUPPLIERS FOR THE WORLD MARKET



➤ A World Market Potential for more than 300 Gripen

